

BUKU I



# KONDISI EKSISTING ARSITEKTUR SPBE

Pemerintah Kabupaten Tapin



2022

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Adanya amanat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) mengenai implementasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) kepada seluruh instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah (IPPD). SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE (Masyarakat & Swasta). Hal ini seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi SPBE.



Implementasi SPBE dievaluasi oleh evaluator dari Kemenpan-RB setiap tahunnya dengan tujuan untuk memastikan kelangsungan dari implementasi SPBE. Dalam menanggapi amanat SPBE ini Pemerintah Kabupaten Tapin berinisiatif untuk mengimplementasikan SPBE dengan semangat *continuous improvement*. Salah satu tahapan yang dilakukan yaitu dengan menyusun kajian Arsitektur dan Peta Rencana SPBE. Tujuan dari disusunnya kajian perencanaan ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Tapin dalam mengimplementasikan SPBE selama 5 tahun kedepan agar dalam pelaksanaannya seluruh instansi internal yang terlibat dapat saling bersinergi. Selain itu juga dengan adanya perencanaan ini diharapkan dapat meningkatkan penilaian indeks SPBE secara bertahap.

Strategi yang digunakan Pemerintah Kabupaten Tapin dalam menyusun Arsitektur dan PETA Rencana ini agar dapat meningkatkan indeks SPBE ialah dengan berpedoman pada Perpres 95/2018 dan mengikuti Visi, Misi, Tujuan & Strategi SPBE Nasional serta berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional. Selain itu dengan melakukan *reverse engineering* terhadap parameter dari 47 indikator yang menjadi pokok dari evaluasi SPBE. Sehingga dapat dipastikan apa yang tertuang dalam kajian ini telah memenuhi dengan konteks evaluasi dalam SPBE. Dalam Arsitektur SPBE ini mencakup domain Tata Kelola, Manajemen, Arsitektur Proses Bisnis, Arsitektur Data & Informasi, Arsitektur Layanan Arsitektur Aplikasi, Arsitektur Infrastruktur, Arsitektur Keamanan Informasi dan Audit TIK dengan harapan agar Pemerintah Kabupaten Tapin dapat menghadirkan transformasi digital dalam layanan internal maupun publiknya.

# Daftar Isi

<b>Daftar Isi</b>	<b>3</b>
<b>Bab I</b>	
<b>Pendahuluan</b>	<b>6</b>
Latar Belakang	7
Maksud dan Tujuan	10
Landasan Hukum	10
Landasan Teori	12
TOGAF 9.1 Framework untuk Arsitektur Data, Infrastruktur, Aplikasi dan Keamanan TIK	12
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	12
Arsitektur dan Peta Rencana SPBE	15
<b>Bab II</b>	
<b>Visi, Misi Strategi SPBE</b>	<b>23</b>
Visi RPJMD	24
Strategi Peningkatan SPBE	25
Inisiatif Strategis SPBE	28
<b>Bab III</b>	
<b>Analisa Kondisi Eksisting SPBE</b>	<b>30</b>
Kebijakan & Management	31
Kebijakan	31
Manajemen	31
Arsitektur Proses Bisnis	32
Katalog Proses Bisnis	33
Arsitektur Data	54
Katalog Entitas Data	54
Analisis Diagram Data	66
Matriks Kewenangan Data (RACI)	68
Arsitektur Layanan	69
Diagram Layanan SPBE yang menjadi indikator dalam evaluasi	69
Layanan Perencanaan	70
Layanan Penganggaran	75
Layanan Keuangan	77
Layanan Pengelolaan Aset	81
Layanan Kepegawaian	85
Layanan Kinerja Pegawai	90

Layanan Kearsipan Dinamis	93
Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	97
Layanan Pengaduan Publik	100
Layanan Data Terbuka	102
Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	104
Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	106
Layanan JDIH	108
Layanan Perizinan	111
Layanan Kesehatan	113
Layanan Kependudukan	114
Katalog Layanan	124
Analisis Diagram Layanan	131
Arsitektur Aplikasi Eksisting	133
Katalog Aplikasi Eksisting	133
Analisis Diagram Aplikasi Eksisting	143
Diagram Integrasi Antar Aplikasi	145
Arsitektur Infrastruktur	149
Infrastruktur SPBE	149
Colocation Server	149
Server aplikasi ditempatkan (co-location) di salah satu perusahaan penyedia layanan colocation server (provider) yang berlokasi di Jakarta.	149
Teknologi	149
Jaringan Intra Daerah	153
Jaringan Data Lokal (LAN) Diskominfo	153
Jaringan Internet	153
Jaringan Nirkabel (WiFi)	153
Perangkat Jaringan	153
Sistem Penghubung Layanan Daerah	154
Arsitektur Keamanan	154
<b>Bab IV</b>	
<b>Analisa Kesenjangan SPBE</b>	<b>155</b>
Analisa Kesenjangan SPBE	156
<b>Bab V</b>	
<b>Penutup</b>	<b>159</b>

# Bab I

# Pendahuluan

## 1.1. Latar Belakang

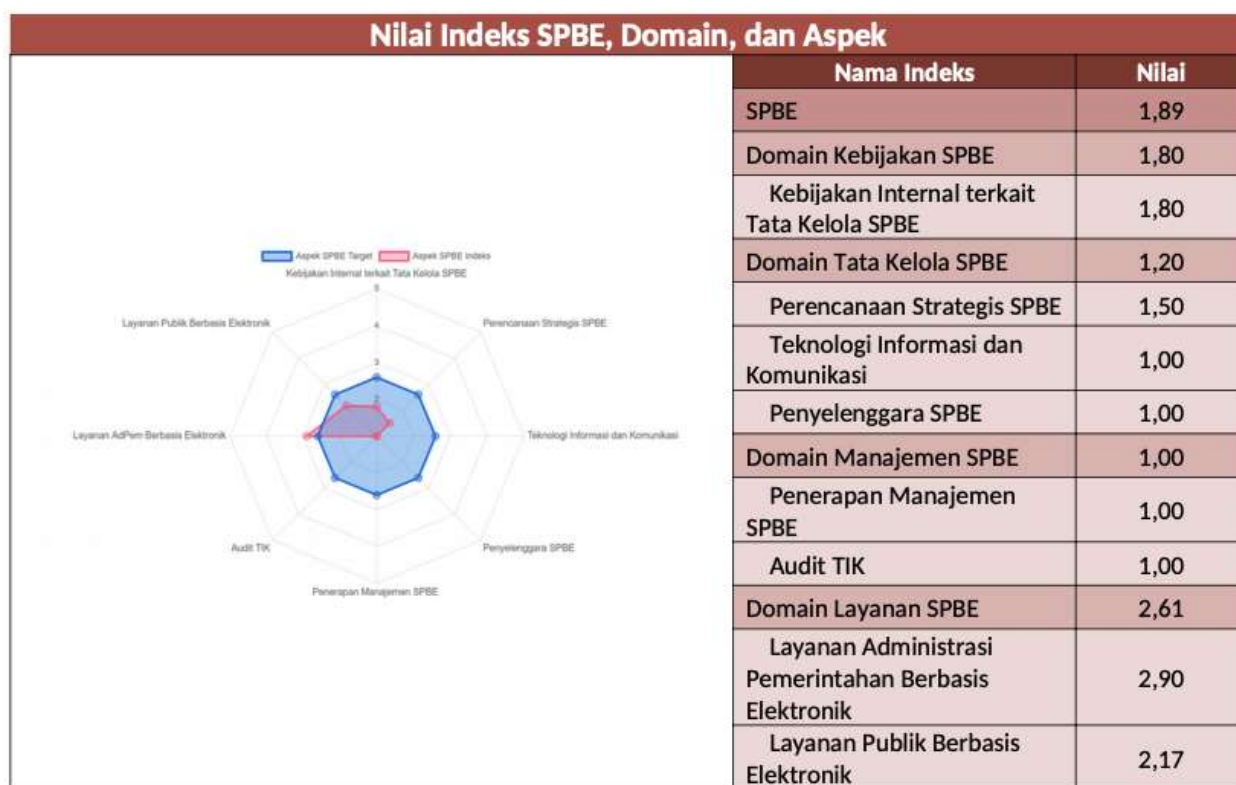
Pandemi Covid-19 telah menunjukkan keberadaan dan fungsi infrastruktur digital yang sangat esensial dan strategis. Menyadari hal itu, pemerintah mengalokasikan belanja untuk kebutuhan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebesar 30,5 triliun rupiah pada APBN Tahun Anggaran (TA) 2021. Jumlah tersebut digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemberian pelayanan (*service delivery*). Pemerintah mencoba mengoptimalkan belanja tersebut agar dapat mencapai target Pembangunan Nasional dengan *better spending* yaitu penghematan belanja infrastruktur TIK dan Aplikasi Umum yang digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).

Pada tahun 2021, pelaksanaan Evaluasi SPBE telah dilaksanakan oleh evaluator eksternal Kemenpan-RB dengan menggunakan instrumen yang telah ditetapkan sebanyak 47 indikator. Instrumen ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Penyesuaian atas instrumen dilakukan untuk memastikan peningkatan kualitas SPBE dapat tercapai sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Sejalan dengan hal tersebut Kabupaten Tapin juga telah melakukan evaluasi SPBE secara eksternal dengan hasil sebagai berikut ini.

### INDEKS SPBE – PEMERINTAH KAB. TAPIN

**1,89**

(Cukup)



**Gambar 1.1.1** Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Kab. Tapin Tahun 2021

Hasil pelaksanaan Evaluasi SPBE yang dilakukan pada tahun 2021 di Pemerintah Kabupaten Tapin ini akan menjadi baseline dalam penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana

SPBE. Dokumen ini disusun menentukan strategi yang harus dilakukan dalam mendorong peningkatan penerapan SPBE secara menyeluruh di Pemerintah Kabupaten Tapin khususnya di masa mendatang serta dalam rangka meningkatkan kualitas layanan internal dan publik dan terwujudnya digitalisasi pemerintah dalam kerangka reformasi birokrasi nasional.

Urgensi dalam mengimplementasikan SPBE dengan baik tentunya sejalan dengan RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 dimana visi yang merupakan gambaran kondisi atau keadaan Kabupaten Tapin yang akan diwujudkan lima tahun kedepan adalah sebagai berikut:

***“Bersama Mewujudkan Tapin Maju Sejahtera dan Agamis”***

Berdasarkan dengan visi tersebut, maka perlu adanya peningkatan pelayanan internal pemerintah dan pelayanan publik dalam rangka untuk meningkatkan daya saing daerah dan kesejahteraan masyarakat. Saat ini Revolusi Industri 4.0 sebagai perkembangan peradaban modern telah kita rasakan dampaknya pada berbagai sendi kehidupan, penetrasi teknologi yang serba disruptif, menjadikan perubahan semakin cepat, sebagai konsekuensi dari fenomena Internet untuk segalanya *Internet of Things* (IoT). Adanya pemanfaatan IoT ini menghasilkan kumpulan himpunan data dalam jumlah yang sangat besar dan kompleks sehingga menjadikannya sulit untuk ditangani atau diproses jika hanya menggunakan manajemen basis data *basic*. Atas dasar ini maka pelayanan pemerintahan perlu didukung dengan teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat pengelolaan data dan aplikasi (*Cloud Computing*), hingga kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*).

Selain itu, Perubahan pada lanskap ekonomi politik dan relasi organisasi sebagai konsekuensi Revolusi Industri 4.0 menjadikan transformasi organisasi pemerintah sebagai suatu keniscayaan dalam berbagai skala ruang lingkup, dan kompleksitasnya. Transformasi organisasi pemerintah ini menjadi kata kunci yang harus terus diupayakan sebagai instrumen bagi aparat pemerintah agar responsif terhadap perubahan. Perubahannya ini dapat diimplementasikan pada reformasi di kegiatan pemerintahan. Di satu sisi dalam mewujudkan reformasi organisasi pemerintah, perlu didukung dengan komitmen dan perencanaan di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Salah satu upaya guna mewujudkan tujuan dari Reformasi Birokrasi adalah dengan memodernisasi birokrasi pemerintahan yang memfokuskan pada orientasi pelayanan publik kepada kepuasan masyarakat melalui optimalisasi pemanfaatan TIK. Saat ini pemanfaatan TIK di sektor pemerintahan (*Smart Government*) atau yang saat ini lebih dikenal dengan istilah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dimanfaatkan untuk mendukung fungsi dan layanan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin. Aktivitas pemerintahan ini sudah sejak lama dilakukan dengan intensitas yang semakin meningkat. Baik Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai *“Leading Sector”* di bidang pengembangan dan pengelolaan TIK maupun SKPD-SKPD lain saat ini menggunakan berbagai sistem informasi yang mana pertumbuhannya terus meningkat. Ketidakteraturan dalam proses pengembangan aplikasi SPBE yang digunakan menjadi permasalahan tersendiri dalam melakukan proses pemeliharaan. Hal ini dikarenakan belum tersedianya kebijakan, panduan dan standar yang jelas

terkait dengan implementasi *Smart Government* sehingga membuat proses pengelolaan tidak berjalan dengan efektif.



**Gambar 1.1.2.** Kondisi Anggaran TIK Pemerintah (Sumber: Paparan Kemenkeu)

Faktanya, kini masyarakat menuntut pelayanan publik yang transparan, birokrasi yang cepat dan efektif sehingga Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi tuntutan yang harus diterapkan dengan serius. Pelayanan yang dikenal dengan sebutan SPBE diharapkan mampu mendongkrak kualitas Pemerintah Kabupaten Tapin kepada masyarakat karena dapat menghemat waktu layanan, percepatan proses, menyederhanakan alur birokrasi, serta adanya transparansi terhadap proses, biaya, maupun waktu pelayanan.



**Gambar 1.1.3.** Kebijakan Pengembangan SPBE



Untuk memastikan SPBE baik yang akan dibangun maupun yang sudah ada benar-benar mendukung proses bisnis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin berjalan dengan baik maka diperlukan suatu kajian terkait Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin.

Diharapkan permasalahan-permasalahan yang ada saat ini terkait dengan proses pembangunan dan pemeliharaan layanan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin dapat terselesaikan dan mampu diimplementasikan dengan baik menyesuaikan proses bisnis yang ada di Pemerintah Kabupaten Tapin. Dalam rangka membangun panduan yang dimaksud, maka Pemerintah Kabupaten Tapin menyusun Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Daerah. Harapan yang ingin dicapai di masa mendatang dengan adanya kajian ini maka pengembangan SPBE dapat dilaksanakan dengan lebih sistematis dan terpadu. Keterpaduan ini ditujukan untuk memanfaatkan sumber daya SPBE secara optimal dan mencegah timbulnya duplikasi inisiatif dan anggaran dalam pelaksanaan SPBE.

## 1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Daerah di Kabupaten Tapin 2022-2026 ini adalah:

1. Penyusunan panduan bagi Pemerintah Kabupaten Tapin dalam mengimplementasikan SPBE di Kabupaten Tapin.
2. Penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Kab. Tapin agar implementasi SPBE di Kabupaten Tapin menjadi lebih terarah dan komprehensif.
3. Terciptanya perencanaan dan implementasi SPBE di Kabupaten Tapin yang terintegrasi antar pemangku kepentingan.

Sementara tujuan dari penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Daerah di Kabupaten Tapin 2022-2026 ini adalah sebagai berikut :

1. Menyusun kerangka kerja (*framework*) tata kelola pemerintahan dan pelayanan masyarakat berbasis sistem elektronik yang efektif dan efisien;
2. Memberikan arahan strategis pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Kabupaten Tapin agar dapat terlaksana secara efektif dan efisien;
3. Menyusun dokumen Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Kabupaten Tapin 2022-2026 untuk peningkatan indeks SPBE di Kabupaten Tapin.

## 1.3. Landasan Hukum

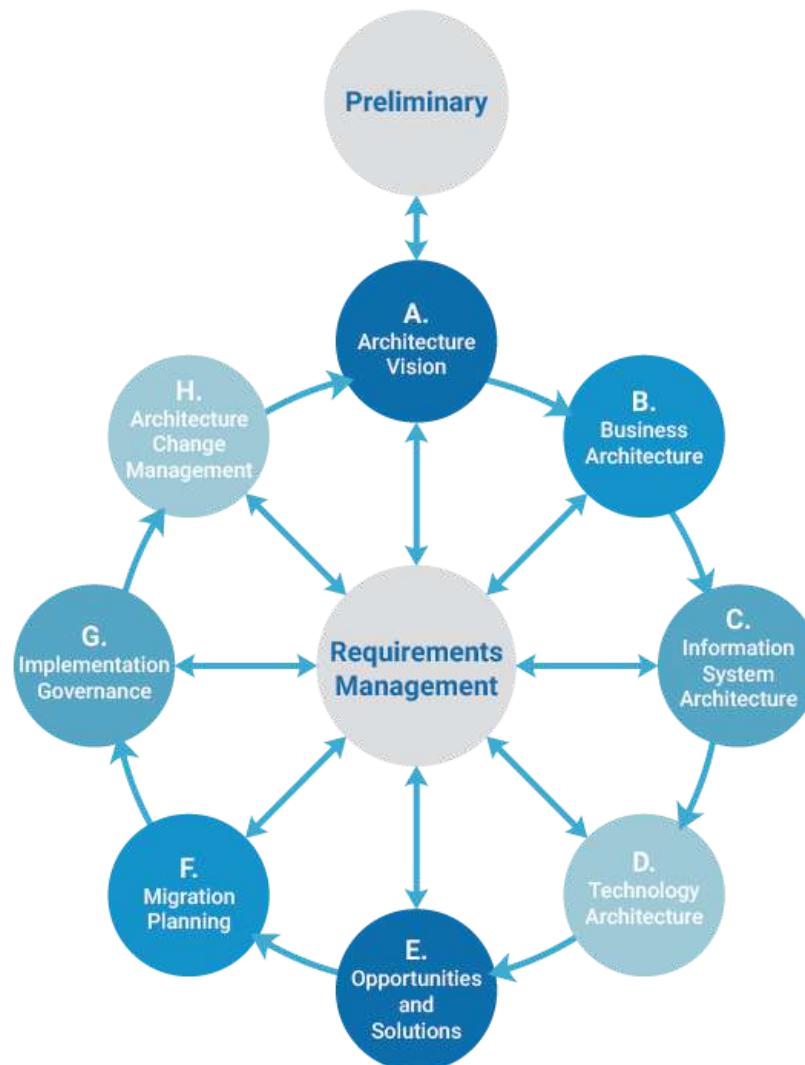
Landasan hukum dalam pekerjaan penyusunan Dokumen Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Daerah di Kabupaten Tapin ini adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
7. Peraturan PermenpanRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika.
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
11. Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*.
12. Instruksi Presiden RI Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia;
13. Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informasi Nomor 57/kep/M.Kominfo/12/2003 tentang Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan *e-Government* Lembaga;
14. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2020 tentang Perubahan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;

## 1.4. Landasan Teori

1. TOGAF 9.1 Framework untuk Arsitektur Data, Infrastruktur, Aplikasi dan Keamanan TIK



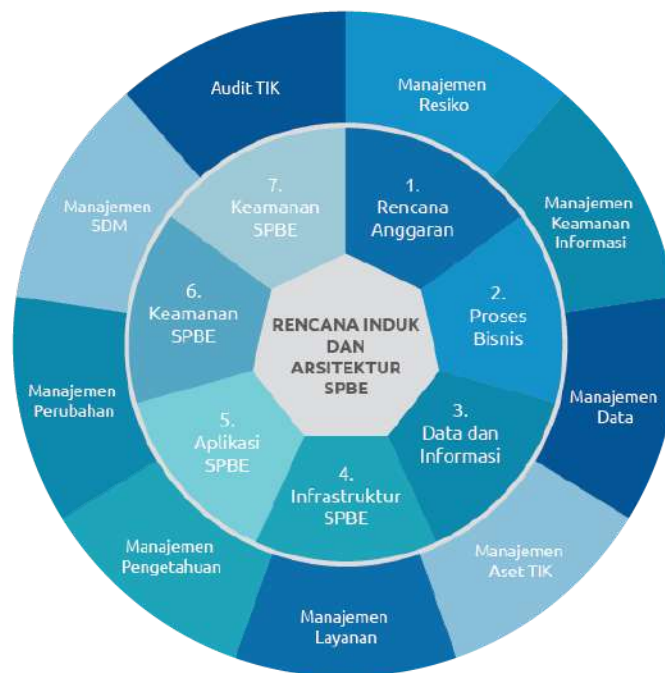
**Gambar 1.4.1** Tata Kelola (TOGAF)

Penyusunan arsitektur teknologi informasi dan komunikasi mengadopsi dari konsep Arsitektur Pengembangan IT (*Architecture Development Method*) yang ada dalam framework TOGAF 9.1 konsep ini mendefinisikan arsitektur dimulai dengan mendefinisikan visi arsitektur dilanjutkan dengan menentukan arsitektur bisnis, arsitektur sistem dan data, arsitektur teknologi (infrastruktur TIK). Visi arsitektur yang dibangun harus mampu memenuhi tujuan dari perkembangan teknologi/kebijakan yang ingin diadopsi oleh pemerintah daerah di masa mendatang dan mempertimbangkan evaluasi atas arsitektur TIK yang telah dibangun sebelumnya.

2. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Merujuk kepada Perpres 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan

teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Dalam perencanaan pembangunan dan pengembangan aplikasi harus didasarkan pada arsitektur SPBE pemerintah daerah agar SPBE menjadi terpadu dan diharapkan akan menciptakan proses bisnis pemerintahan yang terintegrasi antara instansi pusat dan pemerintah daerah sehingga akan membentuk satu-kesatuan pemerintahan yang utuh dan menyeluruh serta menghasilkan birokrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi.

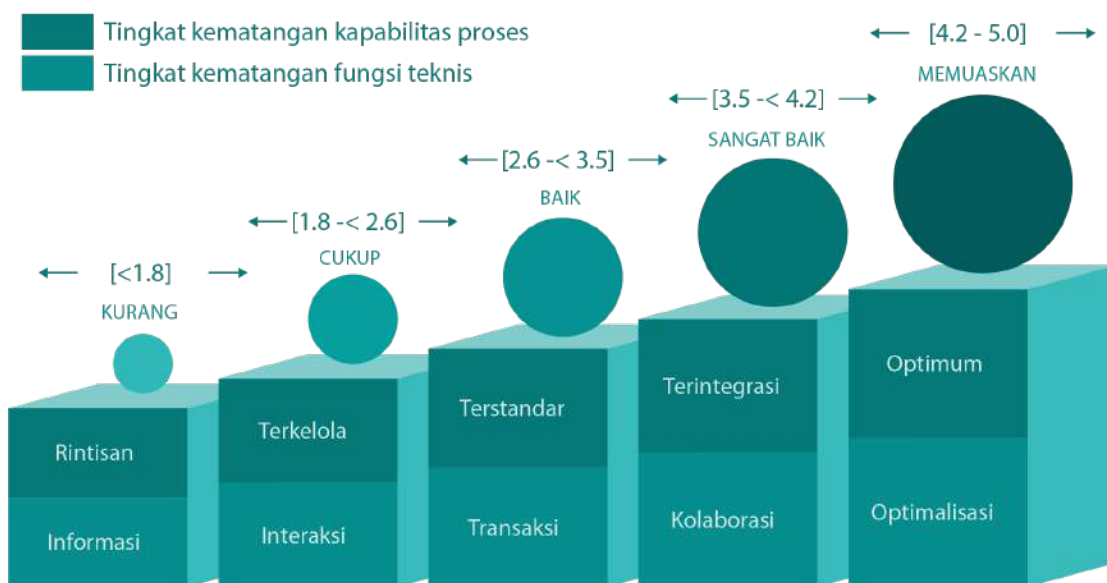


**Gambar 1.4.2** Ruang Lingkup Arsitektur SPBE Nasional

Untuk mengimplementasikan Arsitektur SPBE Nasional, Pemerintah Daerah perlu melakukan transformasi paradigma dan proses dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik berbasis elektronik, dukungan TIK, dan SDM. Terdapat 3 tahapan penting dalam kesuksesan SPBE:

1. Perencanaan: Arsitektur dan Peta Rencana SPBE, Kerangka Acuan Kerja (KAK), Kontrak.
2. Pelaksanaan: Manajemen Proyek/Kegiatan, Manajemen Rekanan, dan Tim Pelaksana (jumlah & kompetensi).
3. Evaluasi: Monitoring dan evaluasi setiap tahun untuk mengetahui capaian progress penerapan Arsitektur SPBE khususnya Roadmap, Kondisi permasalahan eksisting SPBE, Inisiatif perbaikan program.

Untuk mengetahui kondisi penerapan SPBE di Pemerintah Kabupaten Tapin saat ini, dapat menggunakan konsep tingkat kematangan SPBE yang merupakan kerangka kerja yang mengukur derajat pengembangan SPBE. Tingkatan kematangan mengarahkan pengembangan SPBE pada keluaran dan dampak yang lebih baik. Tingkat kematangan yang rendah menunjukkan kapabilitas dan keberhasilan yang rendah, sedangkan tingkat kematangan yang tinggi menunjukkan kapabilitas dan keberhasilan yang lebih tinggi.



**Gambar 1.4.3** Tingkat Kematangan Proses SPBE

**Tabel 1.4.1** Tingkat Kematangan pada Domain Tata Kelola SPBE dan Kebijakan Internal SPBE

Tingkat (Level)	Karakteristik
1 - Rintisan	Proses tata kelola dilaksanakan sewaktu-waktu, tidak terorganisasi dengan baik, tanpa pemantauan, dan hasil tidak terprediksi. Kebijakan internal belum tersedia atau masih berbentuk konsep.
2 - Terkelola	Proses tata kelola dilaksanakan dengan dasar-dasar manajemen yang telah didefinisikan dan didokumentasikan, dilaksanakan berdasarkan standar masing-masing unit organisasi. Kebijakan internal telah dilegalisasi, namun pengaturannya bersifat parsial atau sektoral.
3 - Terstandarisasi	Proses tata kelola dilaksanakan sepenuhnya dengan standarisasi oleh semua unit organisasi terkait. Kebijakan internal telah mengatur standar proses tata kelola bagi semua unit organisasi terkait, tetapi belum mengatur keselarasan antar proses tata kelola.
4 - Terintegrasi	Proses tata kelola dilaksanakan terintegrasi dengan proses tata kelola lain dan terukur kinerjanya secara Kuantitatif. Kebijakan internal telah mengatur integrasi antar proses tata kelola dan mekanisme pengukuran kinerja proses tata kelola tersebut.
5 - Optimum	Proses tata kelola dilaksanakan dengan peningkatan kualitas secara berkesinambungan. Kebijakan internal telah mengatur mekanisme evaluasi berkelanjutan dan manajemen perubahan.

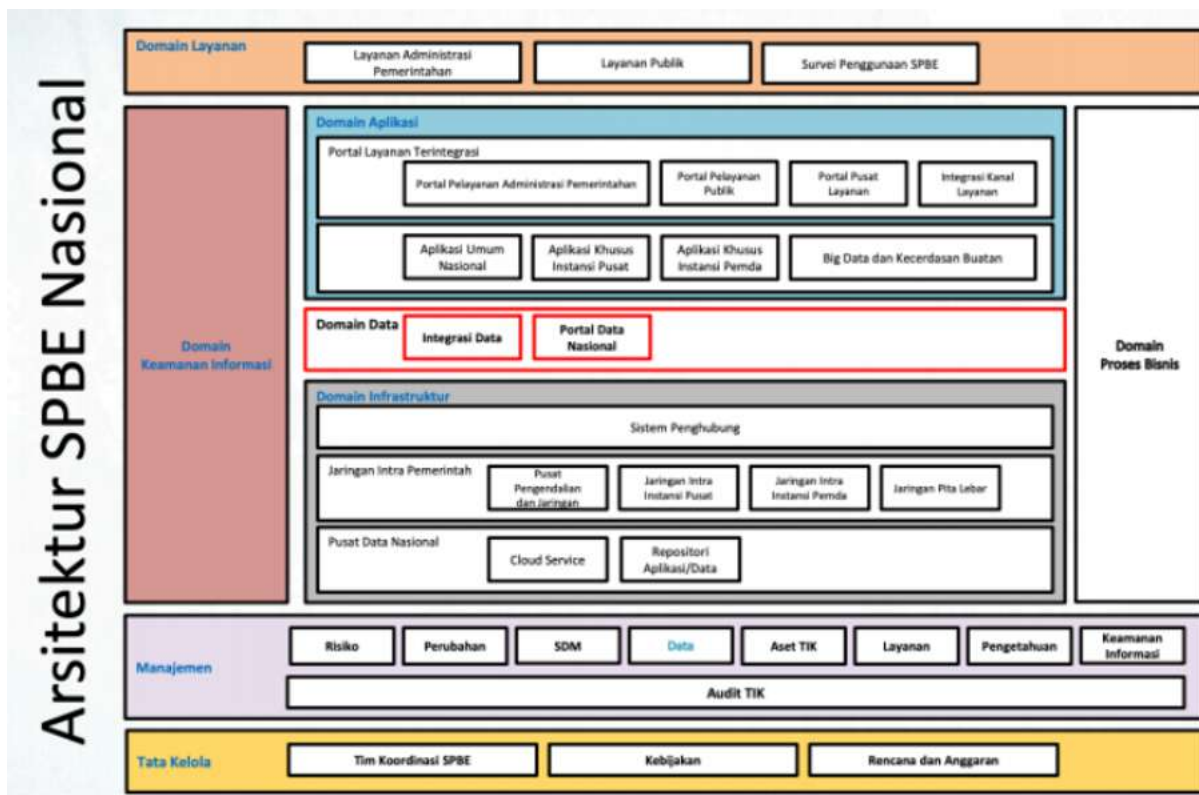
**Tabel 1.4.2** Tingkat Kematangan pada Domain Layanan SPBE

Tingkat (Level)	Kriteria
1 - Informasi	Layanan SPBE diberikan dalam bentuk informasi satu arah.
2 - Interaksi	Layanan SPBE diberikan dalam bentuk interaksi dua arah.

3 - Transaksi	Layanan SPBE diberikan melalui pertukaran informasi dan layanan.
4 - Kolaborasi	Layanan SPBE diberikan melalui integrasi dengan layanan SPBE lain.
5 - Optimalisasi	Layanan SPBE dapat beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal

### 3. Arsitektur dan Peta Rencana SPBE

Dalam Perpres 95/2018 telah dijelaskan mengenai Arsitektur SPBE Nasional sebagai pedoman dalam menyusun Arsitektur SPBE Daerah. Keberhasilan penerapan SPBE Daerah dalam penyelenggaraan alur hidup pemerintahan perlu didukung oleh arsitektur yang terperinci sehingga dapat menjadi acuan pengembangan SPBE dalam institusi. Gambaran arsitektur SPBE dapat dilihat pada gambar berikut ini.



**Gambar 1.4.4** Domain Arsitektur SPBE

Dari gambar diatas dapat disimpulkan bahwa Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi antara Proses bisnis, Data dan informasi, Aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi. Pengembangan dari keenam arsitektur tersebut didukung oleh Manajemen yang dilaksanakan dengan baik dan Tata kelola yang disusun secara rinci dan terarah.

Setiap layer arsitektur yang disebutkan dalam kerangka SPBE memiliki detail masing-masing yang kemudian saling terkait dan dapat mendorong keberhasilan domain-domain lainnya. Dalam proses penyusunan dokumen arsitektur SPBE, langkah awal yang harus disusun terlebih dahulu adalah bidang Tata Kelola. Tata Kelola adalah rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang mempengaruhi pengarahannya, pengelolaan, serta pengontrolan kegiatan

dalam institusi. Tata kelola juga mencakup hubungan antara para pemangku kepentingan yang terlibat serta tujuan pengelolaan dari institusi. Dalam hal ini, pengembangan arsitektur SPBE bidang Tata Kelola dimulai dengan membentuk Tim Koordinasi, menentukan Kebijakan, dan menyusun Rencana dan Anggaran.

Langkah kedua dalam membangun arsitektur SPBE adalah dengan menentukan bentuk-bentuk Manajemen yang akan dilakukan dalam proses pengembangan SPBE di Institusi. Manajemen adalah sebuah cara untuk mengarahkan Tim Koordinasi SPBE untuk mencapai tujuan utama melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan, dan pengawasan sumber daya dengan cara yang efektif dan efisien. Hal-hal yang harus ditentukan dalam proses penentuan manajemen adalah

- Manajemen Resiko
- Manajemen Keamanan Informasi
- Manajemen SDM
- Manajemen Pengetahuan
- Manajemen Data
- Manajemen Layanan
- Manajemen Aset TIK
- Manajemen Perubahan

Selanjutnya manajemen yang dilakukan mencakup hal-hal dalam mendukung pengembangan arsitektur lainnya. Arsitektur yang akan dikelola pertama adalah arsitektur proses bisnis, disini proses bisnis dikelola sedemikian rupa sehingga dapat memberikan alur organisasi internal dan pelayanan paling efektif dan efisien. Dari arsitektur proses bisnis selanjutnya dapat menjadi acuan dalam pembangunan aplikasi pada domain aplikasi. Dalam hal ini, aplikasi dapat berupa portal yang mendukung layanan dan telah terintegrasi dengan berbagai aplikasi lain. Adapun beberapa portal layanan yang dapat dibangun antara lain:

- Portal layanan administrasi pemerintah
- Portal layanan publik
- Portal pusat layanan
- Integrasi kanal layanan

Aplikasi juga dapat dibagi berdasarkan penggunaannya, yaitu aplikasi yang bersifat khusus dan bersifat umum. Adapun berdasarkan penggunaannya dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- Aplikasi umum nasional
- Aplikasi khusus instansi pusat
- Aplikasi khusus instansi pemda
- Big data dan kecerdasan buatan

Pembangunan aplikasi tentunya mengacu pada data yang dikelola oleh instansi, dalam arsitektur data memungkinkan adanya integrasi data dan portal data nasional.

Arsitektur lain yang dikembangkan dalam proses pembangunan SPBE adalah arsitektur infrastruktur, arsitektur ini dikembangkan sebagai bentuk penanganan alat yang digunakan dalam pelayanan yang ada. Dalam arsitektur infrastruktur dibagi menjadi 2 jenis yaitu

infrastruktur Jaringan dan infrastruktur pusat data daerah. Infrastruktur jaringan adalah hal-hal mengenai pengelolaan koneksi yang ada pada instansi. Termasuk didalamnya ada diantaranya pusat pengendalian dan jaringan, jaringan intra instansi pusat, jaringan intra instansi pemda, dan jaringan pita lebar. Selanjutnya untuk pusat data nasional didalamnya ada cloud services dan repositori aplikasi / data.

Arsitektur terakhir yang digunakan dalam peningkatan layanan instansi adalah arsitektur keamanan informasi, dimana aspek keamanan informasi adalah aspek-aspek yang dilingkupi dan melingkupi keamanan informasi dalam sebuah sistem informasi. Aspek-aspek ini adalah: privasi/kerahasiaan, menjaga kerahasiaan informasi dari semua pihak, kecuali yang memiliki kewenangan.

Kelima arsitektur yang telah disebutkan (arsitektur proses bisnis, arsitektur aplikasi, arsitektur data, arsitektur infrastruktur, dan arsitektur keamanan informasi) adalah domain yang dikelola untuk meningkatkan layanan yang dimiliki oleh instansi. Pengembangan domain layanan tentunya mengedepankan aspek kemudahan bagi pengguna layanan tersebut. Adapun klasifikasi layanan yang diberikan oleh instansi pusat adalah layanan administrasi pemerintahan, layanan publik, dan survey penggunaan aplikasi SPBE.

Dalam Arsitektur SPBE Nasional terdapat enam komponen berupa taksonomi referensi arsitektur di tingkat nasional yang menjadi acuan oleh setiap Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah (IPPD), dalam setiap domain arsitektur SPBE Nasional, sesuai dengan struktur yang telah ditentukan.

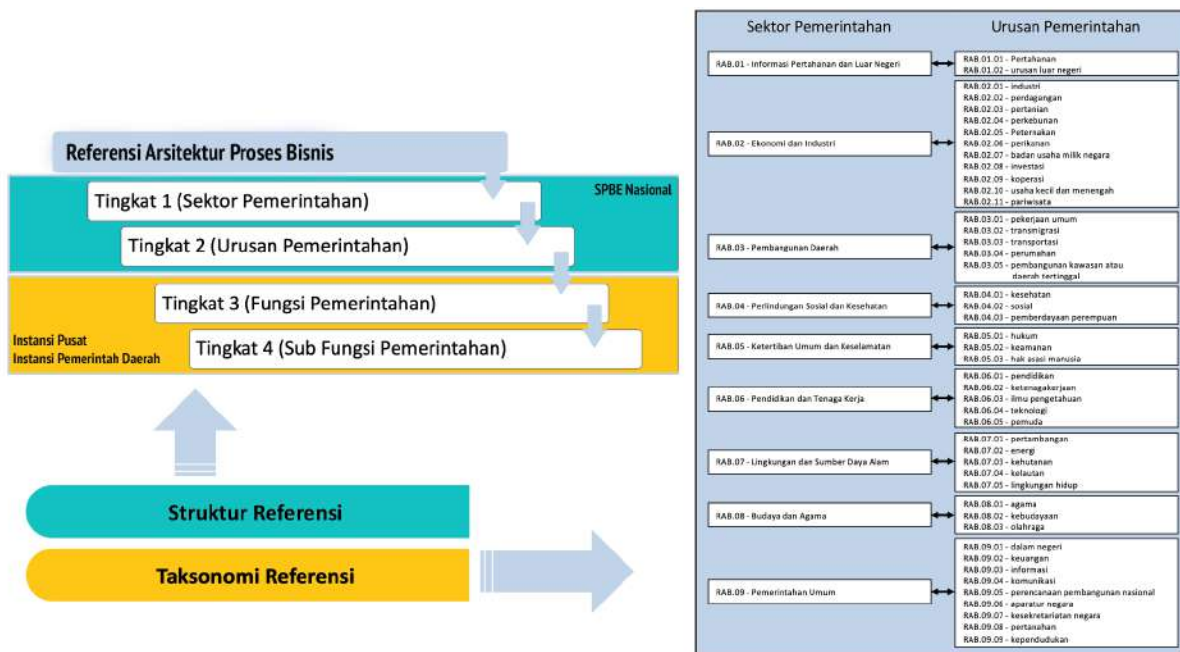
#### **A. Struktur Referensi Arsitektur Proses Bisnis (RAB)**

Dalam domain arsitektur proses bisnis pemerintahan yang diemban oleh instansi pemerintah, selanjutnya diklasifikasikan substansi proses bisnis pemerintahan ke dalam tingkatan struktur domain arsitektur proses bisnis berupa 4 (empat) tingkat, yaitu:

- a. Sektor pemerintahan, yang mengelompokkan substansi proses bisnis pemerintahan ke dalam sektor pemerintahan sebagai tingkat 1 (pertama), yang menjadi struktur di tingkat nasional;
- b. Urusan pemerintahan, yang menjelaskan turunan dari sektor pemerintahan yang diemban oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai yang diamanatkan oleh UU, dikelompokkan ke dalam urusan pemerintahan sebagai tingkat 2 (kedua), yang menjadi struktur di tingkat nasional;
- c. Fungsi pemerintahan, yang menjelaskan lebih rinci dari urusan pemerintahan di tingkat nasional sebagai tingkat 3 (ketiga), yang selanjutnya IPPD mendefinisikan sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki dengan merelasikan ke tingkat nasional;
- d. Sub fungsi pemerintahan yang menjelaskan lebih rinci dari fungsi pemerintahan sebagai tingkat 4 (empat). IPPD dapat menyusun pada struktur ini sesuai dengan kebutuhan dalam mendefinisikan data dan informasi yang dihasilkan dan layanan terintegrasi yang akan dibangun sebagai bagian dari layanan digital nasional.



Adapun gambaran mengenai referensi arsitektur proses bisnis dijelaskan pada gambar berikut ini.



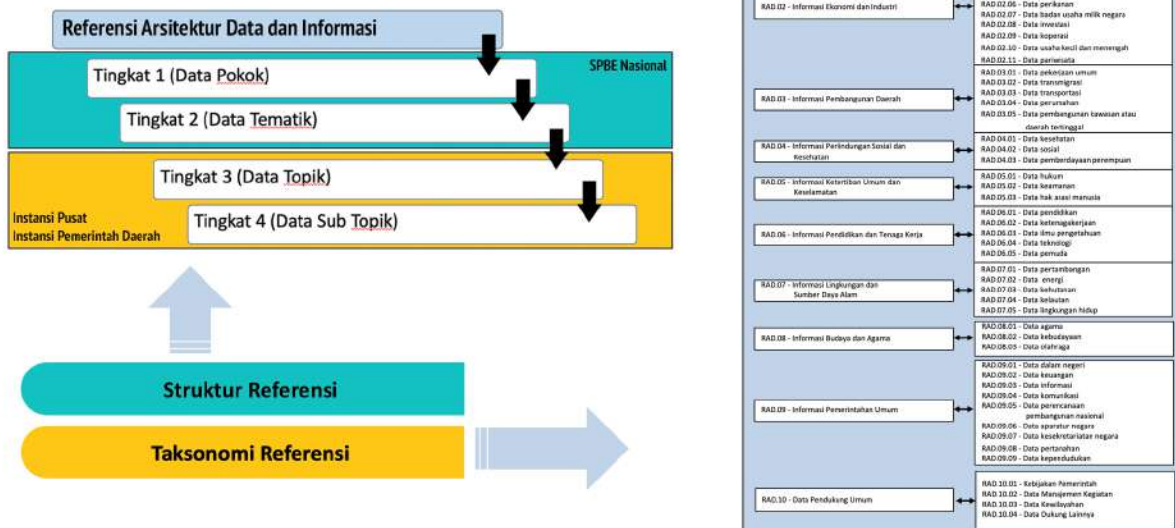
**Gambar 1.4.5** Taksonomi Referensi Arsitektur Proses Bisnis (RAB)

## B. Struktur Referensi Arsitektur Data (RAD)

Dalam domain arsitektur data dan informasi yang dihasilkan dari berbagai aktivitas dalam proses bisnis pemerintahan, selanjutnya diklasifikasikan substansi data dan informasi kedalam tingkatan struktur domain arsitektur data dan informasi berupa 4 (empat) tingkat, yaitu:

- Data pokok, yang mengelompokkan data ke dalam data yang dihasilkan pada sektor pemerintahan dan data pendukung umum sebagai tingkat 1 (pertama), yang menjadi struktur di tingkat nasional;
- Data tematik, yang menjelaskan urusan pemerintahan yang diemban oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai yang diamanatkan oleh UU, dikelompokkan ke dalam data tematik urusan pemerintahan dan uraian data pendukung umum sebagai tingkat 2 (kedua), yang menjadi struktur di tingkat nasional;
- Data topik, yang menjelaskan lebih rinci dari data tematik di tingkat nasional sebagai tingkat 3 (ketiga), yang selanjutnya IPPD mendefinisikan data dan informasi yang dihasilkan sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki dengan merelasikan ke tingkat nasional;
- Data sub topik, yang menjelaskan lebih rinci dari data topik sebagai tingkat 4 (empat). IPPD dapat menyusun pada struktur ini sesuai dengan data dan informasi yang dibutuhkan dalam membangun layanan terintegrasi sebagai bagian dari layanan digital nasional, serta kebutuhan operasional aplikasi.

Adapun gambaran mengenai referensi arsitektur data dijelaskan pada gambar berikut ini.



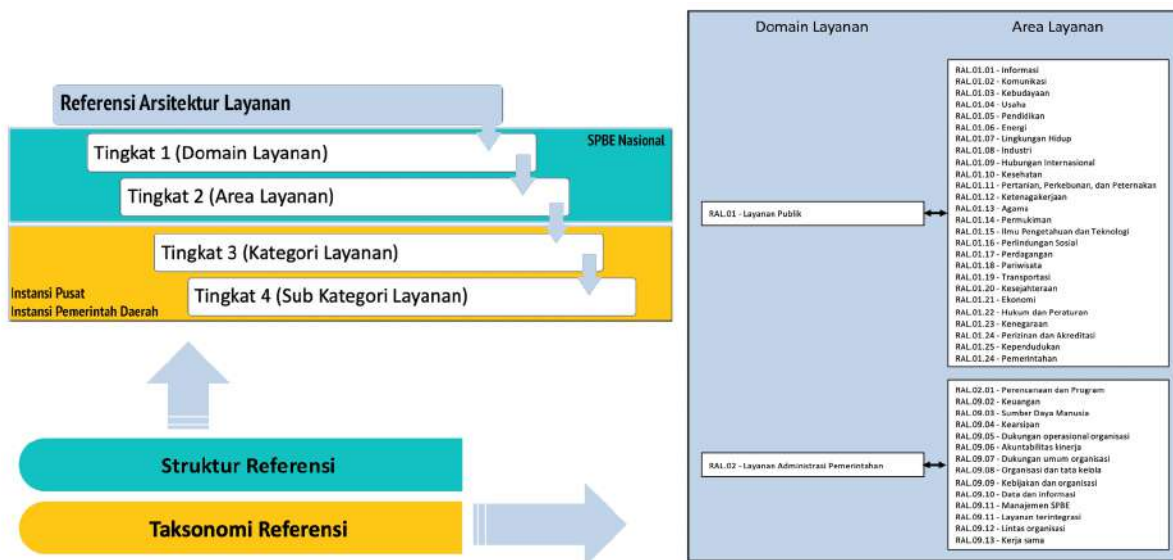
**Gambar 1.4.6** Taksonomi Referensi Arsitektur Data (RAD)

### C. Struktur Referensi Arsitektur Proses Layanan (RAL)

Dalam domain arsitektur layanan SPBE yang akan mendukung arah kebijakan nasional, selanjutnya diklasifikasikan substansi layanan SPBE ke dalam tingkatan struktur domain arsitektur layanan SPBE berupa 4 (empat) tingkat, yaitu:

- Domain layanan, yang mengelompokkan layanan pemerintahan ke dalam domain layanan pemerintahan sebagai tingkat 1 (pertama), yang menjadi struktur di tingkat nasional;
- Area layanan, yang menjelaskan area layanan pemerintah sesuai dengan target layanan, dikelompokkan ke dalam area layanan sebagai tingkat 2 (kedua), yang menjadi struktur di tingkat nasional;
- Kategori layanan, yang menjelaskan layanan pemerintah yang merupakan layanan spesifik yang hanya dimiliki oleh IPPD sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki, dengan merelasikan kepada area layanan di tingkat nasional, sebagai tingkat 3 (ketiga);
- Sub kategori layanan, yang menjelaskan lebih rinci dari kategori layanan sebagai tingkat 4 (empat). IPPD dapat menyusun pada struktur ini sesuai dengan kebutuhan dalam mendukung pembangunan layanan terintegrasi secara nasional nasional.

Adapun gambaran mengenai referensi arsitektur layanan dijelaskan pada gambar berikut ini.



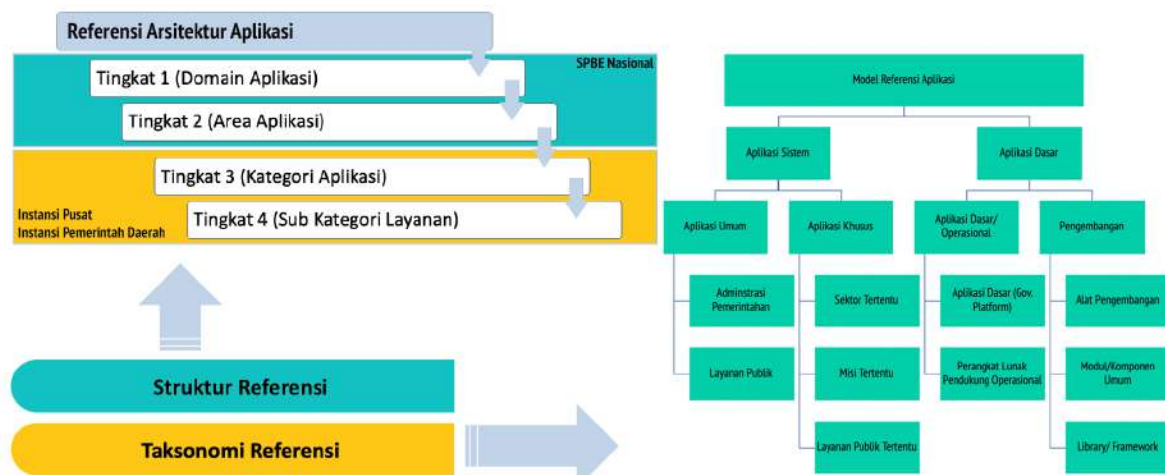
**Gambar 1.4.7** Taksonomi Referensi Arsitektur Layanan (RAL)

#### D. Struktur Referensi Arsitektur Aplikasi (RAA)

Dalam domain arsitektur aplikasi SPBE yang akan mendukung arah kebijakan nasional, selanjutnya diklasifikasikan substansi aplikasi SPBE ke dalam tingkatan struktur domain arsitektur aplikasi SPBE berupa 4 (empat) tingkat, yaitu:

- Domain aplikasi, yang mengelompokkan aplikasi pemerintah ke dalam 2 (dua) domain aplikasi pemerintah, sebagai tingkat 1 (pertama), yang menjadi struktur di tingkat nasional;
- Area aplikasi, yang menjelaskan area aplikasi pemerintah sesuai dengan target layanan, sebagai tingkat 2 (kedua), yang menjadi struktur di tingkat nasional;
- Kategori aplikasi, yang menjelaskan aplikasi pemerintah sesuai dengan target layanan spesifik yang hanya dimiliki oleh IPPD sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan, dengan merelasikan kepada area layanan di tingkat nasional, sebagai tingkat 3 (ketiga);
- Sub kategori aplikasi, yang menjelaskan lebih rinci dari kategori aplikasi sebagai tingkat 4 (empat). IPPD dapat menyusun pada struktur ini sesuai dengan kebutuhan dalam mendukung pembangunan layanan terintegrasi secara nasional.

Adapun gambaran mengenai referensi arsitektur aplikasi dijelaskan pada gambar berikut ini.



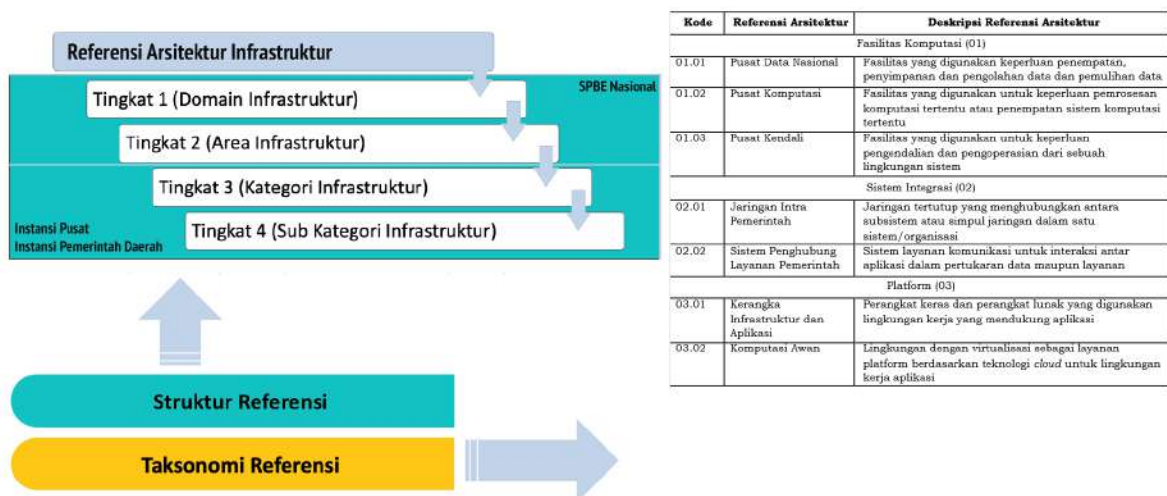
**Gambar 1.4.8** Taksonomi Referensi Arsitektur Aplikasi (RAA)

## E. Struktur Referensi Arsitektur Infrastruktur (RAI)

Dalam domain arsitektur infrastruktur SPBE yang akan mendukung arah kebijakan nasional, selanjutnya substansi infrastruktur SPBE diklasifikasikan ke dalam tingkatan struktur domain arsitektur infrastruktur SPBE berupa 3 (tiga) tingkat, yaitu:

- Domain infrastruktur, yang mengelompokkan infrastruktur ke dalam domain infrastruktur sebagai tingkat 1 (pertama), yang menjadi struktur di tingkat nasional;
- Area infrastruktur, yang menjelaskan area infrastruktur sesuai dengan domain infrastruktur dalam mendukung pengelolaan aplikasi serta data dan informasi, dikelompokkan ke dalam area infrastruktur sebagai tingkat 2 (kedua), yang menjadi struktur di tingkat nasional;
- Kategori infrastruktur, yang menjelaskan lebih rinci dari area infrastruktur, sebagai tingkat 3 (ketiga), yang menjadi struktur di tingkat nasional.

Adapun gambaran mengenai referensi arsitektur infrastruktur dijelaskan pada gambar berikut ini.



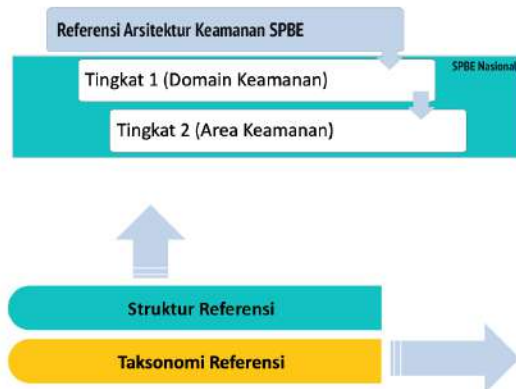
**Gambar 1.4.9** Taksonomi Referensi Arsitektur Infrastruktur (RAI)

## F. Struktur Referensi Arsitektur Keamanan Informasi

Dalam domain arsitektur keamanan SPBE yang akan mendukung arah kebijakan nasional, selanjutnya substansi keamanan SPBE diklasifikasikan ke dalam tingkatan struktur domain arsitektur keamanan SPBE berupa 2 (dua) tingkat, yaitu:

- Domain keamanan, yang mengelompokkan keamanan SPBE ke dalam domain keamanan terdiri dari standar keamanan, penerapan keamanan dan pertimbangan kelayakan keamanan, sebagai tingkat 1 (pertama), yang menjadi struktur di tingkat nasional;
- Area keamanan, yang mengelompokkan keamanan SPBE ke dalam area keamanan terhadap data dan informasi, aplikasi SPBE, serta infrastruktur SPBE sebagai tingkat 2 (kedua), yang menjadi struktur di tingkat nasional.

Adapun gambaran mengenai referensi arsitektur keamanan informasi dijelaskan pada gambar berikut ini.



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
Standar Keamanan (01)		
01.01	Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE	Standar atau Peraturan Pemerintah yang digunakan untuk penerapan Keamanan SPBE.
01.02	Standar Keamanan Internasional	Standar internasional yang digunakan sebagai pendukung dan untuk meningkatkan penerapan Keamanan SPBE.
01.03	Regulasi lainnya	Peraturan Pemerintah lainnya selain dari peraturan terkait standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE, yang saat ini menjadi acuan dalam penerapan Keamanan SPBE.
Penerapan Keamanan (02)		
02.01	kesadaran Keamanan SPBE	Bentuk kegiatan di IPPD untuk meningkatkan kesadaran keamanan SPBE.
02.02	keamanan Keamanan SPBE	Bentuk kegiatan di IPPD untuk mengidentifikasi kerentanan dan risiko keamanan SPBE.
02.03	peningkatan Keamanan SPBE	Bentuk kegiatan di IPPD untuk meningkatkan keamanan SPBE.
02.04	penanganan insiden Keamanan SPBE	Bentuk kegiatan di IPPD untuk menanggulangi, memulihkan dan memitigasi risiko insiden keamanan SPBE.
Kelelakan Keamanan (03)		
03.01	Kelelakan Keamanan Aplikasi Umum	Uji kelelakan keamanan terhadap aplikasi umum yang dilakukan melalui penilaian kerentanan secara mandiri di IPPD dan verifikasi di tingkat nasional. Output dari kegiatan ini adalah daftar aplikasi umum yang telah mendapatkan rekomendasi kelelakan keamanan.
03.02	Kelelakan Keamanan Infrastruktur SPBE Nasional	Uji kelelakan keamanan terhadap Infrastruktur SPBE nasional yang dilakukan melalui penilaian kerentanan secara mandiri di IPPD dan verifikasi di tingkat nasional. Output dari kegiatan ini adalah daftar Infrastruktur SPBE Nasional yang telah mendapatkan rekomendasi kelelakan keamanan.

**Gambar 1.4.10** Taksonomi Referensi Arsitektur Keamanan Informasi (RAK)

# **Bab II**

# **Visi, Misi Strategi**

# **SPBE**

## 2.1. Visi RPJMD

Visi SPBE Nasional adalah

*"Terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu dan menyeluruh untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi."*

Visi SPBE Nasional perlu diselaraskan, disinkronisasikan, dan diharmonisasikan dengan visi dan misi SPBE Pemerintah Kabupaten Tapin.

Visi Pemerintah Kab. Tapin

*"Bersama Mewujudkan TAPIN Maju, Sejahtera dan Agamis."*

Dengan mengacu pada dua hal pondasi strategi dalam arsitektur dan peta jalan SPBE Daerah Pemerintah Kabupaten Tapin Tahun 2018 - 2023 berfokus pada peningkatan perekonomian dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi.

Visi tersebut menjadi acuan dalam mewujudkan pelaksanaan SPBE yang terpadu di Instansi Pemerintah Daerah untuk menghasilkan birokrasi pemerintah yang integratif, dinamis, transparan, dan inovatif, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang terpadu, efektif, responsif, dan adaptif. Dalam rangka mencapai visi SPBE, maka misi SPBE adalah:

1. Melakukan penataan dan penguatan organisasi dan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu;
2. Mengembangkan pelayanan publik berbasis elektronik yang terpadu, menyeluruh, dan menjangkau masyarakat luas;
3. Membangun fondasi teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi, aman, dan andal; dan
4. Membangun SDM yang kompeten dan inovatif berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Berdasarkan visi dan misi SPBE, tujuan SPBE adalah:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
2. Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya; dan
3. Mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu.

Berdasarkan visi, misi, dan tujuan SPBE, sasaran SPBE adalah:

1. Terwujudnya tata kelola dan manajemen TIK yang efektif dan efisien;
2. Terwujudnya layanan SPBE yang terpadu dan berorientasi kepada pengguna;
3. Terselenggaranya infrastruktur SPBE yang terintegrasi; dan
4. Meningkatnya kapasitas SDM TIK.

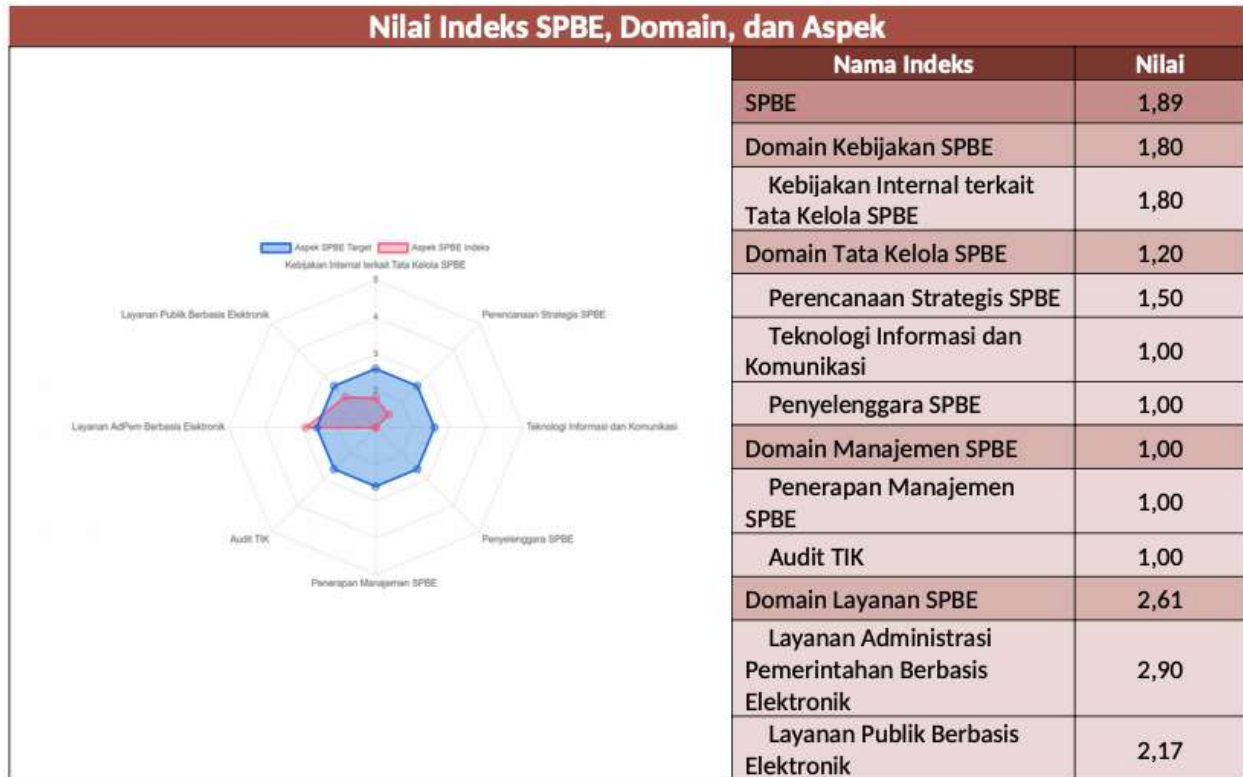


**Gambar 2.1.1** Unsur-unsur dalam SPBE

## 2.2. Strategi Peningkatan SPBE

Berdasarkan dari hasil Evaluasi Indeks SPBE Kab. Tapin tahun 2021, Strategi Peningkatan Indeks SPBE yang perlu dituju yakni dengan meningkatkan seluruh domain yang meliputi: kebijakan, tata kelola, manajemen dan layanan SPBE agar bisa mencapai target level 3 (tiga).





**Gambar 2.2.1** Indeks SPBE Kabupaten Tapin

Jika dilihat pada nilai indeks diatas dapat disimpulkan bahwa selama ini belum seluruhnya perangkat daerah di Kabupaten Tapin aktif berkolaborasi dalam implementasi SPBE. Oleh sebab itu, dalam rangka meningkatkan indeks pada seluruh domain SPBE perlu dilakukan beberapa *best practices*

**Tabel 2.2.1** Peningkatan Indeks SPBE

No	Indikator	Peluang Peningkatan Indeks SPBE	Penanggung Jawab
1	Indikator 1 sampai 10 terkait Kebijakan SPBE	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan reviu atas regulasi eksisting yang terkait SPBE, memastikan cakupannya sesuai dengan yang diamanatkan dalam pedoman evaluasi SPBE.</li> <li>Regulasi telah diterapkan oleh seluruh perangkat daerah.</li> <li>Melakukan revisi / perbaikan regulasi SPBE Daerah sesuai dengan perkembangan regulasi SPBE dari Pusat.</li> </ol>	Tim Koordinator SPBE
2	Indikator 11-13 terkait Arsitektur dan Peta Rencana SPBE, Rencana	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan reviu atas regulasi eksisting yang terkait SPBE, memastikan cakupannya sesuai dengan yang diamanatkan dalam pedoman evaluasi SPBE.</li> <li>Regulasi telah diterapkan oleh seluruh perangkat daerah.</li> </ol>	Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Indikator	Peluang Peningkatan Indeks SPBE	Penanggung Jawab
	Anggaran SPBE	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan revisi / perbaikan regulasi SPBE Daerah sesuai dengan perkembangan regulasi SPBE dari Pusat.</li> <li>Menuangkan substansi Peta Rencana SPBE ke dalam RKPD.</li> </ol>	
3	Indikator 16 terkait Layanan Pusat Data	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan migrasi seluruh aplikasi internal ke Pusat Data / Server yang terpusat milik Pemkab Tapin yang dikelola oleh Diskominfo.</li> <li>Server Pemkab Tapin terintegrasi dengan jaringan Pusat Data Nasional.</li> <li>Melakukan evaluasi atas operasional Pusat Data milik Pemkab Tapin.</li> </ol>	Dinas Komunikasi dan Informatika
4	Indikator 17 terkait Jaringan Intra Pemerintah	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mengembangkan konektivitas ke seluruh SKPD (Metro Area Network) yang terpusat di Diskominfo sebagai NOC nya.</li> <li>Memasang MRTG pada jaringan MAN Kab Tapin.</li> <li>Memastikan seluruh ruangan SKPD tercover radius Access Point.</li> <li>Melakukan evaluasi atas operasional Jaringan Intra milik Pemkab Tapin.</li> </ol>	Dinas Komunikasi dan Informatika
5	Indikator 19 terkait Tim Koordinasi SPBE	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mendefinisikan tugas dan fungsi, Program Kerja Tim Koordinasi SPBE sesuai yang tertuang dalam peta rencana.</li> <li>Melakukan pembaharuan tugas dan fungsi Program Kerja Tim Koordinasi SPBE sesuai kondisi yang akan datang.</li> </ol>	Sekretariat Daerah Bagian Organisasi
6	Indikator 20 terkait Kolaborasi Penerapan SPBE	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan kolaborasi dalam penerapan peta rencana SPBE dengan melibatkan seluruh perangkat daerah Pemkab. Tapin.</li> <li>Melakukan evaluasi atas pelaksanaan kolaborasi dalam penerapan peta rencana SPBE</li> </ol>	Sekretariat Daerah Bagian Organisasi
7	Indikator 21 - 28 terkait Manajemen SPBE	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mengkaji manajemen SPBE dan menerapkannya di lingkungan Pemkab. Tapin sesuai pedoman yang ditetapkan.</li> <li>Melakukan kegiatan manajemen SPBE secara berkelanjutan.</li> <li>Melakukan reviu dan perbaikan atas penerapan manajemen SPBE.</li> </ol>	Dinas Komunikasi dan Informatika
8	Indikator 37 terkait Layanan Kearsipan Dinamis	<ol style="list-style-type: none"> <li>Penambahan fitur grafik/chart jumlah persuratan berdasarkan jenis surat.</li> <li>Integrasi dengan Tanda Tangan Elektronik (TTE).</li> <li>Melakukan monev atas kekurangan aplikasi kearsipan dinamis.</li> </ol>	Dinas Arsip dan Perpustakaan

No	Indikator	Peluang Peningkatan Indeks SPBE	Penanggung Jawab
9	Indikator 39 terkait Layanan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penambahan fitur mekanisme penginputan bukti dukung oleh Auditee, Reviu tindak lanjut, persetujuan dan status monitoring pelaksanaan pengawasan.</li> <li>2. Penambahan fitur grafik/chart jumlah kegiatan pengawasan berdasarkan jenis.</li> <li>3. Integrasi dengan TTE.</li> <li>4. Melakukan monev atas kekurangan Aplikasi SPIP.</li> </ol>	Inspektorat
10	Indikator 40 terkait Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan reviu atas pemanfaatan e-SAKIP Reviu.</li> <li>2. Bersurat ke Kemenpan-RB terkait rekomendasi perbaikan fitur berdasarkan dari hasil reviu.</li> </ol>	Sekretariat Daerah Bagian Organisasi
11	Indikator 41 terkait Layanan Data Terbuka	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penambahan fitur upload data oleh masing-masing SKPD.</li> <li>2. Penambahan fitur mekanisme persetujuan oleh Diskominfo untuk dipublikasikan.</li> <li>3. Penambahan fitur grafik/chart jumlah berdasarkan bidang urusan pemerintahan.</li> <li>4. Pengembangan berbasis CKAN agar dapat terintegrasi dengan Portal Data Nasional (<a href="https://data.go.id">https://data.go.id</a>).</li> <li>5. Melakukan monev atas kekurangan Open Data.</li> </ol>	Dinas Komunikasi dan Informatika
12	Indikator 44 terkait Layanan JDIH	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penambahan fitur pengajuan draft regulasi oleh SKPD.</li> <li>2. Penambahan fitur mekanisme penelaahan, reviu, persetujuan draft dan status monitoring.</li> <li>3. Penambahan fitur grafik/chart jumlah regulasi berdasarkan jenis.</li> <li>4. Integrasi dengan JDIH Nasional (<a href="https://jdihn.go.id">https://jdihn.go.id</a>).</li> <li>5. Melakukan monev atas kekurangan JDIH.</li> </ol>	Sekretariat Daerah Bagian Hukum

## 2.1. Inisiatif Strategis SPBE

Berdasarkan telaah visi misi TIK dan analisa hasil survei diperoleh sebelas inisiatif sebagai prioritas pengembangan Layanan SPBE di Kabupaten Tapin yaitu:

1. Pembentukan Komite/Forum Manajemen SPBE;
2. Peningkatan kualifikasi dan jumlah SDM dengan kualifikasi TI secara terencana dan berkesinambungan;
3. Pengembangan Sistem Informasi guna mendukung implementasi layanan SPBE, antara lain:
  - a. Sistem Informasi Perencanaan
  - b. Sistem Informasi Penganggaran
  - c. Sistem Informasi Keuangan

- d. Sistem Informasi Pengadaan
- e. Sistem Informasi Kepegawaian
- f. Sistem Informasi Kearsipan
- g. Sistem Informasi Barang Milik Daerah
- h. Sistem Informasi Pengawasan Internal Pemerintah
- i. Sistem Informasi Akuntabilitas Kinerja Organisasi
- j. Sistem Informasi Kinerja Pegawai
- k. Sistem Informasi Pengaduan Publik
- l. Sistem Informasi Data Terbuka
- m. Sistem Informasi Administrasi Internal lainnya
- n. Sistem Informasi Publik Sektor

Sistem Informasi ini minimal harus memenuhi syarat indeks layanan SPBE di level 4 (empat), dimana sistem informasi harus dapat terintegrasi dengan sistem informasi lain lain baik yang dikelola oleh internal pemda maupun yang dikelola oleh kementerian.

1. Melakukan integrasi layanan perencanaan, layanan penganggaran, layanan pengadaan, layanan manajemen kinerja, layanan pengaduan publik, layanan perizinan, dan pelayanan publik lainnya yang berbasis elektronik, baik integrasi internal pemerintah daerah maupun integrasi dengan pemerintah pusat;
2. Melakukan analisis kelayakan operasional dan keamanan TIK;
3. Pengembangan platform integrasi aplikasi-aplikasi yang telah berjalan dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi serta keterpaduan data primer (data utama milik unit kerja);
4. Menyediakan kebijakan implementasi TIK yang menyeluruh dan menjangkau seluruh SKPD seperti: SOP Pembangunan Aplikasi oleh pihak ketiga;
5. Penambahan dan peremajaan perangkat komputer dan perangkat pendukung.

# **Bab III**

# **Analisa Kondisi**

# **Eksisting SPBE**

### 3.1. Kebijakan & Management

#### A. Kebijakan

Kabupaten Tapin telah menerapkan beberapa layanan untuk administrasi pemerintah maupun layanan publik sektoral, akan tetapi dalam pengembangan layanan SPBE selama ini belum didukung oleh kebijakan internal hal ini juga terlihat pada hasil evaluasi SPBE Kab. Tapin tahun 2021 untuk domain kebijakan indeksnya masih di angka 1.89 sehingga penilaian pengelolaan layanannya dinilai masih kurang maksimal. Atas dasar inilah dilakukan pemetaan mengenai pemenuhan kebijakan yang perlu ada dalam penerapan SPBE yang dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 3.1.1** Mandatory Kebijakan SPBE Daerah

#	Mandatory	Keterangan
1	Kebijakan Tim koordinasi SPBE	Belum ada
2	Kebijakan Manajemen Data	Belum ada
3	Kebijakan Arsitektur SPBE	Belum ada
4	Kebijakan Peta Rencana SPBE	Sudah ada
5	Kebijakan Layanan Pusat Data	Sudah ada
6	Kebijakan Pembangunan Aplikasi SPBE	Sudah ada
7	Kebijakan Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Belum ada
8	Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Belum ada
9	Kebijakan internal Manajemen Keamanan Informasi	Sudah ada
10	Kebijakan Internal Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi	Belum ada

Berdasarkan dari 10 Mandatory kebijakan SPBE yang perlu disusun saat ini baru terdapat 4 kebijakan yang telah disusun oleh Pemerintah Kabupaten Tapin, Oleh karena itu kedepannya perlu menyusun kebijakan SPBE yang belum terakomodir.

#### B. Manajemen

Dalam pengembangan dan penerapan SPBE tentunya harus diimbangi juga dengan penerapan manajemennya guna memastikan operasional SPBE dapat berjalan dengan efektif dan sesuai dengan ekspektasi, layanan SPBE tanpa adanya penerapan manajemen yang benar bisa berimplikasi pada pelayanan yang buruk meskipun sudah didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi. Ada 3 aspek yang perlu diperhatikan dalam implementasi SPBE yakni: SDM (*people*) ->

Manajemen (*process*) -> Layanan IT (*technology*). Atas dasar inilah dilakukan pemetaan mengenai pemenuhan penerapan manajemen yang perlu ada dan dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 3.1.2** Mandatory Manajemen SPBE Daerah

#	Mandatory	Keterangan
1	Penerapan Manajemen Risiko SPBE	Belum Dilakukan
2	Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	Belum Dilakukan
3	Penerapan Manajemen Data	Belum Dilakukan
4	Penerapan Manajemen Aset TIK	Belum Dilakukan
5	Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia	Belum Dilakukan
6	Penerapan Manajemen Pengetahuan	Belum Dilakukan
7	Penerapan Manajemen Perubahan	Belum Dilakukan
8	Penerapan Manajemen Layanan Indikator SPBE	Belum Dilakukan

Berdasarkan dari 8 Mandatory Manajemen SPBE yang perlu dilakukan saat ini belum seluruhnya diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tapin, Oleh karena itu kedepannya perlu menerapkan seluruh domain manajemen SPBE. Hal ini dirasa wajar dikarenakan saat ini belum seluruh domain manajemen ditetapkan pedomannya oleh instansi pusat terkait, dari 8 manajemen tersebut baru 4 manajemen yang sudah ditetapkan pedoman manajemen SPBE-nya, yaitu: Manajemen Risiko, Manajemen Keamanan, Manajemen Perubahan dan Manajemen Data.

### 3.2. Arsitektur Proses Bisnis

Arsitektur Proses bisnis menggambarkan kondisi mengenai proses yang dilakukan di masing-masing perangkat daerah sesuai ketugasan dan fungsi berdasarkan dokumen SOTK. pemetaan proses bisnis di masing-masing Perangkat Daerah ini selanjutnya dianalisis untuk dipetakan ke dalam taksonomi Referensi Arsitektur Proses Bisnis SPBE Nasional. Arsitektur Proses Bisnis ini terdiri atas: Katalog Proses Bisnis dan Matriks Proses Bisnis x Aktor yang ditunjukkan sebagai berikut ini.

## A. Katalog Proses Bisnis

Katalog Proses Bisnis ini berisi deskripsi mengenai proses yang dilakukan di masing-masing perangkat daerah untuk mendukung tercapainya visi dan misi bupati. Katalog ini disusun berdasarkan hasil pemetaan terhadap peta proses bisnis pemerintah kabupaten Tapin. Dimana untuk Level 1 & 2 nya mengacu pada kodefikasi arsitektur proses bisnis SPBE nasional dan untuk level 3 hingga level 6 mengacu pada proses bisnis daerah.

**Tabel 3.2.1** Daftar Proses Bisnis yang dikelola oleh SKPD di Kabupaten Tapin

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
TPN.01.01.01	Pengelolaan PAUD	RAB 06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB 06.01. Pendidikan	TPN.01 Peningkatan aksesibilitas kualitas pendidikan dan SDM yang unggul	TPN.01.01 Peningkatan Pendidikan PAUD, SD, SMP	TPN.01.01.01 Pengelolaan PAUD	Dinas Pendidikan
TPN.01.01.02	Pengelolaan Pendidikan SD, SMP	RAB 06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB 06.01. Pendidikan	TPN.01 Peningkatan aksesibilitas kualitas pendidikan dan SDM yang unggul	TPN.01.01 Peningkatan Pendidikan PAUD, SD, SMP	TPN.01.01.02 Pengelolaan Pendidikan SD, SMP	Dinas Pendidikan
TPN.01.02.01	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	RAB 06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB 06.01. Pendidikan	TPN.01 Peningkatan aksesibilitas kualitas pendidikan dan SDM yang unggul	TPN.01.02 Fasilitasi SDM Unggul	TPN.01.02.01 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan
TPN.01.02.02	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	RAB 06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB 06.01. Pendidikan	TPN.01 Peningkatan aksesibilitas kualitas pendidikan dan SDM yang unggul	TPN.01.02 Fasilitasi SDM Unggul	TPN.01.02.02 Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan
TPN.01.02.03	Pembinaan Perpustakaan	RAB 06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB 06.03. Ilmu Pengetahuan	TPN.01 Peningkatan aksesibilitas kualitas pendidikan dan SDM yang unggul	TPN.01.02 Fasilitasi SDM Unggul	TPN.01.02.03 Pembinaan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
TPN.01.02.04	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	RAB 09. Pemerintahan Umum	RAB 09.06. Aparatur Negara	TPN.01 Peningkatan aksesibilitas kualitas	TPN.01.02 Fasilitasi SDM Unggul	TPN.01.02.04 Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan



ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
				pendidikan dan SDM yang unggul			
TPN.01.02.05	Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	RAB 06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB 06.02. Ketenagakerjaan	TPN.01 Peningkatan aksesibilitas kualitas pendidikan dan SDM yang unggul	TPN.01.02 Fasilitasi SDM Unggul	TPN.01.02.05 Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
TPN.01.02.06	Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	RAB 06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB 06.02. Ketenagakerjaan	TPN.01 Peningkatan aksesibilitas kualitas pendidikan dan SDM yang unggul	TPN.01.02 Fasilitasi SDM Unggul	TPN.01.02.06 Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
TPN.01.02.07	Penempatan Tenaga Kerja	RAB 06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB 06.02. Ketenagakerjaan	TPN.01 Peningkatan aksesibilitas kualitas pendidikan dan SDM yang unggul	TPN.01.02 Fasilitasi SDM Unggul	TPN.01.02.07 Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
TPN.01.02.08	Hubungan Industrial	RAB 02. Ekonomi dan Industri	RAB 02.01. Industri	TPN.01 Peningkatan aksesibilitas kualitas pendidikan dan SDM yang unggul	TPN.01.02 Fasilitasi SDM Unggul	TPN.01.02.08 Hubungan Industrial	Dinas Tenaga Kerja
TPN.02.01.01	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	RAB 04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB 04.01. Kesehatan	TPN.02 Peningkatan derajat kesehatan dan perekonomian masyarakat	TPN.02.01 Pengelolaan Kesehatan Masyarakat	TPN.02.01.01 Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
TPN.02.01.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	RAB 04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB 04.01. Kesehatan	TPN.02 Peningkatan derajat kesehatan dan perekonomian masyarakat	TPN.02.01 Pengelolaan Kesehatan Masyarakat	TPN.02.01.02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan
TPN.02.01.03	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	RAB 04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB 04.01. Kesehatan	TPN.02 Peningkatan derajat kesehatan dan perekonomian masyarakat	TPN.02.01 Pengelolaan Kesehatan Masyarakat	TPN.02.01.03 Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan
TPN.02.01.04	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	RAB 04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB 04.01. Kesehatan	TPN.02 Peningkatan derajat kesehatan dan perekonomian masyarakat	TPN.02.01 Pengelolaan Kesehatan Masyarakat	TPN.02.01.04 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
TPN.02.01.05	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan		RAB 04.01. Kesehatan	TPN.02 Peningkatan derajat kesehatan dan perekonomian masyarakat	TPN.02.01 Pengelolaan Kesehatan Masyarakat	TPN.02.01.05 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rumah Sakit Umum Daerah
TPN.02.01.06	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	RAB 04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB 04.01. Kesehatan	TPN.02 Peningkatan derajat kesehatan dan perekonomian masyarakat	TPN.02.01 Pengelolaan Kesehatan Masyarakat	TPN.02.01.06 Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rumah Sakit Umum Daerah
TPN.02.02.01	Pelayanan Penanaman Modal	RAB 02. Ekonomi dan Industri	RAB 02.08. Investasi	TPN.02 Peningkatan derajat kesehatan dan perekonomian masyarakat	TPN.02.02 Peningkatan Perekonomian Masyarakat	TPN.02.02.01 Pelayanan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu
TPN.02.02.02	Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	RAB 02. Ekonomi dan Industri	RAB 02.08. Investasi	TPN.02 Peningkatan derajat kesehatan dan perekonomian masyarakat	TPN.02.02 Peningkatan Perekonomian Masyarakat	TPN.02.02.02 Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu
TPN.02.02.03	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	RAB 02. Ekonomi dan Industri	RAB 02.08. Investasi	TPN.02 Peningkatan derajat kesehatan dan perekonomian masyarakat	TPN.02.02 Peningkatan Perekonomian Masyarakat	TPN.02.02.03 Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu
TPN.02.02.04	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	RAB 02. Ekonomi dan Industri	RAB 02.08. Investasi	TPN.02 Peningkatan derajat kesehatan dan perekonomian masyarakat	TPN.02.02 Peningkatan Perekonomian Masyarakat	TPN.02.02.04 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu
TPN.02.02.05	Promosi Penanaman Modal	RAB 02. Ekonomi dan Industri	RAB 02.08. Investasi	TPN.02 Peningkatan derajat kesehatan dan perekonomian masyarakat	TPN.02.02 Peningkatan Perekonomian Masyarakat	TPN.02.02.05 Promosi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu
TPN.02.03.01	Perencanaan dan Pembangunan Industri	RAB 02. Ekonomi dan Industri	RAB 02.01. Industri	TPN.02 Peningkatan derajat kesehatan dan perekonomian masyarakat	TPN.02.03 Pengelolaan Perindustrian	TPN.02.03.01 Perencanaan dan Pembangunan Industri	Dinas Perindustrian
TPN.02.03.02	Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	RAB 02. Ekonomi dan Industri	RAB 02.01. Industri	TPN.02 Peningkatan derajat kesehatan dan perekonomian masyarakat	TPN.02.03 Pengelolaan Perindustrian	TPN.02.03.02 Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Dinas Perindustrian

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
TPN.02.03.03	Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	RAB 02. Ekonomi dan Industri	RAB 02.01. Industri	TPN.02 Peningkatan derajat kesehatan dan perekonomian masyarakat	TPN.02.03 Pengelolaan Perindustrian	TPN.02.03.03 Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Dinas Perindustrian
TPN.02.04.01	Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	RAB 02. Ekonomi dan Industri	RAB 02.02. Perdagangan	TPN.02 Peningkatan derajat kesehatan dan perekonomian masyarakat	TPN.02.04 Pengelolaan Perdagangan	TPN.02.04.01 Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Dinas Perdagangan
TPN.02.04.02	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	RAB 02. Ekonomi dan Industri	RAB 02.02. Perdagangan	TPN.02 Peningkatan derajat kesehatan dan perekonomian masyarakat	TPN.02.04 Pengelolaan Perdagangan	TPN.02.04.02 Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Perdagangan
TPN.02.04.03	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	RAB 02. Ekonomi dan Industri	RAB 02.02. Perdagangan	TPN.02 Peningkatan derajat kesehatan dan perekonomian masyarakat	TPN.02.04 Pengelolaan Perdagangan	TPN.02.04.03 Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Dinas Perdagangan
TPN.02.04.04	Pengembangan Ekspor	RAB 02. Ekonomi dan Industri	RAB 02.02. Perdagangan	TPN.02 Peningkatan derajat kesehatan dan perekonomian masyarakat	TPN.02.04 Pengelolaan Perdagangan	TPN.02.04.04 Pengembangan Ekspor	Dinas Perdagangan
TPN.02.04.05	Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	RAB 02. Ekonomi dan Industri	RAB 02.02. Perdagangan	TPN.02 Peningkatan derajat kesehatan dan perekonomian masyarakat	TPN.02.04 Pengelolaan Perdagangan	TPN.02.04.05 Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Dinas Perdagangan
TPN.02.04.06	Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	RAB 02. Ekonomi dan Industri	RAB 02.02. Perdagangan	TPN.02 Peningkatan derajat kesehatan dan perekonomian masyarakat	TPN.02.04 Pengelolaan Perdagangan	TPN.02.04.06 Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Dinas Perdagangan
TPN.02.05.01	Pengelolaan Retribusi Daerah	RAB 09. Pemerintahan Umum	RAB 09.02. Keuangan	TPN.02 Peningkatan derajat kesehatan dan perekonomian masyarakat	TPN.02.05 Pengelolaan Pendapatan Daerah	TPN.02.05.01 Pengelolaan Retribusi Daerah	Badan Pendapatan Daerah
TPN.02.05.02	Pengelolaan Pajak Daerah	RAB 09. Pemerintahan Umum	RAB 09.02. Keuangan	TPN.02 Peningkatan derajat kesehatan dan perekonomian masyarakat	TPN.02.05 Pengelolaan Pendapatan Daerah	TPN.02.05.02 Pengelolaan Pajak Daerah	Badan Pendapatan Daerah
TPN.02.05.03	Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	RAB 04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB 04.03. Pemberdayaan Perempuan	TPN.02 Peningkatan derajat kesehatan dan perekonomian masyarakat	TPN.02.05 Pengelolaan Pendapatan Daerah	TPN.02.05.03 Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
TPN.02.05.04	Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	RAB 04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB 04.03. Pemberdayaan Perempuan	TPN.02 Peningkatan derajat kesehatan dan perekonomian masyarakat	TPN.02.05 Pengelolaan Pendapatan Daerah	TPN.02.05.04 Pemberdayaan Dan	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
						Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	
TPN.03.01.01	Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	RAB 02. Ekonomi dan Industri	RAB 02.09. Koperasi	TPN.03 Peningkatan sektor agribisnis, pariwisata, koperasi dan UKM	TPN.03.01 Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	TPN.03.01.01 Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Dinas Perindustrian
TPN.03.01.02	Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	RAB 02. Ekonomi dan Industri	RAB 02.09. Koperasi	TPN.03 Peningkatan sektor agribisnis, pariwisata, koperasi dan UKM	TPN.03.01 Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	TPN.03.01.02 Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Dinas Perindustrian
TPN.03.01.03	Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	RAB 02. Ekonomi dan Industri	RAB 02.09. Koperasi	TPN.03 Peningkatan sektor agribisnis, pariwisata, koperasi dan UKM	TPN.03.01 Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	TPN.03.01.03 Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Dinas Perindustrian
TPN.03.01.04	Pengembangan Umkm	RAB 02. Ekonomi dan Industri	RAB 02.10. Usaha Kecil Dan Menengah	TPN.03 Peningkatan sektor agribisnis, pariwisata, koperasi dan UKM	TPN.03.01 Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	TPN.03.01.04 Pengembangan Umkm	Dinas Perindustrian
TPN.03.02.01	Pengembangan Kebudayaan	RAB 08. Budaya dan Agama	RAB 08.02. Kebudayaan	TPN.03 Peningkatan sektor agribisnis, pariwisata, koperasi dan UKM	TPN.03.02 Pelestarian Kebudayaan	TPN.03.02.01 Pengembangan Kebudayaan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
TPN.03.02.02	Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	RAB 08. Budaya dan Agama	RAB 08.02. Kebudayaan	TPN.03 Peningkatan sektor agribisnis, pariwisata, koperasi dan UKM	TPN.03.02 Pelestarian Kebudayaan	TPN.03.02.02 Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
TPN.03.03.01	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	RAB 02. Ekonomi dan Industri	RAB 02.11. Pariwisata	TPN.03 Peningkatan sektor agribisnis, pariwisata, koperasi dan UKM	TPN.03.03 Peningkatan Pariwisata	TPN.03.03.01 Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
TPN.03.03.02	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	RAB 02. Ekonomi dan Industri	RAB 02.11. Pariwisata	TPN.03 Peningkatan sektor agribisnis, pariwisata, koperasi dan UKM	TPN.03.03 Peningkatan Pariwisata	TPN.03.03.02 Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
TPN.03.04.01	Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	RAB 02. Ekonomi dan Industri	RAB 02.03. Pertanian	TPN.03 Peningkatan sektor agrobisnis, pariwisata, koperasi dan UKM	TPN.03.04 Peningkatan Pertanian Perikanan dan Peternakan	TPN.03.04.01 Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Pertanian
TPN.03.04.02	Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	RAB 02. Ekonomi dan Industri	RAB 02.03. Pertanian	TPN.03 Peningkatan sektor agrobisnis, pariwisata, koperasi dan UKM	TPN.03.04 Peningkatan Pertanian Perikanan dan Peternakan	TPN.03.04.02 Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian
TPN.03.04.03	Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	RAB 02. Ekonomi dan Industri	RAB 02.05. Peternakan	TPN.03 Peningkatan sektor agrobisnis, pariwisata, koperasi dan UKM	TPN.03.04 Peningkatan Pertanian Perikanan dan Peternakan	TPN.03.04.03 Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dinas Pertanian
TPN.03.04.04	Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	RAB 02. Ekonomi dan Industri	RAB 02.03. Pertanian	TPN.03 Peningkatan sektor agrobisnis, pariwisata, koperasi dan UKM	TPN.03.04 Peningkatan Pertanian Perikanan dan Peternakan	TPN.03.04.04 Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Dinas Pertanian
TPN.03.04.05	Perizinan Usaha Pertanian	RAB 02. Ekonomi dan Industri	RAB 02.03. Pertanian	TPN.03 Peningkatan sektor agrobisnis, pariwisata, koperasi dan UKM	TPN.03.04 Peningkatan Pertanian Perikanan dan Peternakan	TPN.03.04.05 Perizinan Usaha Pertanian	Dinas Pertanian
TPN.03.04.06	Penyuluhan Pertanian	RAB 02. Ekonomi dan Industri	RAB 02.03. Pertanian	TPN.03 Peningkatan sektor agrobisnis, pariwisata, koperasi dan UKM	TPN.03.04 Peningkatan Pertanian Perikanan dan Peternakan	TPN.03.04.06 Penyuluhan Pertanian	Dinas Pertanian
TPN.03.04.07	Pengelolaan Perikanan Tangkap	RAB 02. Ekonomi dan Industri	RAB 02.06. Perikanan	TPN.03 Peningkatan sektor agrobisnis, pariwisata, koperasi dan UKM	TPN.03.04 Peningkatan Pertanian Perikanan dan Peternakan	TPN.03.04.07 Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan
TPN.03.04.08	Pengelolaan Perikanan Budidaya	RAB 02. Ekonomi dan Industri	RAB 02.06. Perikanan	TPN.03 Peningkatan sektor agrobisnis, pariwisata, koperasi dan UKM	TPN.03.04 Peningkatan Pertanian Perikanan dan Peternakan	TPN.03.04.08 Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
TPN.03.04.09	Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	RAB 02. Ekonomi dan Industri	RAB 02.06. Perikanan	TPN.03 Peningkatan sektor agrobisnis, pariwisata, koperasi dan UKM	TPN.03.04 Peningkatan Pertanian Perikanan dan Peternakan	TPN.03.04.09 Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Dinas Perikanan
TPN.03.04.10	Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	RAB 02. Ekonomi dan Industri	RAB 02.06. Perikanan	TPN.03 Peningkatan sektor agrobisnis, pariwisata, koperasi dan UKM	TPN.03.04 Peningkatan Pertanian Perikanan dan Peternakan	TPN.03.04.10 Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Perikanan
TPN.04.01.01	Peningkatan Kerjasama Desa	RAB 03. Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.05. Pembangunan Kawasan Atau Daerah Tertinggal	TPN.04 Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kemandirian pangan daerah	TPN.04.01 Pemberdayaan Desa	TPN.04.01.01 Peningkatan Kerjasama Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
TPN.04.01.02	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	RAB 03. Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.07. Kependudukan	TPN.04 Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kemandirian pangan daerah	TPN.04.01 Pemberdayaan Desa	TPN.04.01.02 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
TPN.04.02.01	Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	RAB 02. Ekonomi dan Industri	RAB 02.03. Pertanian	TPN.04 Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kemandirian pangan daerah	TPN.04.02 Peningkatan Kemandirian Pangan	TPN.04.02.01 Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan
TPN.04.02.02	Penanganan Kerawanan Pangan	RAB 02. Ekonomi dan Industri	RAB 02.03. Pertanian	TPN.04 Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kemandirian pangan daerah	TPN.04.02 Peningkatan Kemandirian Pangan	TPN.04.02.02 Penanganan Kerawanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
TPN.04.02.03	Pengawasan Keamanan Pangan	RAB 02. Ekonomi dan Industri	RAB 02.03. Pertanian	TPN.04 Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kemandirian pangan daerah	TPN.04.02 Peningkatan Kemandirian Pangan	TPN.04.02.03 Pengawasan Keamanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
TPN.04.03.01	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	RAB 06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB 06.05. Pemuda	TPN.04 Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kemandirian pangan daerah	TPN.04.03 Pembinaan Kepemudaan	TPN.04.03.01 Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinas Pemuda dan OlahRaga

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
TPN.04.03.02	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	RAB 08. Budaya dan Agama	RAB 08.03. Olahraga	TPN.04 Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kemandirian pangan daerah	TPN.04.03 Pembinaan Kepemudaan	TPN.04.03.02 Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Dinas Pemuda dan OlahRaga
TPN.04.03.03	Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	RAB 06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB 06.05. Pemuda	TPN.04 Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kemandirian pangan daerah	TPN.04.03 Pembinaan Kepemudaan	TPN.04.03.03 Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Dinas Pemuda dan OlahRaga
TPN.05.01.01	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	RAB 07. Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB 07.02. Energi	TPN.05 Pengelolaan infrastruktur dasar daerah dan lingkungan hidup	TPN.05.01 Pengelolaan Infrastruktur Dasar	TPN.05.01.01 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
TPN.05.01.02	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	RAB 07. Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB 07.02. Energi	TPN.05 Pengelolaan infrastruktur dasar daerah dan lingkungan hidup	TPN.05.01 Pengelolaan Infrastruktur Dasar	TPN.05.01.02 Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
TPN.05.01.03	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	RAB 03. Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.01. Pekerjaan Umum	TPN.05 Pengelolaan infrastruktur dasar daerah dan lingkungan hidup	TPN.05.01 Pengelolaan Infrastruktur Dasar	TPN.05.01.03 Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
TPN.05.01.04	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	RAB 03. Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.01. Pekerjaan Umum	TPN.05 Pengelolaan infrastruktur dasar daerah dan lingkungan hidup	TPN.05.01 Pengelolaan Infrastruktur Dasar	TPN.05.01.04 Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
TPN.05.01.05	Penataan Bangunan Gedung	RAB 03. Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.06. Pertanahan	TPN.05 Pengelolaan infrastruktur dasar daerah dan lingkungan hidup	TPN.05.01 Pengelolaan Infrastruktur Dasar	TPN.05.01.05 Penataan Bangunan Gedung	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
TPN.05.01.06	Penataan Bangunan Gedung Dan Lingkungannya	RAB 03. Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.06. Pertanahan	TPN.05 Pengelolaan infrastruktur dasar daerah dan lingkungan hidup	TPN.05.01 Pengelolaan Infrastruktur Dasar	TPN.05.01.06 Penataan Bangunan Gedung Dan Lingkungannya	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
TPN.05.01.07	Penyelenggaraan Jalan	RAB 03. Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.06. Pertanahan	TPN.05 Pengelolaan infrastruktur dasar daerah dan lingkungan hidup	TPN.05.01 Pengelolaan Infrastruktur Dasar	TPN.05.01.07 Penyelenggaraan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
TPN.05.01.08	Pengembangan Jasa Konstruksi	RAB 03. Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.06. Pertanahan	TPN.05 Pengelolaan infrastruktur dasar daerah dan lingkungan hidup	TPN.05.01 Pengelolaan Infrastruktur Dasar	TPN.05.01.08 Pengembangan Jasa Konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
TPN.05.01.09	Penyelenggaraan Tata Ruang	RAB 03. Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.06. Pertanahan	TPN.05 Pengelolaan infrastruktur dasar daerah dan lingkungan hidup	TPN.05.01 Pengelolaan Infrastruktur Dasar	TPN.05.01.09 Penyelenggaraan Tata Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
TPN.05.01.10	Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	RAB 03. Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.06. Pertanahan	TPN.05 Pengelolaan infrastruktur dasar daerah dan lingkungan hidup	TPN.05.01 Pengelolaan Infrastruktur Dasar	TPN.05.01.10 Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan
TPN.05.01.11	Pengelolaan Pelayaran	RAB 07. Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB 07.04. Kelautan	TPN.05 Pengelolaan infrastruktur dasar daerah dan lingkungan hidup	TPN.05.01 Pengelolaan Infrastruktur Dasar	TPN.05.01.11 Pengelolaan Pelayaran	Dinas Perhubungan
TPN.05.02.01	Perencanaan Lingkungan Hidup	RAB 07. Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB 07.05. Lingkungan Hidup	TPN.05 Pengelolaan infrastruktur dasar daerah dan lingkungan hidup	TPN.05.02 Pengelolaan Lingkungan Hidup	TPN.05.02.01 Perencanaan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
TPN.05.02.02	Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	RAB 07. Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB 07.05. Lingkungan Hidup	TPN.05 Pengelolaan infrastruktur dasar daerah dan lingkungan hidup	TPN.05.02 Pengelolaan Lingkungan Hidup	TPN.05.02.02 Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
TPN.05.02.03	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	RAB 07. Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB 07.05. Lingkungan Hidup	TPN.05 Pengelolaan infrastruktur dasar daerah dan lingkungan hidup	TPN.05.02 Pengelolaan Lingkungan Hidup	TPN.05.02.03 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Dinas Lingkungan Hidup
TPN.05.02.04	Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	RAB 07. Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB 07.05. Lingkungan Hidup	TPN.05 Pengelolaan infrastruktur dasar daerah dan lingkungan hidup	TPN.05.02 Pengelolaan Lingkungan Hidup	TPN.05.02.04 Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Dinas Lingkungan Hidup
TPN.05.02.05	Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	RAB 07. Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB 07.05. Lingkungan Hidup	TPN.05 Pengelolaan infrastruktur dasar daerah dan lingkungan hidup	TPN.05.02 Pengelolaan Lingkungan Hidup	TPN.05.02.05 Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Dinas Lingkungan Hidup
TPN.05.02.06	Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan	RAB 07. Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB 07.05. Lingkungan Hidup	TPN.05 Pengelolaan infrastruktur dasar daerah dan lingkungan hidup	TPN.05.02 Pengelolaan Lingkungan Hidup	TPN.05.02.06 Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan	Dinas Lingkungan Hidup



ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
	Hidup Untuk Masyarakat					Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	
TPN.05.02.07	Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	RAB 07. Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB 07.05. Lingkungan Hidup	TPN.05 Pengelolaan infrastruktur dasar daerah dan lingkungan hidup	TPN.05.02 Pengelolaan Lingkungan Hidup	TPN.05.02.07 Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Dinas Lingkungan Hidup
TPN.05.02.08	Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	RAB 07. Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB 07.05. Lingkungan Hidup	TPN.05 Pengelolaan infrastruktur dasar daerah dan lingkungan hidup	TPN.05.02 Pengelolaan Lingkungan Hidup	TPN.05.02.08 Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
TPN.05.02.09	Pengelolaan Persampahan	RAB 07. Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB 07.05. Lingkungan Hidup	TPN.05 Pengelolaan infrastruktur dasar daerah dan lingkungan hidup	TPN.05.02 Pengelolaan Lingkungan Hidup	TPN.05.02.09 Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup
TPN.05.03.01	Pengembangan Perumahan	RAB 03. Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.04. Perumahan	TPN.05 Pengelolaan infrastruktur dasar daerah dan lingkungan hidup	TPN.05.03 Pengelolaan Pemanfaatan Tata Ruang	TPN.05.03.01 Pengembangan Perumahan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertahanan
TPN.05.03.02	Kawasan Permukiman	RAB 03. Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.04. Perumahan	TPN.05 Pengelolaan infrastruktur dasar daerah dan lingkungan hidup	TPN.05.03 Pengelolaan Pemanfaatan Tata Ruang	TPN.05.03.02 Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertahanan
TPN.05.03.03	Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	RAB 03. Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.04. Perumahan	TPN.05 Pengelolaan infrastruktur dasar daerah dan lingkungan hidup	TPN.05.03 Pengelolaan Pemanfaatan Tata Ruang	TPN.05.03.03 Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertahanan
TPN.05.03.04	Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	RAB 03. Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.01. Pekerjaan Umum	TPN.05 Pengelolaan infrastruktur dasar daerah dan lingkungan hidup	TPN.05.03 Pengelolaan Pemanfaatan Tata Ruang	TPN.05.03.04 Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertahanan
TPN.05.03.05	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	RAB 03. Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.06. Pertanahan	TPN.05 Pengelolaan infrastruktur dasar daerah dan lingkungan hidup	TPN.05.03 Pengelolaan Pemanfaatan Tata Ruang	TPN.05.03.05 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertahanan

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
TPN.05.03.06	Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	RAB 03. Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.06. Pertanahan	TPN.05 Pengelolaan infrastruktur dasar daerah dan lingkungan hidup	TPN.05.03 Pengelolaan Pemanfaatan Tata Ruang	TPN.05.03.06 Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertahanan
TPN.05.03.07	Penatagunaan Tanah	RAB 03. Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.06. Pertanahan	TPN.05 Pengelolaan infrastruktur dasar daerah dan lingkungan hidup	TPN.05.03 Pengelolaan Pemanfaatan Tata Ruang	TPN.05.03.07 Penatagunaan Tanah	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertahanan
TPN.05.04.01	Penanggulangan Bencana	RAB 04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB 04.02. Sosial	TPN.05 Pengelolaan infrastruktur dasar daerah dan lingkungan hidup	TPN.05.04 Penyiapan Tangguh Bencana	TPN.05.04.01 Penanggulangan Bencana	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan
TPN.06.01.01	Penetapan Pelayanan Publik	RAB 09. Pemerintahan Umum	RAB 09.06. Aparatur Negara	TPN.06 Peningkatan kualitas pelayanan publik	TPN.06.01 Manajemen Pelayanan Publik	TPN.06.01.01 Penetapan Pelayanan Publik	Bagian Organisasi
TPN.06.01.02	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	RAB 03. Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.07. Kependudukan	TPN.06 Peningkatan kualitas pelayanan publik	TPN.06.01 Manajemen Pelayanan Publik	TPN.06.01.02 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
TPN.06.01.03	Pencatatan Sipil	RAB 03. Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.07. Kependudukan	TPN.06 Peningkatan kualitas pelayanan publik	TPN.06.01 Manajemen Pelayanan Publik	TPN.06.01.03 Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
TPN.06.01.04	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	RAB 03. Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.07. Kependudukan	TPN.06 Peningkatan kualitas pelayanan publik	TPN.06.01 Manajemen Pelayanan Publik	TPN.06.01.04 Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
TPN.06.01.05	Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik	RAB 09. Pemerintahan Umum	RAB 09.06. Aparatur Negara	TPN.06 Peningkatan kualitas pelayanan publik	TPN.06.01 Manajemen Pelayanan Publik	TPN.06.01.05 Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
TPN.07.01.01	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	RAB 09. Pemerintahan Umum	RAB 09.06. Aparatur Negara	TPN.07 Peningkatan Profesionalitas Organisasi dan Kepegawaian	TPN.07.01 Peningkatan Tata Kelola Organisasi	TPN.07.01.01 Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Bagian Organisasi
TPN.07.01.02	Pencapaian Reformasi Birokrasi	RAB 09. Pemerintahan Umum	RAB 09.06. Aparatur Negara	TPN.07 Peningkatan Profesionalitas Organisasi dan Kepegawaian	TPN.07.01 Peningkatan Tata Kelola Organisasi	TPN.07.01.02 Pencapaian Reformasi Birokrasi	Bagian Organisasi

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
TPN.07.01.03	Analisis Formasi Dan Jabatan	RAB 09. Pemerintahan Umum	RAB 09.06. Aparatur Negara	TPN.07 Peningkatan Profesionalitas Organisasi dan Kepegawaian	TPN.07.01 Peningkatan Tata Kelola Organisasi	TPN.07.01.03 Analisis Formasi Dan Jabatan	Bagian Organisasi
TPN.07.02.01	Pengelolaan ASN	RAB 09. Pemerintahan Umum	RAB 09.06. Aparatur Negara	TPN.07 Peningkatan Profesionalitas Organisasi dan Kepegawaian	TPN.07.02 Pengelolaan Kepegawaian	TPN.07.02.01 Pengelolaan ASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
TPN.07.02.02	Pengembangan ASN	RAB 09. Pemerintahan Umum	RAB 09.06. Aparatur Negara	TPN.07 Peningkatan Profesionalitas Organisasi dan Kepegawaian	TPN.07.02 Pengelolaan Kepegawaian	TPN.07.02.02 Pengembangan ASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
TPN.08.01.01	Pemberdayaan Sosial	RAB 04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB 04.02. Sosial	TPN.08 Peningkatan ketertiban, keamanan, dan kualitas kehidupan sosial keagamaan	TPN.08.01 Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial Keagamaan	TPN.08.01.01 Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial
TPN.08.01.02	Rehabilitasi Sosial	RAB 04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB 04.02. Sosial	TPN.08 Peningkatan ketertiban, keamanan, dan kualitas kehidupan sosial keagamaan	TPN.08.01 Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial Keagamaan	TPN.08.01.02 Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
TPN.08.01.03	Perlindungan Dan Jaminan Sosial	RAB 04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB 04.02. Sosial	TPN.08 Peningkatan ketertiban, keamanan, dan kualitas kehidupan sosial keagamaan	TPN.08.01 Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial Keagamaan	TPN.08.01.03 Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
TPN.08.01.04	Penanganan Bencana	RAB 04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB 04.02. Sosial	TPN.08 Peningkatan ketertiban, keamanan, dan kualitas kehidupan sosial keagamaan	TPN.08.01 Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial Keagamaan	TPN.08.01.04 Penanganan Bencana	Dinas Sosial
TPN.08.01.05	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	RAB 04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB 04.02. Sosial	TPN.08 Peningkatan ketertiban, keamanan, dan kualitas kehidupan sosial keagamaan	TPN.08.01 Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial Keagamaan	TPN.08.01.05 Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Dinas Sosial
TPN.08.02.01	Penegakan Peraturan Daerah	RAB 05. Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAB 05.02. Keamanan	TPN.08 Peningkatan ketertiban, keamanan, dan kualitas kehidupan sosial keagamaan	TPN.08.02 Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	TPN.08.02.01 Penegakan Peraturan Daerah	SatpolPP

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
TPN.08.02.02	Penanggulangan Kebakaran	RAB 05. Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAB 05.02. Keamanan	TPN.08 Peningkatan ketertiban, keamanan, dan kualitas kehidupan sosial keagamaan	TPN.08.02 Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	TPN.08.02.02 Penanggulangan Kebakaran	SatpolPP
TPN.08.02.03	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	RAB 05. Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAB 05.02. Keamanan	TPN.08 Peningkatan ketertiban, keamanan, dan kualitas kehidupan sosial keagamaan	TPN.08.02 Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	TPN.08.02.03 Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	SatpolPP
TPN.08.03.01	Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	RAB 09. Pemerintahan Umum	RAB 09.05. Perencanaan Pembangunan Nasional	TPN.08 Peningkatan ketertiban, keamanan, dan kualitas kehidupan sosial keagamaan	TPN.08.03 Pembinaan Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Dan Politik	TPN.08.03.01 Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
TPN.08.03.02	Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	RAB 09. Pemerintahan Umum	RAB 09.05. Perencanaan Pembangunan Nasional	TPN.08 Peningkatan ketertiban, keamanan, dan kualitas kehidupan sosial keagamaan	TPN.08.03 Pembinaan Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Dan Politik	TPN.08.03.02 Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
TPN.08.03.03	Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	RAB 09. Pemerintahan Umum	RAB 09.05. Perencanaan Pembangunan Nasional	TPN.08 Peningkatan ketertiban, keamanan, dan kualitas kehidupan sosial keagamaan	TPN.08.03 Pembinaan Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Dan Politik	TPN.08.03.03 Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
TPN.08.03.04	Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	RAB 09. Pemerintahan Umum	RAB 09.05. Perencanaan Pembangunan Nasional	TPN.08 Peningkatan ketertiban, keamanan, dan kualitas kehidupan sosial keagamaan	TPN.08.03 Pembinaan Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Dan Politik	TPN.08.03.04 Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
TPN.08.03.05	Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan	RAB 09. Pemerintahan Umum	RAB 09.05. Perencanaan Pembangunan Nasional	TPN.08 Peningkatan ketertiban, keamanan, dan kualitas kehidupan sosial keagamaan	TPN.08.03 Pembinaan Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Dan Politik	TPN.08.03.05 Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
	Pengembangan Etika Serta Budaya Politik					Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	
TPN.08.04.01	Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	RAB 04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB 04.03. Pemberdayaan Perempuan	TPN.08 Peningkatan ketertiban, keamanan, dan kualitas kehidupan sosial keagamaan	TPN.08.04 Perlindungan Perempuan Dan Anak Dan Penyetaraan Gender	TPN.08.04.01 Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
TPN.08.04.02	Perlindungan Perempuan	RAB 04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB 04.03. Pemberdayaan Perempuan	TPN.08 Peningkatan ketertiban, keamanan, dan kualitas kehidupan sosial keagamaan	TPN.08.04 Perlindungan Perempuan Dan Anak Dan Penyetaraan Gender	TPN.08.04.02 Perlindungan Perempuan	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
TPN.08.04.03	Peningkatan Kualitas Keluarga	RAB 04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB 04.02. Sosial	TPN.08 Peningkatan ketertiban, keamanan, dan kualitas kehidupan sosial keagamaan	TPN.08.04 Perlindungan Perempuan Dan Anak Dan Penyetaraan Gender	TPN.08.04.03 Peningkatan Kualitas Keluarga	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
TPN.08.04.04	Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	RAB 04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB 04.03. Pemberdayaan Perempuan	TPN.08 Peningkatan ketertiban, keamanan, dan kualitas kehidupan sosial keagamaan	TPN.08.04 Perlindungan Perempuan Dan Anak Dan Penyetaraan Gender	TPN.08.04.04 Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
TPN.08.04.05	Pemenuhan Hak Anak (PHA)	RAB 04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB 04.03. Pemberdayaan Perempuan	TPN.08 Peningkatan ketertiban, keamanan, dan kualitas kehidupan sosial keagamaan	TPN.08.04 Perlindungan Perempuan Dan Anak Dan Penyetaraan Gender	TPN.08.04.05 Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
TPN.08.04.06	Perlindungan Khusus Anak	RAB 04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB 04.03. Pemberdayaan Perempuan	TPN.08 Peningkatan ketertiban, keamanan, dan kualitas kehidupan sosial keagamaan	TPN.08.04 Perlindungan Perempuan Dan Anak Dan Penyetaraan Gender	TPN.08.04.06 Perlindungan Khusus Anak	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
TPN.09.01.01	Pembangunan Berkelanjutan	RAB 09. Pemerintahan Umum	RAB 09.05. Perencanaan Pembangunan Nasional	TPN.09 Pembangunan berkelanjutan antar sektor yang terpadu	TPN.09.01 Perekonomian Dan Pembangunan	TPN.09.01.01 Pembangunan Berkelanjutan	Bagian Pembangunan
TPN.09.01.02	Penyelenggaraan Inovasi Daerah	RAB 09. Pemerintahan Umum	RAB 09.05. Perencanaan Pembangunan Nasional	TPN.09 Pembangunan berkelanjutan antar sektor yang terpadu	TPN.09.01 Penelitian Dan Pengembangan Daerah	TPN.09.01.02 Penyelenggaraan Inovasi Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan
TPN.10.01.01	Pengelolaan Surat Menyurat	RAB 09. Pemerintahan Umum	RAB 09.07. Kesekretariatan Negara	TPN.10 Peningkatan kualitas administrasi perkantoran	TPN.10.01 Pengelolaan Kearsipan	TPN.10.01.01 Pengelolaan Surat Menyurat	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
TPN.10.02.01	Pelayanan Fasilitas Kunjungan Tamu	RAB 09. Pemerintahan Umum	RAB 09.06. Aparatur Negara	TPN.10 Peningkatan kualitas administrasi perkantoran	TPN.10.02 Pengelolaan Kerumahtanggaan	TPN.10.02.01 Pelayanan Fasilitas Kunjungan Tamu	Bagian Umum dan Keuangan
TPN.10.02.02	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	RAB 09. Pemerintahan Umum	RAB 09.02. Keuangan	TPN.10 Peningkatan kualitas administrasi perkantoran	TPN.10.02 Pengelolaan Kerumahtanggaan	TPN.10.02.02 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bagian Umum dan Keuangan
TPN.10.02.03	Penyediaan Alat Tulis Kantor	RAB 09. Pemerintahan Umum	RAB 09.02. Keuangan	TPN.10 Peningkatan kualitas administrasi perkantoran	TPN.10.02 Pengelolaan Kerumahtanggaan	TPN.10.02.03 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Bagian Umum dan Keuangan
TPN.10.02.04	Penyediaan Makanan Dan Minuman	RAB 09. Pemerintahan Umum	RAB 09.02. Keuangan	TPN.10 Peningkatan kualitas administrasi perkantoran	TPN.10.02 Pengelolaan Kerumahtanggaan	TPN.10.02.04 Penyediaan Makanan Dan Minuman	Bagian Umum dan Keuangan
TPN.10.02.05	Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan	RAB 09. Pemerintahan Umum	RAB 09.02. Keuangan	TPN.10 Peningkatan kualitas administrasi perkantoran	TPN.10.02 Pengelolaan Kerumahtanggaan	TPN.10.02.05 Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan	Bagian Umum dan Keuangan
TPN.10.02.06	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	RAB 09. Pemerintahan Umum	RAB 09.02. Keuangan	TPN.10 Peningkatan kualitas administrasi perkantoran	TPN.10.02 Pengelolaan Kerumahtanggaan	TPN.10.02.06 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bagian Umum dan Keuangan
TPN.10.03.01	Pengelolaan Pengadaan Tender	RAB 09. Pemerintahan Umum	RAB 09.06. Aparatur Negara	TPN.10 Peningkatan kualitas administrasi perkantoran	TPN.10.03 Pengadaan Barang Dan Jasa	TPN.10.03.01 Pengelolaan Pengadaan Tender	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
TPN.10.03.02	Pengelolaan Pengadaan Non Tender	RAB 09. Pemerintahan Umum	RAB 09.06. Aparatur Negara	TPN.10 Peningkatan kualitas administrasi perkantoran	TPN.10.03 Pengadaan Barang Dan Jasa	TPN.10.03.02 Pengelolaan Pengadaan Non Tender	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
TPN.11.01.01	Informasi Dan Komunikasi Publik	RAB 09. Pemerintahan Umum	RAB 09.03. Informasi	TPN.11 Peningkatan kualitas infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi	TPN.11.01 Pengelolaan Informasi	TPN.11.01.01 Informasi Dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika
TPN.11.02.01	Aplikasi Informatika	RAB 09. Pemerintahan Umum	RAB 09.04. Komunikasi	TPN.11 Peningkatan kualitas infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi	TPN.11.02 Pengelolaan Aplikasi	TPN.11.02.01 Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
TPN.11.02.02	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	RAB 09. Pemerintahan Umum	RAB 09.03. Informasi	TPN.11 Peningkatan kualitas infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi	TPN.11.02 Pengelolaan Aplikasi	TPN.11.02.02 Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika
TPN.11.03.01	Penyelenggaraan Statistik Sektor	RAB 09. Pemerintahan Umum	RAB 09.03. Informasi	TPN.11 Peningkatan kualitas infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi	TPN.11.03 Pengelolaan Satu Data Indonesia	TPN.11.03.01 Penyelenggaraan Statistik Sektor	Dinas Komunikasi dan Informatika
TPN.12.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	RAB 09. Pemerintahan Umum	RAB 09.05. Perencanaan Pembangunan Nasional	TPN.12 Pengelolaan akuntabilitas perencanaan dan keuangan	TPN.12.01 Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	TPN.12.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan
TPN.12.01.02	Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	RAB 09. Pemerintahan Umum	RAB 09.05. Perencanaan Pembangunan Nasional	TPN.12 Pengelolaan akuntabilitas perencanaan dan keuangan	TPN.12.01 Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	TPN.12.01.02 Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan
TPN.12.01.03	Koordinasi Perubahan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	RAB 09. Pemerintahan Umum	RAB 09.05. Perencanaan Pembangunan Nasional	TPN.12 Pengelolaan akuntabilitas perencanaan dan keuangan	TPN.12.01 Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	TPN.12.01.03 Koordinasi Perubahan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan
TPN.12.02.01	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	RAB 09. Pemerintahan Umum	RAB 09.02. Keuangan	TPN.12 Pengelolaan akuntabilitas perencanaan dan keuangan	TPN.12.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	TPN.12.02.01 Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Badan Keuangan dan Aset Daerah

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
TPN.12.02.02	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	RAB 09. Pemerintahan Umum	RAB 09.02. Keuangan	TPN.12 Pengelolaan akuntabilitas perencanaan dan keuangan	TPN.12.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	TPN.12.02.02 Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Badan Keuangan dan Aset Daerah
TPN.12.02.03	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	RAB 09. Pemerintahan Umum	RAB 09.02. Keuangan	TPN.12 Pengelolaan akuntabilitas perencanaan dan keuangan	TPN.12.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	TPN.12.02.03 Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Badan Keuangan dan Aset Daerah
TPN.12.02.04	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	RAB 09. Pemerintahan Umum	RAB 09.02. Keuangan	TPN.12 Pengelolaan akuntabilitas perencanaan dan keuangan	TPN.12.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	TPN.12.02.04 Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Badan Keuangan dan Aset Daerah
TPN.12.02.05	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	RAB 09. Pemerintahan Umum	RAB 09.02. Keuangan	TPN.12 Pengelolaan akuntabilitas perencanaan dan keuangan	TPN.12.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	TPN.12.02.05 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Badan Keuangan dan Aset Daerah
TPN.12.03.01	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	RAB 09. Pemerintahan Umum	RAB 09.02. Keuangan	TPN.12 Pengelolaan akuntabilitas perencanaan dan keuangan	TPN.12.03 Pengelolaan Barang Milik Daerah	TPN.12.03.01 Administrasi Pengadaan Barang Milik Daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
TPN.12.03.02	Inventarisasi Barang Milik Daerah	RAB 09. Pemerintahan Umum	RAB 09.02. Keuangan	TPN.12 Pengelolaan akuntabilitas perencanaan dan keuangan	TPN.12.03 Pengelolaan Barang Milik Daerah	TPN.12.03.02 Inventarisasi Barang Milik Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah
TPN.12.03.03	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	RAB 09. Pemerintahan Umum	RAB 09.02. Keuangan	TPN.12 Pengelolaan akuntabilitas perencanaan dan keuangan	TPN.12.03 Pengelolaan Barang Milik Daerah	TPN.12.03.03 Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah
TPN.12.03.04	Penghapusan Barang Milik Daerah	RAB 09. Pemerintahan Umum	RAB 09.02. Keuangan	TPN.12 Pengelolaan akuntabilitas perencanaan dan keuangan	TPN.12.03 Pengelolaan Barang Milik Daerah	TPN.12.03.04 Penghapusan Barang Milik Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah
TPN.13.01.01	Audit Program Pembangunan Daerah	RAB 09. Pemerintahan Umum	RAB 09.06. Aparatur Negara	TPN.13 Pengelolaan Peningkatan Sistem Manajemen Pengawasan	TPN.13.01 Penyelenggaraan Pengawasan	TPN.13.01.01 Audit Program Pembangunan Daerah	Inspektorat



ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
TPN.13.01.02	Penegakan Disiplin ASN	RAB 09. Pemerintahan Umum	RAB 09.06. Aparatur Negara	TPN.13 Pengelolaan Peningkatan Sistem Manajemen Pengawasan	TPN.13.01 Penyelenggaraan Pengawasan	TPN.13.01.02 Penegakan Disiplin ASN	Inspektorat
TPN.13.02.01	Pendampingan Audit	RAB 09. Pemerintahan Umum	RAB 09.06. Aparatur Negara	TPN.13 Pengelolaan Peningkatan Sistem Manajemen Pengawasan	TPN.13.02 Pendampingan Dan Asistensi Administrasi Daerah	TPN.13.02.01 Pendampingan Audit	Inspektorat
TPN.13.02.02	Asistensi Administrasi Daerah	RAB 09. Pemerintahan Umum	RAB 09.06. Aparatur Negara	TPN.13 Pengelolaan Peningkatan Sistem Manajemen Pengawasan	TPN.13.02 Pendampingan Dan Asistensi Administrasi Daerah	TPN.13.02.02 Asistensi Administrasi Daerah	Inspektorat
TPN.13.03.01	Evaluasi Program Perencanaan Daerah	RAB 09. Pemerintahan Umum	RAB 09.05. Perencanaan Pembangunan Nasional	TPN.13 Pengelolaan Peningkatan Sistem Manajemen Pengawasan	TPN.13.03 Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	TPN.13.03.01 Evaluasi Program Perencanaan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan
TPN.13.04.01	Penyusunan Perda, Perbup, Surat Edaran	RAB 05. Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAB 05.01. Hukum	TPN.13 Pengelolaan Peningkatan Sistem Manajemen Pengawasan	TPN.13.04 Penyusunan Kebijakan	TPN.13.04.01 Penyusunan Perda, Perbup, Surat Edaran	Bagian Hukum
TPN.13.04.02	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	RAB 05. Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAB 05.01. Hukum	TPN.13 Pengelolaan Peningkatan Sistem Manajemen Pengawasan	TPN.13.04 Penyusunan Kebijakan	TPN.13.04.02 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Bagian Hukum

### 3.3. Arsitektur Data

#### A. Katalog Entitas Data

Data yang dikelola pada SPBE merupakan suatu kumpulan yang terdiri dari obyek-obyek kerja untuk memberikan gambaran yang lebih luas terkait dengan suatu pelayanan maupun pengelolaan pemerintahan. Setiap data yang dikelola memungkinkan berupa data yang bersifat publik dan memungkinkan bersifat privat. Berdasarkan dari hasil survei yang dilaksanakan terhadap seluruh SKPD di Kabupaten Tapin. Selanjutnya daftar data yang ada selaraskan dengan referensi arsitektur data SPBE nasional. Berikut ini disajikan daftar data secara mendetail yang dikelola oleh SKPD di Kabupaten Tapin.

**Tabel 3.3.1** Daftar Data yang dikelola oleh SKPD di Kabupaten Tapin

ID Data	Nama Data	Uraian Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Produsen Data/Penanggung Jawab Data	Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)
Data-001	Data Kepegawaian	Data Kepegawaian	Terbatas	Text	Realtime	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	TPN.07.02 Pengelolaan Kepegawaian	Layanan Profil Kepegawaian	RAD 09. Informasi Pemerintahan Umum	RAD 09.06. Data Aparatur Sipil Negara
Data-002	Data Gaji	Data Gaji Pegawai	Terbatas	Text	Realtime	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	TPN.07.02 Pengelolaan Kepegawaian	Layanan Gaji Berkala	RAD 09. Informasi Pemerintahan Umum	RAD 09.06. Data Aparatur Sipil Negara
Data-003	Data TPP	Data TPP	Terbatas	Text	Realtime	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	TPN.07.02 Pengelolaan Kepegawaian	Layanan TPP	RAD 09. Informasi Pemerintahan Umum	RAD 09.06. Data Aparatur Sipil Negara
Data-004	Data Pelatihan	Data Pelatihan	Terbuka	Text	Harian	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	TPN.07.02 Pengelolaan Kepegawaian	Layanan Pelatihan ASN	RAD 09. Informasi Pemerintahan Umum	RAD 09.06. Data Aparatur Sipil Negara
Data-005	Data Parpol	Data Parpol	Terbuka	Text	Bulanan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	TPN.08.03 Pembinaan Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Dan Politik	Layanan Pendataan dan Permohonan SKT	RAD 05. Informasi Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAD 05.02. Data Keamanan

ID Data	Nama Data	Uraian Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Produsen Data/Penanggung Jawab Data	Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)
Data-006	Data Ormas	Data Ormas	Terbuka	Text	Bulanan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	TPN.08.03 Pembinaan Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Dan Politik	Layanan Pendataan dan Permohonan SKT	RAD 05. Informasi Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAD 05.02. Data Keamanan
Data-007	Data Anggaran / Keuangan	Data Anggaran/keuangan daerah	Terbatas	Text	Bulanan	Badan Keuangan dan Aset Daerah	TPN.12.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Layanan data anggaran	RAD 09. Informasi Pemerintahan Umum	RAD 09.02. Data Keuangan
Data-008	Data Transaksi Tuntunan Bendahara	Data Transaksi Tuntunan Bendahara	Terbatas	Text	Harian	Badan Keuangan dan Aset Daerah	TPN.12.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Layanan Keuangan	RAD 09. Informasi Pemerintahan Umum	RAD 09.02. Data Keuangan
Data-009	Data Perencanaan Keuangan	Data Perencanaan Keuangan	Terbatas	Text	Harian	Badan Keuangan dan Aset Daerah	TPN.12.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Layanan Perencanaan Dan Penganggaran	RAD 09. Informasi Pemerintahan Umum	RAD 09.02. Data Keuangan
Data-010	Data Logistik	Data Logistik Bantuan	Terbuka	Text	Realtime	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	TPN.05.04 Penyiapan Tangguh Bencana	Layanan Informasi dan Bantuan	RAD 10. Data Pendukung Umum	RAD 10.04. Data Dukung Lainnya
Data-011	Data Pajak Retribusi Daerah	Data Pajak Retribusi Daerah	Terbatas	Text	Harian	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	TPN.02.05 Pengelolaan Pendapatan Daerah	Layanan keuangan	RAD 09. Informasi Pemerintahan Umum	RAD 09.02. Data Keuangan
Data-012	Data Penetapan dan Penerimaan Daerah	Data Penetapan dan Penerimaan Daerah	Terbatas	Text	Harian	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	TPN.02.05 Pengelolaan Pendapatan Daerah	Layanan Retribusi Daerah	RAD 09. Informasi Pemerintahan Umum	RAD 09.02. Data Keuangan
Data-013	Data Informasi Pelayanan Masyarakat	Landing Page (Usulan Masyarakat, Layanan Pengaduan, Layanan Konsultasi)	Terbuka	Text	Realtime	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan	TPN.13.03 Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Layanan Pengaduan Masyarakat	RAD 09. Informasi Pemerintahan Umum	RAD 09.05. Data Perencanaan Pembangunan Nasional

ID Data	Nama Data	Uraian Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Produsen Data/Penanggung Jawab Data	Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)
Data-014	Data Inovasi dan Berita Penelitian dan Pembangunan	Sistem Informasi Inovasi dan Berita Penelitian dan Pembangunan	Terbuka	Text	Realtime	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan	TPN.09.01 Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Layanan Data Inovasi	RAD 09. Informasi Pemerintahan Umum	RAD 09.05. Data Perencanaan Pembangunan Nasional
Data-015	Data Perencanaan dan Penganggaran	Data Perencanaan dan Penganggaran	Terbatas	Text	Realtime	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan	TPN.12.01 Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Layanan Perencanaan Dan Penganggaran	RAD 09. Informasi Pemerintahan Umum	RAD 09.05. Data Perencanaan Pembangunan Nasional
Data-016	Data Perencanaan Pembangunan Daerah RKP	Data Perencanaan Pembangunan Daerah RKP	Terbatas	Text	Realtime	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan	TPN.12.01 Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Layanan Perencanaan Dan Penganggaran	RAD 09. Informasi Pemerintahan Umum	RAD 09.05. Data Perencanaan Pembangunan Nasional
Data-017	Data Monitoring Evaluasi	Data Monitoring Evaluasi	Terbatas	Text	Realtime	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan	TPN.13.03 Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	layanan evaluasi	RAD 09. Informasi Pemerintahan Umum	RAD 09.05. Data Perencanaan Pembangunan Nasional
Data-018	Data DAK Fisik	Sistem Informasi DAK Fisik	Terbatas	Text	Realtime	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan	TPN.13.03 Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Layanan Perencanaan Dan Penganggaran	RAD 09. Informasi Pemerintahan Umum	RAD 09.05. Data Perencanaan Pembangunan Nasional
Data-019	Data Informasi Pembangunan Daerah	Data Informasi Pembangunan Daerah	Terbatas	Text	Tahunan	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan	TPN.13.03 Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Layanan Perencanaan Dan Penganggaran	RAD 09. Informasi Pemerintahan Umum	RAD 09.05. Data Perencanaan Pembangunan Nasional
Data-020	Data Informasi Pemerintahan	Data Informasi Pemerintahan	Terbuka	Text	Harian	Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol		Layanan Informasi Pemerintahan	RAD 09. Informasi Pemerintahan Umum	RAD 09.03. Data Informasi
Data-021	Data Sosial	Data Sosial	Terbuka	Text	Realtime	Bagian Kesejahteraan Rakyat	TPN.08.01 Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial	Layanan informasi pemerintahan, informasi sosial	RAD 04. Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD 04.02. Data Sosial

ID Data	Nama Data	Uraian Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Produsen Data/Penanggung Jawab Data	Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)
							Keagamaan	kemasyarakatan		
Data-022	Data Akuntabilitas Kinerja	Data Akuntabilitas Kinerja	Terbatas	Text	Realtime	Bagian Organisasi	TPN.07.01 Peningkatan Tata Kelola Organisasi	Layanan pelaporan dan akuntabilitas	RAD 09. Informasi Pemerintahan Umum	RAD 09.06. Data Aparatur Sipil Negara
Data-023	Data Pengadaan Barang dan Jasa	Data Pengadaan Barang dan Jasa	Terbuka	Text	Realtime	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	TPN.10.03 Pengadaan Barang Dan Jasa	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	RAD 10. Data Pendukung Umum	RAD 10.04. Data Dukung Lainnya
Data-024	Data Kebudayaan	Data Kebudayaan	Terbuka	Text	Realtime	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	TPN.03.02 Pelestarian Kebudayaan	Layanan Informasi, Kebudayaan, Wisata, Ekonomi Kreatif	RAD 08. Informasi Budaya dan Agama	RAD 08.02. Data Kebudayaan
Data-025	Data Pariwisata	Data Pariwisata					TPN.03.03 Peningkatan Pariwisata	Layanan Informasi, Kebudayaan, Wisata, Ekonomi Kreatif	RAD 02. Informasi Ekonomi dan Industri	RAD 02.11. Data Pariwisata
Data-026	Data Survey Kepuasan Masyarakat	Survei Kepuasan Publik	Terbuka	Text	Harian	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	TPN.06.01 Manajemen Pelayanan Publik	Layanan pengaduan masyarakat	RAD 09. Informasi Pemerintahan Umum	RAD 09.04. Data Komunikasi
Data-027	Data Kependudukan	Data Kependudukan	Terbuka	Text	Harian	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	TPN.06.01 Manajemen Pelayanan Publik	Layanan Kependudukan	RAD 03. Pembangunan Kewilayahan	RAD 03.07. Data Kependudukan
Data-028	Data Informasi, Layanan, Kesehatan	Data Informasi, Layanan, Kesehatan	Terbuka	Text	Harian	Dinas Kesehatan	TPN.02.01 Pengelolaan Kesehatan Masyarakat	Layanan Kesehatan	RAD 04. Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD 04.01. Data Kesehatan
Data-029	Data Stunting	Data Stunting	Terbatas	Text	Harian	Dinas Kesehatan	TPN.02.01 Pengelolaan Kesehatan Masyarakat	Layanan Kesehatan	RAD 04. Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD 04.01. Data Kesehatan
Data-030	Data Gizi	Data Gizi	Terbatas	Text	Harian	Dinas Kesehatan	TPN.02.01 Pengelolaan Kesehatan Masyarakat	Layanan Kesehatan	RAD 04. Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD 04.01. Data Kesehatan
Data-031	Data Malaria	Data Malaria	Terbatas	Text	Harian	Dinas Kesehatan	TPN.02.01 Pengelolaan Kesehatan Masyarakat	Layanan Kesehatan	RAD 04. Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD 04.01. Data Kesehatan

ID Data	Nama Data	Uraian Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Produsen Data/Penanggung Jawab Data	Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)
Data-032	Data Ketersediaan Obat	Data Ketersediaan Obat	Terbatas	Text	Harian	Dinas Kesehatan	TPN.02.01 Pengelolaan Kesehatan Masyarakat	Layanan Kesehatan	RAD 04. Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD 04.01. Data Kesehatan
Data-033	Data Penyakit	Data Penyakit	Terbatas	Text	Harian	Dinas Kesehatan	TPN.02.01 Pengelolaan Kesehatan Masyarakat	Layanan Kesehatan	RAD 04. Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD 04.01. Data Kesehatan
Data-034	Data Imunisasi	Data Imunisasi	Terbatas	Text	Harian	Dinas Kesehatan	TPN.02.01 Pengelolaan Kesehatan Masyarakat	Layanan Kesehatan	RAD 04. Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD 04.01. Data Kesehatan
Data-035	Data kesehatan Ibu dan Balita	Data kesehatan Ibu dan Balita	Terbatas	Text	Harian	Dinas Kesehatan	TPN.02.01 Pengelolaan Kesehatan Masyarakat	Layanan Kesehatan	RAD 04. Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD 04.01. Data Kesehatan
Data-036	Data Covid	Data Covid	Terbatas	Text	Harian	Dinas Kesehatan	TPN.02.01 Pengelolaan Kesehatan Masyarakat	Layanan Covid-19	RAD 04. Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD 04.01. Data Kesehatan
Data-037	Data Antigen dan PCR	Data Antigen dan PCR	Terbatas	Text	Harian	Dinas Kesehatan	TPN.02.01 Pengelolaan Kesehatan Masyarakat	Layanan Covid-19	RAD 04. Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD 04.01. Data Kesehatan
Data-038	Data Kematian	Data Kematian	Terbatas	Text	Harian	Dinas Kesehatan	TPN.06.01 Manajemen Pelayanan Publik	Layanan Kependudukan	RAD 04. Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD 04.01. Data Kesehatan
Data-039	Data Harga Pangan	Data Harga Pangan	Terbuka	Text	Bulanan	Dinas Ketahanan Pangan	TPN.04.02 Peningkatan Kemandirian Pangan	Layanan Informasi Data Harga Pangan, Keamanan Pangan, Pengisian Lumbung Gabah, Dan Keamanan Pangan	RAD 02. Informasi Ekonomi dan Industri	RAD 02.03. Data Pertanian
Data-040	Data Pembangunan Lumbung	Data Pembangunan Lumbung	Terbuka	Text	Bulanan	Dinas Ketahanan Pangan	TPN.04.02 Peningkatan Kemandirian Pangan	Layanan Informasi Data Harga Pangan, Keamanan Pangan, Pengisian Lumbung Gabah, Dan Keamanan Pangan	RAD 02. Informasi Ekonomi dan Industri	RAD 02.03. Data Pertanian

ID Data	Nama Data	Uraian Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Produsen Data/Penanggung Jawab Data	Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)
Data-041	Data Pengisian Lumbung Gabah	Data Pengisian Lumbung Gabah	Terbuka	Text	Bulanan	Dinas Ketahanan Pangan	TPN.04.02 Peningkatan Kemandirian Pangan	Layanan Informasi Data Harga Pangan, Keamanan Pangan, Pengisian Lumbung Gabah, Dan Keamanan Pangan	RAD 02. Informasi Ekonomi dan Industri	RAD 02.03. Data Pertanian
Data-042	Data Keamanan Pangan	Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Terbuka	Text	Bulanan	Dinas Ketahanan Pangan	TPN.04.02 Peningkatan Kemandirian Pangan	Layanan Informasi Data Harga Pangan, Keamanan Pangan, Pengisian Lumbung Gabah, Dan Keamanan Pangan	RAD 02. Informasi Ekonomi dan Industri	RAD 02.03. Data Pertanian
Data-043	Data Pembinaan Kelompok Wanita Tani	Pembinaan Kelompok Wanita Tani	Terbuka	Text	Bulanan	Dinas Ketahanan Pangan	TPN.03.04 Peningkatan Pertanian Perikanan dan Peternakan	Layanan Pembinaan Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Pertanian	RAD 02. Informasi Ekonomi dan Industri	RAD 02.03. Data Pertanian
Data-044	Data Keanekaragaman Pangan	Data Keanekaragaman Pangan	Terbuka	Text	Bulanan	Dinas Ketahanan Pangan	TPN.04.02 Peningkatan Kemandirian Pangan	Layanan Informasi Data Harga Pangan, Keamanan Pangan, Pengisian Lumbung Gabah, Dan Keamanan Pangan	RAD 02. Informasi Ekonomi dan Industri	RAD 02.03. Data Pertanian
Data-045	Data Aduan	Data Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat	Terbatas	Text	Harian	Dinas Komunikasi dan Informatika	TPN.11.01 Pengelolaan Informasi	Layanan Pengaduan Masyarakat	RAD 09. Informasi Pemerintahan Umum	RAD 09.04. Data Komunikasi
Data-046	Data Evaluasi SPBE	Data Evaluasi SPBE	Terbatas	Text	Tahunan	Dinas Komunikasi dan Informatika	TPN.11.03 Pengelolaan Satu Data Indonesia	Layanan Evaluasi	RAD 10. Data Pendukung Umum	RAD 10.01. Kebijakan Pemerintah
Data-047	Data Identifikasi TIK	Data Identifikasi TIK	Terbuka	Text	Bulanan	Dinas Komunikasi dan Informatika	TPN.11.01 Pengelolaan Informasi	Layanan Identifikasi Data	RAD 09. Informasi Pemerintahan Umum	RAD 09.03. Data Informasi
Data-048	Data Profil Dinas,	Data Profil Dinas, Kegiatan,	Terbuka	Text	Harian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan	TPN.11.01 Pengelolaan Informasi	Layanan Informasi Profil Dinas	RAD 10. Data Pendukung Umum	RAD 10.02. Data Manajemen Kegiatan

ID Data	Nama Data	Uraian Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Produsen Data/Penanggung Jawab Data	Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)
	Kegiatan, Berita	Berita				Ruang				
Data-049	Data Laporan Jalan dan Jembatan	Data Laporan Jalan dan Jembatan	Terbuka	Text	Harian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	TPN.05.01 Pengelolaan Infrastruktur Dasar	Layanan Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Milik Jalan	RAD 09. Informasi Pemerintahan Umum	RAD 09.05. Data Perencanaan Pembangunan Nasional
Data-050	Data Informasi dan Keuangan	Data Perencanaan Keuangan	Terbatas	Text	Realtime	Badan Keuangan dan Aset Daerah	TPN.12.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Layanan Keuangan	RAD 09. Informasi Pemerintahan Umum	RAD 09.02. Data Keuangan
Data-051	Data Perkawinan Usia Di Bawah Umur, Data Usaha Rumahan, Data Kekerasan Pada Perempuan	Data Perkawinan Usia Di Bawah Umur, Data Usaha Rumahan, Data Kekerasan Pada Perempuan	Terbuka	Text	Tahunan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	TPN.08.04 Perlindungan Perempuan Dan Anak Dan Penyetaraan Gender	Layanan Informasi Pusat Pembelajaran Keluarga	RAD 05. Informasi Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAD 05.03. Data Hak Asasi Manusia
Data-052	Data Kepemudaan dan Olahraga	Data Kepemudaan dan Olahraga	Terbuka	Text	Realtime	Dinas Pemuda dan Olahraga	TPN.04.03 Pembinaan Kepemudaan	Layanan Pembinaan Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Pertanian	RAD 08. Informasi Budaya dan Agama	RAD 08.03. Data Olahraga
Data-053	Data Perizinan OSS dan Non OSS	Data Perizinan OSS dan Non OSS	Terbatas	Text	Harian	Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu	TPN.02.02 Peningkatan Perekonomian Masyarakat	Layanan Perizinan	RAD 09. Informasi Pemerintahan Umum	RAD 09.07. Data Kesekretariatan Negara
Data-054	Data Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Data Pendidikan, Data SK, Data Guru	Terbuka	Text	Bulanan	Dinas Pendidikan	TPN.01.01 Peningkatan Pendidikan PAUD, SD, SMP	Layanan Kependidikan	RAD 06. Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAD 06.01. Data Pendidikan



ID Data	Nama Data	Uraian Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Produsen Data/Penanggung Jawab Data	Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)
Data-055	Data Pendaftaran Siswa Baru	Data Pendaftaran Siswa Baru	Terbuka	Text	Harian	Dinas Pendidikan	TPN.01.01 Peningkatan Pendidikan PAUD, SD, SMP	Layanan Penerimaan Siswa Baru	RAD 06. Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAD 06.01. Data Pendidikan
Data-056	Data Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran	Data Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran	Terbatas	Text	Realtime		TPN.12.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Layanan Data Anggaran	RAD 09. Informasi Pemerintahan Umum	RAD 09.02. Data Keuangan Umum
Data-057	Data Guru dan Siswa	Data Guru dan Siswa	Terbatas	Text	Realtime	Dinas Pendidikan	TPN.01.02 Fasilitasi SDM Unggul	Layanan Kependidikan	RAD 06. Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAD 06.01. Data Pendidikan
Data-058	Data Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi DAK	Aplikasi Pelaporan, Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi DAK	Terbuka	Text	Realtime	Bagian Perencanaan dan Keuangan	TPN.13.03 Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Layanan Evaluasi	RAD 09. Informasi Pemerintahan Umum	RAD 09.02. Data Keuangan Umum
Data-059	Data Pencatatan Dan Pelaporan Program Bangga Kencana	Data Pencatatan Dan Pelaporan Program Bangga Kencana	Terbatas	Text	Realtime	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	TPN.02.06 Pemberdayaan Keluarga	Layanan Keluarga Berencana	RAD 04. Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD 04.03. Data Pemberdayaan Perempuan
Data-060	Data Keluarga Berencana	Data Keluarga Berencana	Terbatas	Text	Realtime	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	TPN.02.06 Pemberdayaan Keluarga	Layanan Keluarga Berencana	RAD 04. Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD 04.03. Data Pemberdayaan Perempuan
Data-061	Data Kinerja PKB/PLKB	Data Kinerja PKB/PLKB	Terbatas	Text	Realtime	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	TPN.02.06 Pemberdayaan Keluarga	Layanan Keluarga Berencana	RAD 04. Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD 04.03. Data Pemberdayaan Perempuan
Data-062	Data Kekeluargaan	Data Kekeluargaan	Terbatas	Text	Realtime	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	TPN.02.06 Pemberdayaan Keluarga	Layanan Konsultasi Keluarga	RAD 04. Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD 04.03. Data Pemberdayaan Perempuan

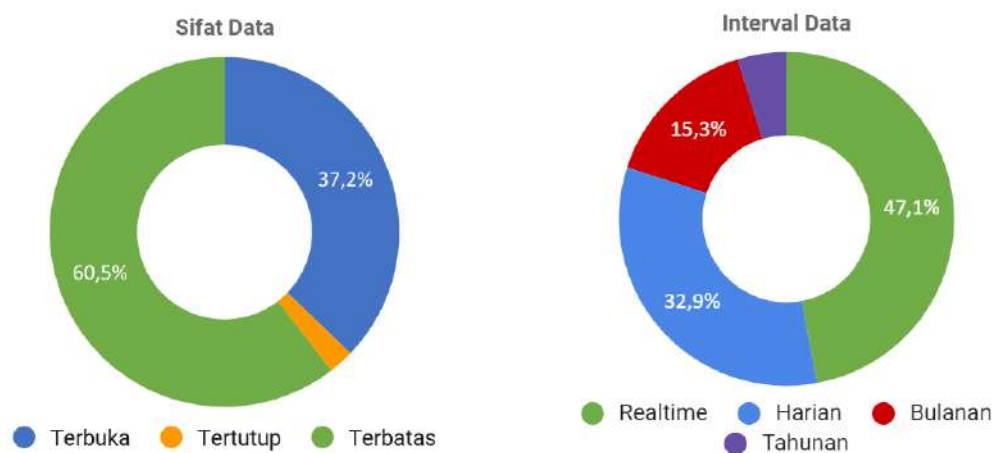
ID Data	Nama Data	Uraian Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Produsen Data/Penanggung Jawab Data	Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)
Data-063	Data Alat dan Obat Kontrasepsi	Data Alat dan Obat Kontrasepsi	Terbatas	Text	Realtime	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	TPN.02.06 Pemberdayaan Keluarga	Layanan Keluarga Berencana	RAD 04. Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD 04.03. Data Pemberdayaan Perempuan
Data-064	Data Kampung KB	Data Statistik Kampung KB	Terbatas	Text	Realtime	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	TPN.02.06 Pemberdayaan Keluarga	Layanan Keluarga Berencana	RAD 04. Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD 04.03. Data Pemberdayaan Perempuan
Data-065	Data Retribusi Pasar	Data Retribusi Pasar	Terbatas	Text	Harian	Dinas Perdagangan	TPN.02.04 Pengelolaan Perdagangan	Layanan Retribusi Pelayanan Pasar Dan Pelayanan Persampahan/Kebersihan Pasar	RAD 02. Informasi Ekonomi dan Industri	RAD 02.02. Data Perdagangan
Data-066	Data informasi Lalu Lintas dan Angkutan	Data informasi Lalu Lintas dan Angkutan	Terbuka	Text	Realtime	Dinas Perhubungan	TPN.05.01 Pengelolaan Infrastruktur Dasar	Layanan Informasi Lingkungan Perhubungan Dan Keselamatan	RAD 10. Data Pendukung Umum	RAD 10.03. Data Kewilayahan
Data-067	Data Perikanan	Data Budidaya Perikanan dan Usaha Perikanan	Terbatas	Text	Tahunan	Dinas Perikanan	TPN.03.04 Peningkatan Pertanian Perikanan dan Peternakan	Layanan Data Informasi Perikanan	RAD 02. Informasi Ekonomi dan Industri	RAD 02.06. Data Perikanan
Data-068	Data Perpustakaan dan Katalog	Data Perpustakaan dan Katalog	Terbatas	Text	Harian	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	TPN.01.02 Fasilitasi SDM Unggul	Layanan Perpustakaan	RAD 09. Informasi Pemerintahan Umum	RAD 09.07. Data Kesekretariatan Negara
Data-069	Data Arsip Statis dan Arsip Dinamis	Data Arsip Statis dan Arsip Dinamis	Terbatas	Text	Harian	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	TPN.10.01 Pengelolaan Kearsipan	Layanan Surat Menyurat Dan Arsip Dinamis	RAD 09. Informasi Pemerintahan Umum	RAD 09.07. Data Kesekretariatan Negara
Data-070	Data Pertanian	Data Pertanian	Terbuka	Text	Harian	Dinas Pertanian	TPN.03.04 Peningkatan Pertanian Perikanan dan Peternakan	Layanan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	RAD 02. Informasi Ekonomi dan Industri	RAD 02.03. Data Pertanian
Data-071	Data Perumahan dan Komplek	Data Perumahan dan Komplek	Terbuka	Text	Realtime	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertahanan	TPN.05.03 Pengelolaan Pemanfaatan Tata Ruang	Layanan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	RAD 03. Pembangunan Kewilayahan	RAD 03.04. Data Perumahan

ID Data	Nama Data	Uraian Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Produsen Data/Penanggung Jawab Data	Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)
Data-072	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	Terbatas	Text	Bulanan	Dinas Sosial	TPN.08.01 Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial Keagamaan	Layanan DTKS(Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)	RAD 04. Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD 04.02. Data Sosial
Data-073	Data Ketenagakerjaan	Data Ketenagakerjaan	Terbuka	Text	Realtime	Dinas Tenaga Kerja	TPN.01.02 Fasilitasi SDM Unggul	Layanan Terpadu Ketenagakerjaan	RAD 06. Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAD 06.02. Data Ketenagakerjaan
Data-074	Data Tindak Lanjut	Data Pelaporan ASN dan tindak lanjut hasil pemeriksaan	Terbatas	Text	Realtime	Inspektorat	TPN.13.01 Penyelenggaraan Pengawasan	Layanan Pelaporan Dan Akuntabilitas	RAD 09. Informasi Pemerintahan Umum	RAD 09.05. Data Perencanaan Pembangunan Nasional
Data-075	Data Medis	Data Medis	Tertutup	Text	Bulanan	RSUD Datu Sanggul	TPN.02.01 Pengelolaan Kesehatan Masyarakat	Layanan Kesehatan	RAD 04. Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD 04.01. Data Kesehatan
Data-076	Data Pasien	Data Pasien	Terbatas	Text	Realtime	RSUD Datu Sanggul	TPN.02.01 Pengelolaan Kesehatan Masyarakat	Layanan Pendaftaran Pasien	RAD 04. Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD 04.01. Data Kesehatan
Data-077	Data Produk Hukum	Data Informasi Produk Hukum	Terbuka	Text	Realtime	Sekretariat DPRD	TPN.13.04 Penyusunan Kebijakan	Layanan Informasi Produk Hukum	RAD 05. Informasi Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAD 05.01. Data Hukum
Data-078	Data TTD Elektronik	Data TTD Elektronik	Terbatas/Tertutup	Text	Realtime	Dinas Komunikasi dan Informatika	TPN.11.03 Pengelolaan Satu Data Indonesia	Layanan Identifikasi Data	RAD 09. Informasi Pemerintahan Umum	RAD 09.03. Data Informasi
Data-079	Data Informasi Keluarga	Data Informasi Keluarga	Terbatas	Text	Realtime	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	TPN.02.06 Pemberdayaan Keluarga	Layanan Konsultasi Keluarga	RAD 03. Pembangunan Kewilayahan	RAD 03.07. Data Kependudukan
Data-080	Data Harta Kekayaan ASN	Data Harta Kekayaan ASN	Terbatas	Text	Realtime	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	TPN.07.02 Pengelolaan Kepegawaian	Layanan Profil Kepegawaian	RAD 09. Informasi Pemerintahan Umum	RAD 09.06. Data Aparatur Sipil Negara
Data-081	Data Reformasi Birokrasi	Data Reformasi Birokrasi	Terbatas	Text	Realtime	Bagian Organisasi	TPN.07.01 Peningkatan Tata Kelola Organisasi	Layanan Informasi, Birokrasi Dan Tata Lakasana	RAD 09. Informasi Pemerintahan Umum	RAD 09.05. Data Perencanaan Pembangunan Nasional

ID Data	Nama Data	Uraian Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Produsen Data/Penanggung Jawab Data	Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)
Data-082	Data Industri	Data Industri	Terbatas	Text	Realtime	Dinas Perindustrian	TPN.02.03 Pengelolaan Perindustrian	Layanan Produk UMKM	RAD 02. Informasi Ekonomi dan Industri	RAD 02.01. Data Industri
Data-083	Data KKN	Data KKN	Terbatas	Text	Realtime	Inspektorat	TPN.13.01 Penyelenggaraan Pengawasan	Layanan Pelaporan Dan Akuntabilitas	RAD 09. Informasi Pemerintahan Umum	RAD 09.06. Data Aparatur Sipil Negara
Data-084	Data Kesehatan Haji	Data Kesehatan Haji	Terbatas	Text	Realtime	Dinas Kesehatan	TPN.02.01 Pengelolaan Kesehatan Masyarakat	Layanan Kesehatan	RAD 04. Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD 04.01. Data Kesehatan
Data-085	Data Ekonomi Sosial	Data Ekonomi Sosial	Terbatas	Text	Realtime	Dinas Perindustrian	TPN.02.03 Pengelolaan Perindustrian	Layanan Informasi, Birokrasi Dan Tata Lakasana	RAD 04. Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD 04.02. Data Sosial
Data-086	Data Pemerintahan Desa	Data Pemerintahan Desa	Terbatas	Text	Realtime	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	TPN.12.01 Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Layanan Informasi Keuangan Desa	RAD 03. Pembangunan Kewilayahan	RAD 03.05. Data Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal

## B. Analisis Diagram Data

Analisa terhadap kondisi data eksisting dapat dijabarkan sebagai berikut :



**Grafik 3.3.1.** Kondisi Data eksisting

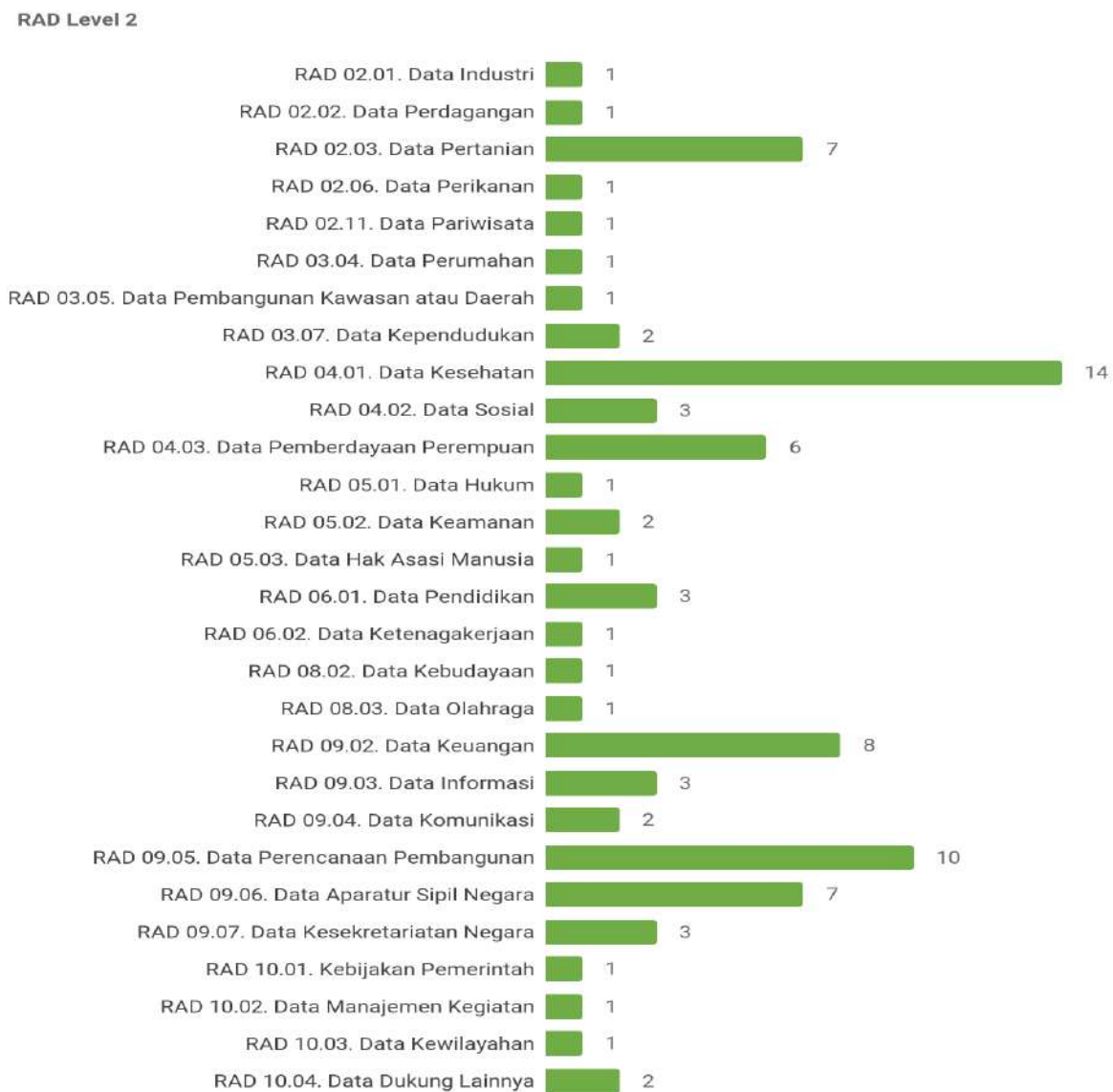
Pada grafik 3.3.1 menunjukkan 2 diagram mengenai kondisi aplikasi eksisting sifat data dan interval data. Terdapat 87 data aplikasi eksisting yang berada di kabupaten Tapin. dari 87 data tersebut terbagi menjadi 3 sifat data dengan 37,2% (32 data) merupakan data yang bersifat terbuka atau dapat dilihat juga oleh publik, 2,3% (2 data) merupakan data yang bersifat tertutup atau rahasia, 60,5% (52 data) merupakan data yang bersifat terbatas, dan terdapat 1 data yang bersifat terbatas/tertutup.

Untuk Interval Update data eksisting di kabupaten Tapin menunjukkan 4 sifat interval data yaitu 47,1% (40 data) merupakan data dengan interval update realtime, 32,9% (28 data) merupakan data dengan interval update harian, 15,3% (13 data) merupakan data dengan interval update bulanan, dan 4,7% (4 data) merupakan data dengan interval update Tahunan.



**Grafik 3.3.2** RAD Level 1

Untuk Data Pokok penyesuaian dengan Standar Nasional. Dari total 82 data terbagi menjadi beberapa bagian dimana 11 Informasi Ekonomi dan Industri, 4 Informasi Ekonomi dan Industri, 23 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan, 4 Informasi Ketertiban Umum dan Keselamatan, 4 Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja, 2 Informasi Budaya dan Agama, 29 Informasi Pemerintahan Umum, dan 5 merupakan Data Pendukung Umum.



**Grafik 3.3.3** SKPD Penanggung Jawab Data

Pada Grafik 3.3.3 dapat dilihat SKPD penanggung jawab Data. Terdapat 1 Data Industri, 1 Data Perdagangan, 7 Data Pertanian, 1 Data perikanan, 1 Data Pariwisata, 1 Data Perumahan, 1 Data Pembangunan Kawasan dan Daerah Tertinggal, 2 Data Kependudukan, 14 Data Kesehatan, 3 Data Sosial, 6 Data Pemberdayaan Perempuan, 1 Data Hukum, 1 Data Hak Asasi Manusia, 3 Data pendidikan, 1 Data Ketenagakerjaan, 1 Dan Kebudayaan 1 Data Olahraga, 8 Data Keuangan, 3 Data Informasi, 2 Data Komunikasi, 10 Data Perencanaan Pembangunan Nasional, 7 Data Aparatur Sipil Negara, 3 Data Kesekretariatan Negara, 1 Data kebijakan Pemerintah, 1 Data Manajemen Kegiatan, 1 Data kewilayahan, dan 2 Data dukung lainnya.

### 3.4. Arsitektur Layanan

#### A. Diagram Layanan SPBE yang menjadi indikator dalam evaluasi

Diagram ini menjelaskan hubungan antara layanan, data, aplikasi di masing-masing SKPD khusus pada layanan yang di evaluasi oleh Kemenpan-RB dimulai dari indikator 32 hingga 47 dengan tujuan untuk memetakan mana saja proses yang perlu ditransformasi digitalkan dalam waktu dekat. Selain itu juga diagram ini menjelaskan layanan antar unit yang memiliki irisan dan memetakan kepemilikan data yg ada di masing-masing SKPD, sehingga terlihat jelas kedepan data-data mana saja yang bisa di berbagi pakaikan antar SKPD dan juga ini menjadi dasar dalam penyusunan rencana integrasi antar sistem yang ada di Kabupaten Tapin. Berikut ini merupakan gambaran keterkaitan dari Layanan, Data, Aplikasi dan Teknologi.

## 1. Layanan Perencanaan

Dalam menunjang layanan perencanaan yang diampu oleh Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kab. Tapin yang mempunyai tugas melaksanakan di bidang Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bappeda melaksanakan fungsi:

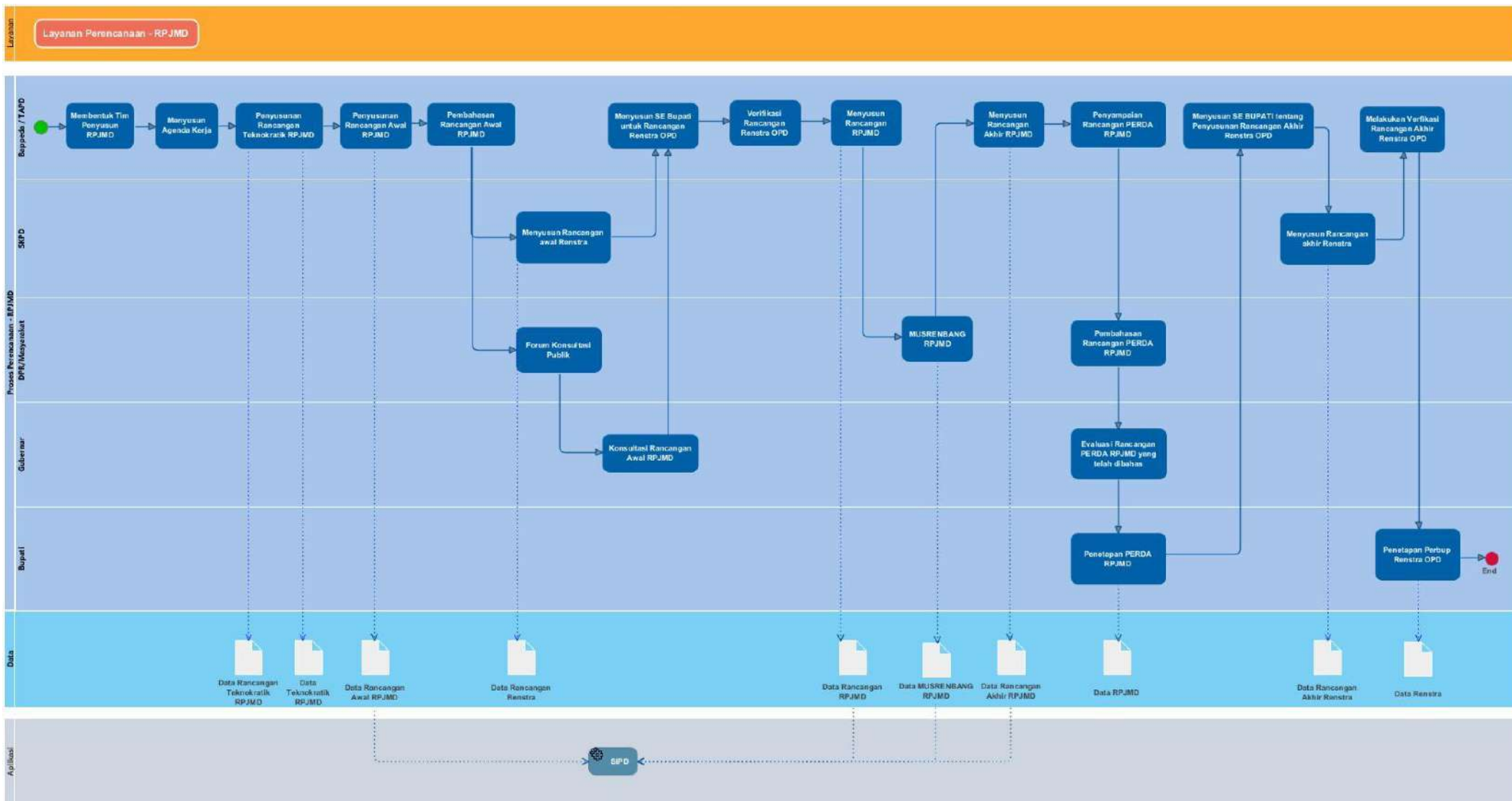
- a) penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- b) pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- c) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan dan penelitian pengembangan;
- d) Pelaksanaan tugas Bupati sebagai wakil pemerintah pusat di bidang perencanaan pembangunan daerah; dan
- e) pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan.

Adapun berdasarkan fungsinya maka layanan perencanaan yang terdapat di Bappeda adalah

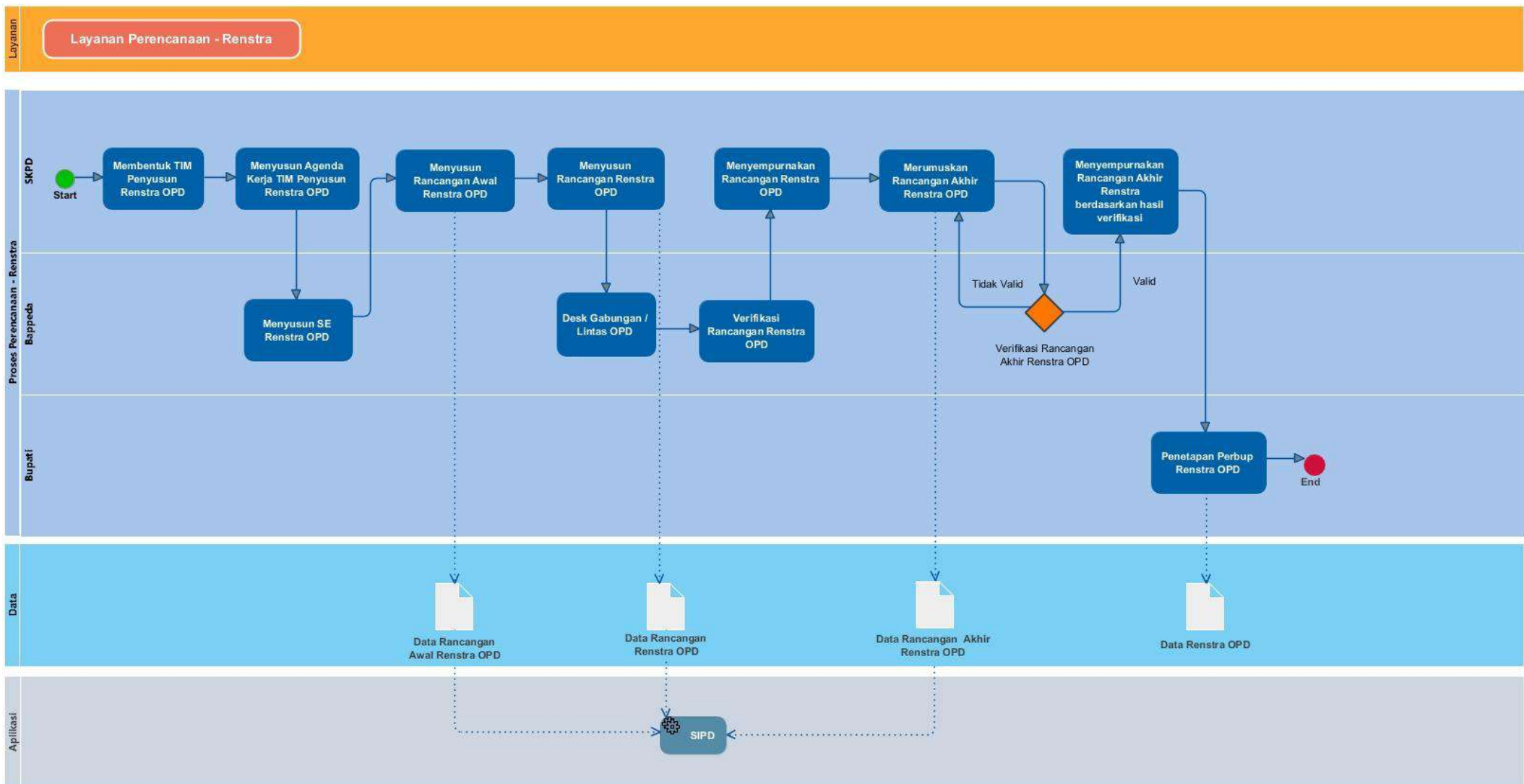
No.	Deskripsi	Uraian
1	Domain Layanan	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan
2	Area Layanan	RAL.02.01 Perencanaan dan Program
3	Kategori Layanan	RAL.02.01.01 Layanan Penyusunan Dokumen RPJMD RAL.02.01.02 Layanan Penyusunan Dokumen Renstra RAL.02.01.03 Layanan Penyusunan Dokumen RKPD

Bappeda memiliki 3 kategori layanan perencanaan yang melibatkan beberapa user seperti pada perencanaan RPJMD terdapat Bappeda/TAPD, SKPD terkait, DPR/Masyarakat, Gubernur, dan Bupati. Kemudian untuk Layanan Renstra terdapat SKPD Tapin, Bappeda, dan Bupati sebagai user. Yang terakhir adalah untuk layanan RKPD terdapat Bappeda, Kecamatan, SKPD Tapin, Bupati, dan Gubernur sebagai user. Pada layanan perencanaan terdapat beberapa Aplikasi yang digunakan seperti SIKD dan SIPD.

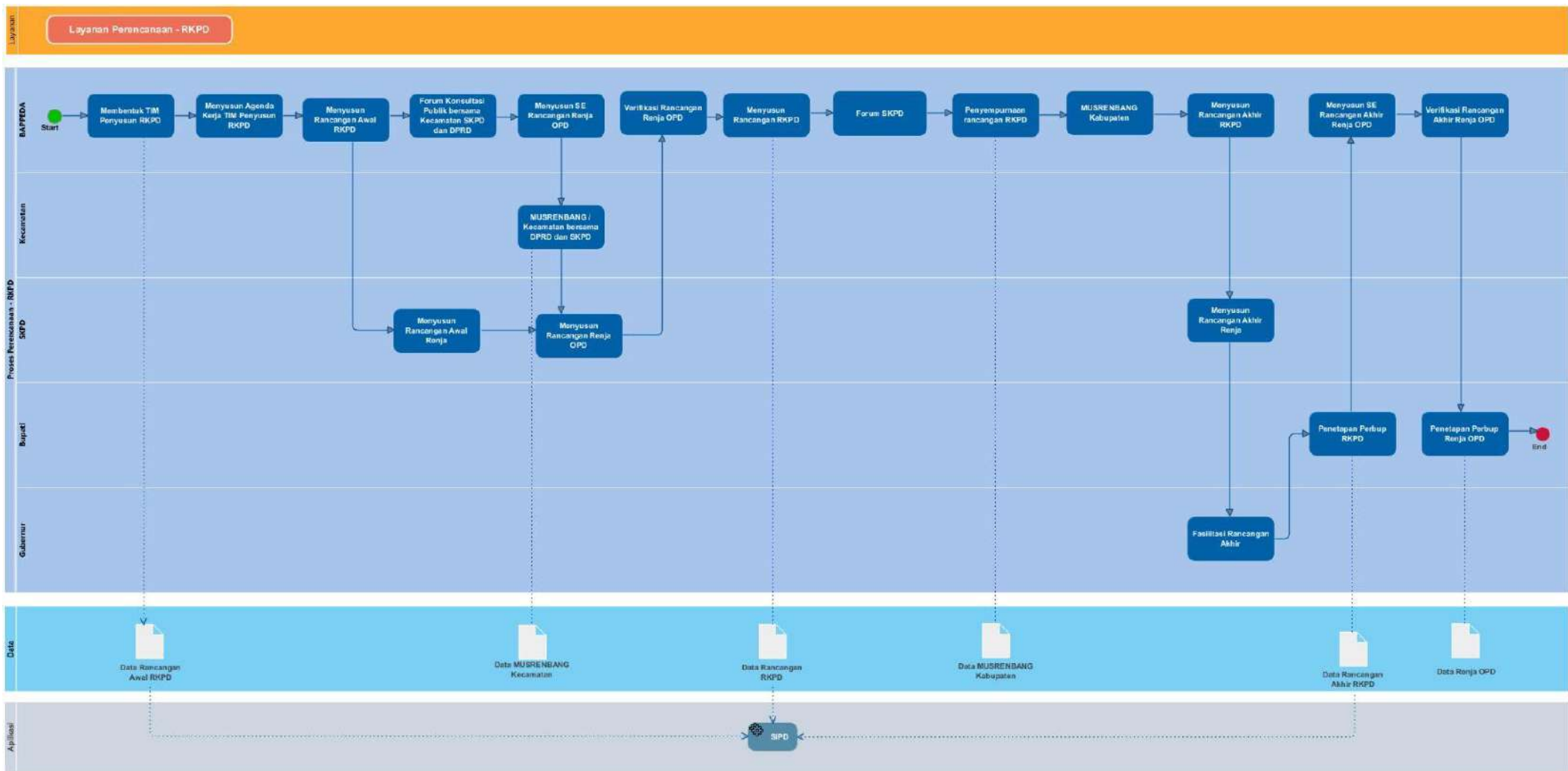




Gambar 3.4.1 RAL.02.01.01 Layanan Penyusunan Dokumen RPJMD



Gambar 3.4.2 RAL.02.01.02 Layanan Penyusunan Dokumen Renstra



Gambar 3.4.3 RAL.02.01.03 Layanan Penyusunan Dokumen RKPD

## 2. Layanan Penganggaran

Dalam menunjang layanan penganggaran diampu oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) mempunyai tugas penunjang urusan pemerintahan Bidang Keuangan sub fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan Daerah.

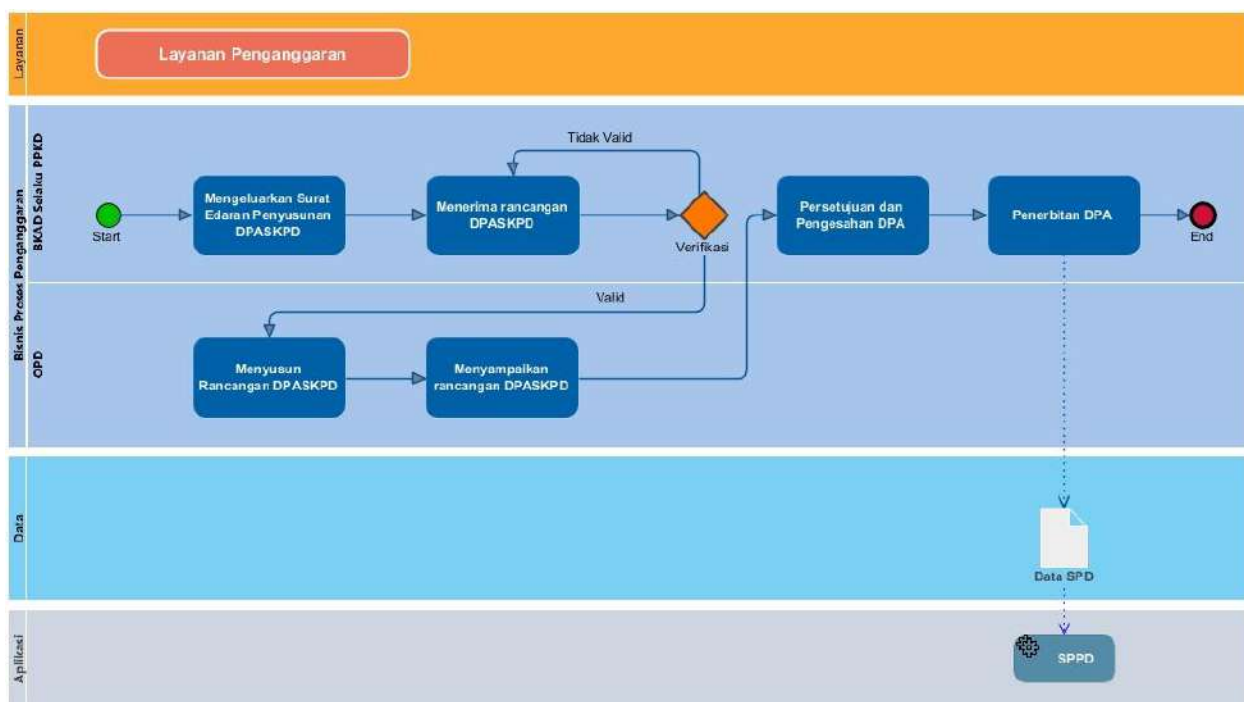
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana, BKAD melaksanakan fungsi:

- a) Penyusunan kebijakan teknis di Bidang Anggaran;
- b) Pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Anggaran;
- c) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Anggaran; dan
- d) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Anggaran.

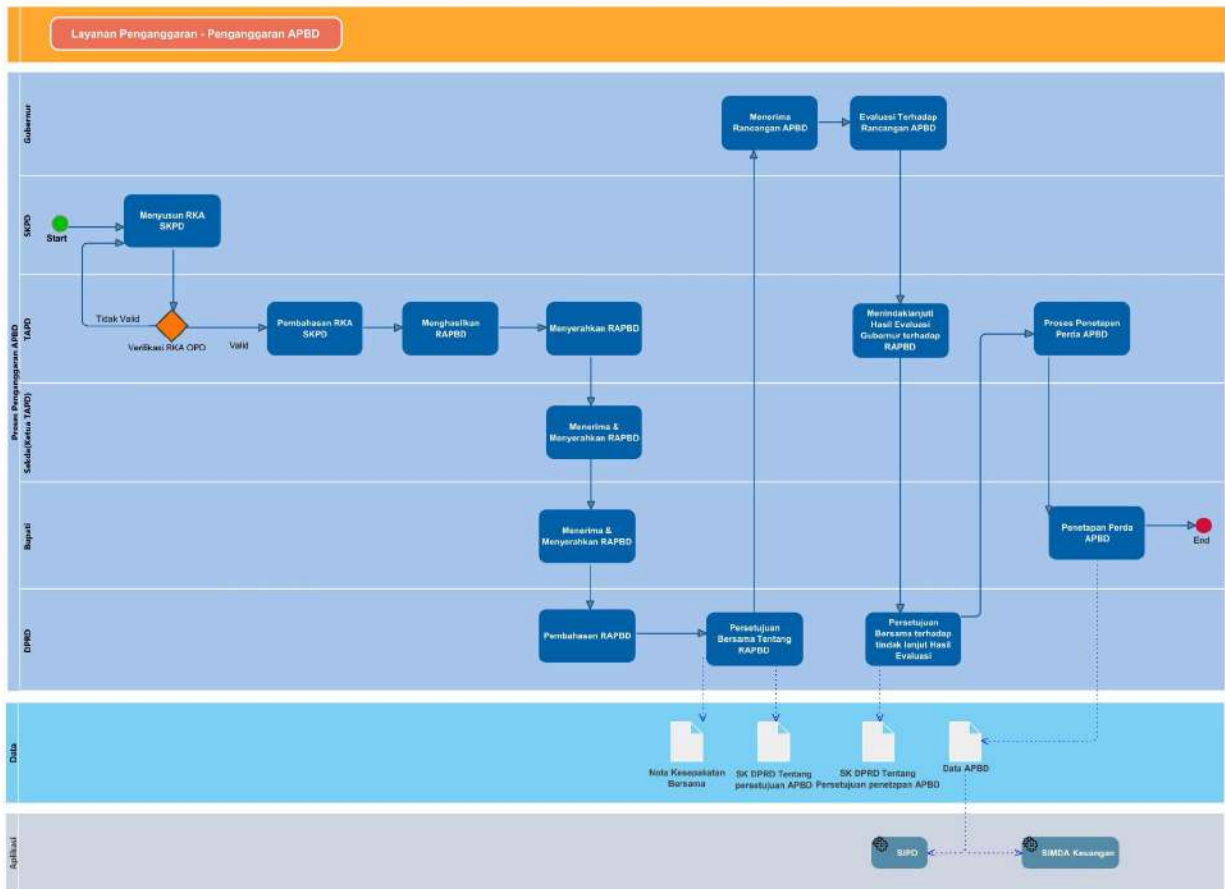
Adapun berdasarkan fungsinya maka layanan penganggaran yang terdapat di BKAD adalah

No.	Deskripsi	Uraian
1	Domain Layanan	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan
2	Area Layanan	RAL.02.02 Keuangan
3	Kategori Layanan	RAL.02.02.01 Layanan Penganggaran RAL.02.02.02 Layanan Perencanaan APBD RAL.02.02.03 Layanan Penganggaran APBD

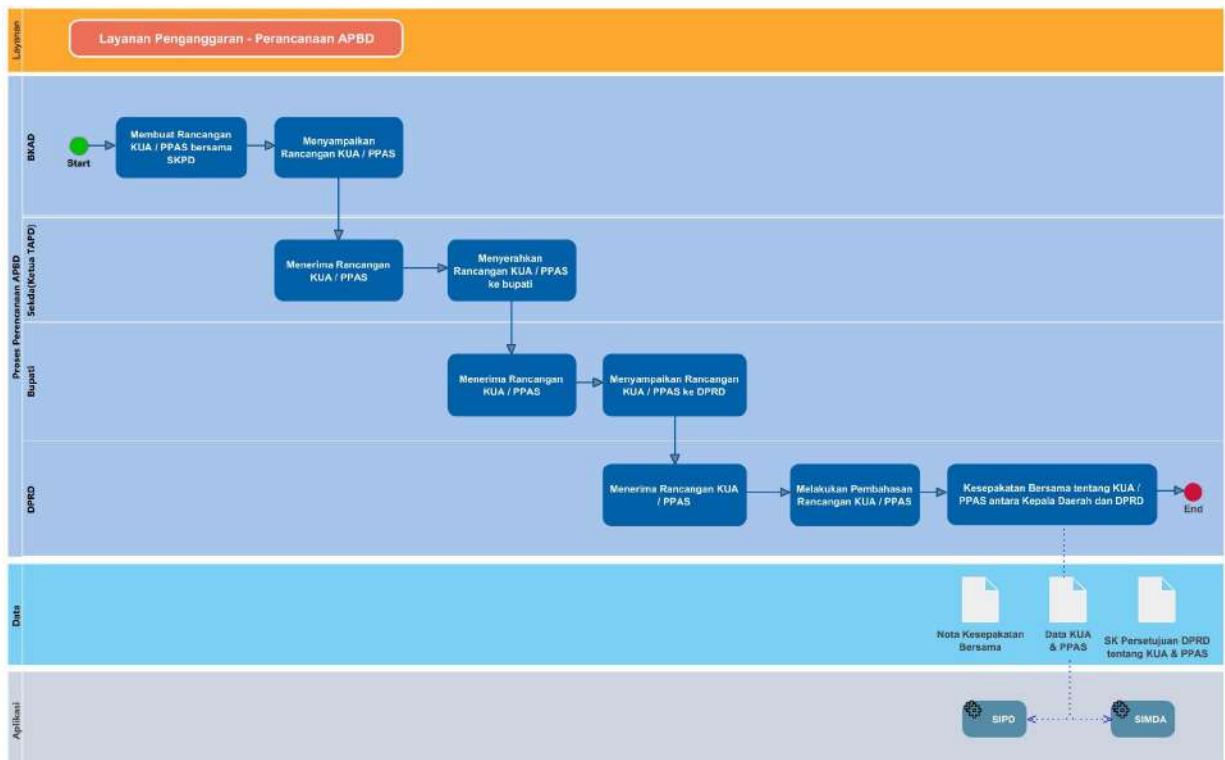
Badan Keuangan Dan Aset Daerah memiliki 3 kategori layanan penganggaran yaitu layanan penganggaran, perencanaan APBD, Penganggaran APBD yang melibatkan BKAD, SKPD, Sekda, Bupati, DPRD, Gubernur, TAPD. Pada layanan penganggaran ini terdapat beberapa Aplikasi yang digunakan Seperti SPPD pada layanan penganggaran kemudian SIPD dan SIMDA untuk layanan perencanaan dan penganggaran APBD .



Gambar 3.4.5 RAL.02.02.01 Layanan Penganggaran



Gambar 3.4.6 RAL.02.02.02 Layanan Penganggaran APBD



Gambar 3.4.5 RAL.02.02.01 Layanan Perencanaan APBD

### 3. Layanan Keuangan

Dalam menunjang layanan keuangan yang diampu oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) mempunyai tugas fungsi penunjang urusan pemerintahan Bidang Keuangan sub fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan Daerah.

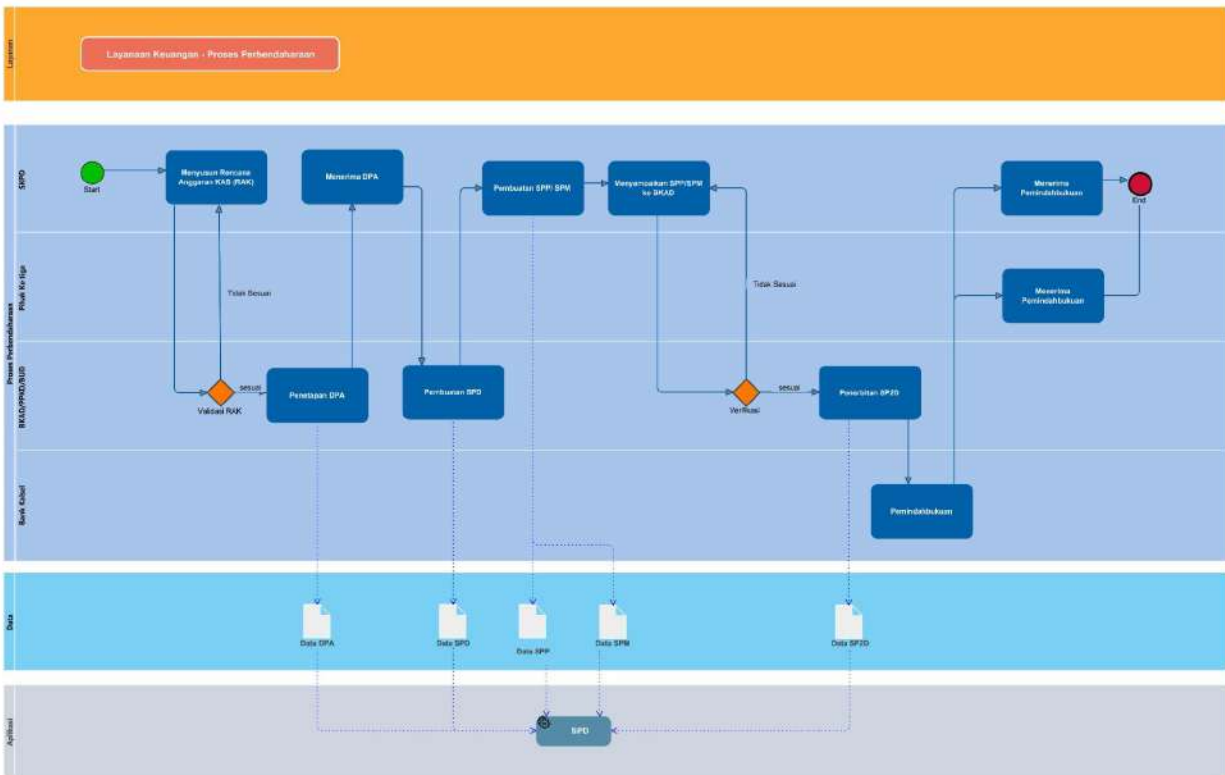
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, BKAD melaksanakan fungsi:

- a) Penyusunan kebijakan teknis di Bidang Akuntansi, Perbendaharaan dan Kas Daerah;
- b) Pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Akuntansi, Perbendaharaan dan Kas Daerah;
- c) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Akuntansi, Perbendaharaan dan Kas Daerah; dan
- d) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Akuntansi, Perbendaharaan dan Kas Daerah.

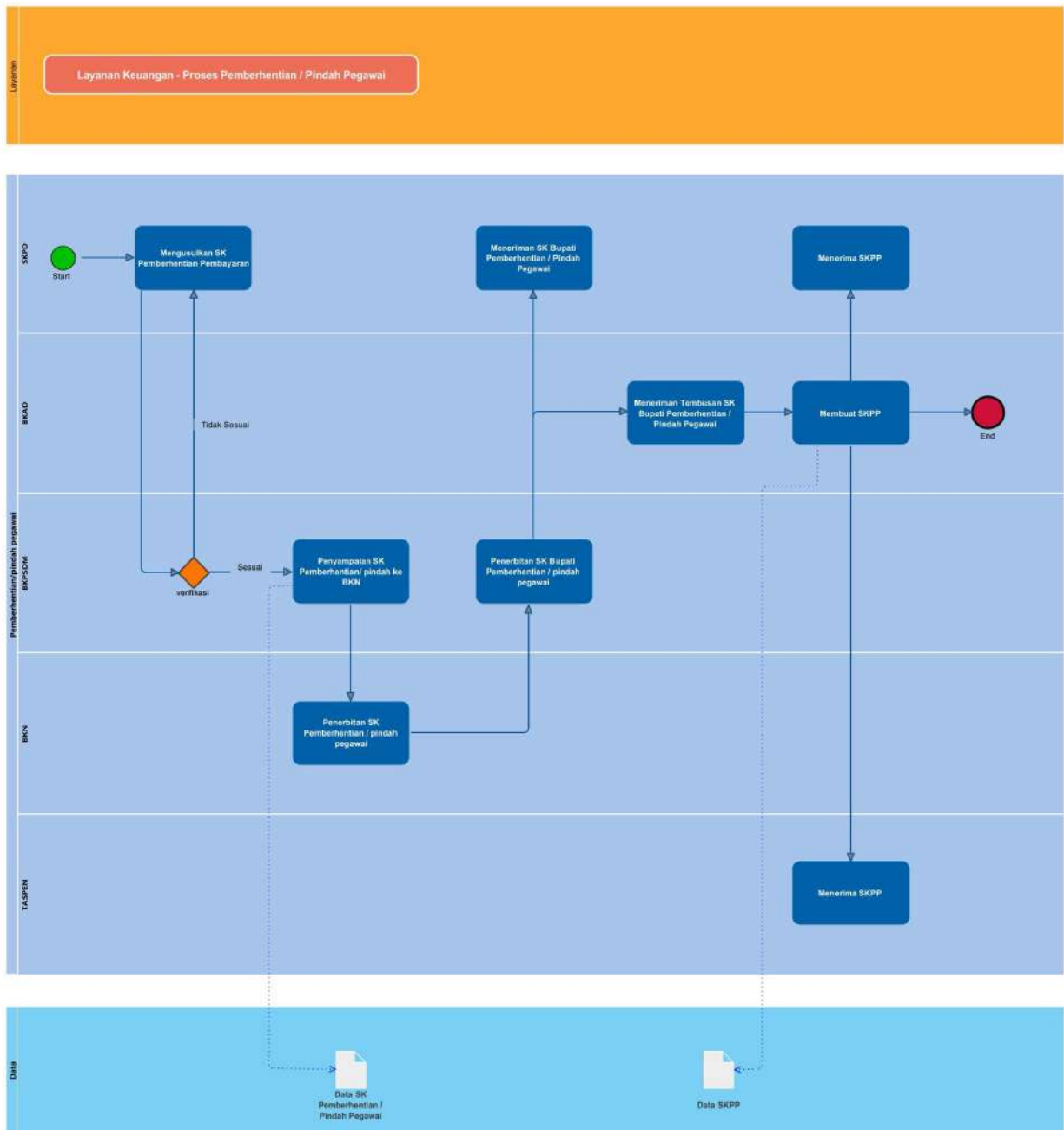
Adapun berdasarkan fungsinya maka layanan keuangan yang terdapat di BKAD adalah

No.	Deskripsi	Uraian
1	Domain Layanan	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan
2	Area Layanan	RAL.02.02 Keuangan
3	Kategori Layanan	RAL.02.02.03 Layanan Akuntansi RAL.02.02.04 Layanan Perbendaharaan

Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah memiliki 2 kategori layanan keuangan yaitu layanan akuntansi dan layanan perbendaharaan yang melibatkan SKPD, BPKD/PPKD, TAPD, Bupati, DPRD, Gubernur untuk layanan akuntansi dan SKPD, Pihak ke-Tiga, BKAD/PPKD, BUD, Bank Kalsel untuk layanan perbendaharaan. Pada layanan keuangan ini Aplikasi yang digunakan adalah Aplikasi SIPD.



Gambar 3.4.7 RAL.02.02.03 Layanan Proses Perbendaharaan



Gambar 3.4.8 RAL.02.02.04 Layanan Proses pemberhentian/pindah pegawai





#### 4. Layanan Pengelolaan Aset

Dalam menunjang layanan pengelolaan aset yang diampu oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) yang mempunyai tugas fungsi penunjang urusan pemerintahan Bidang Keuangan sub fungsi pengelolaan aset daerah yang menjadi kewenangan Daerah.

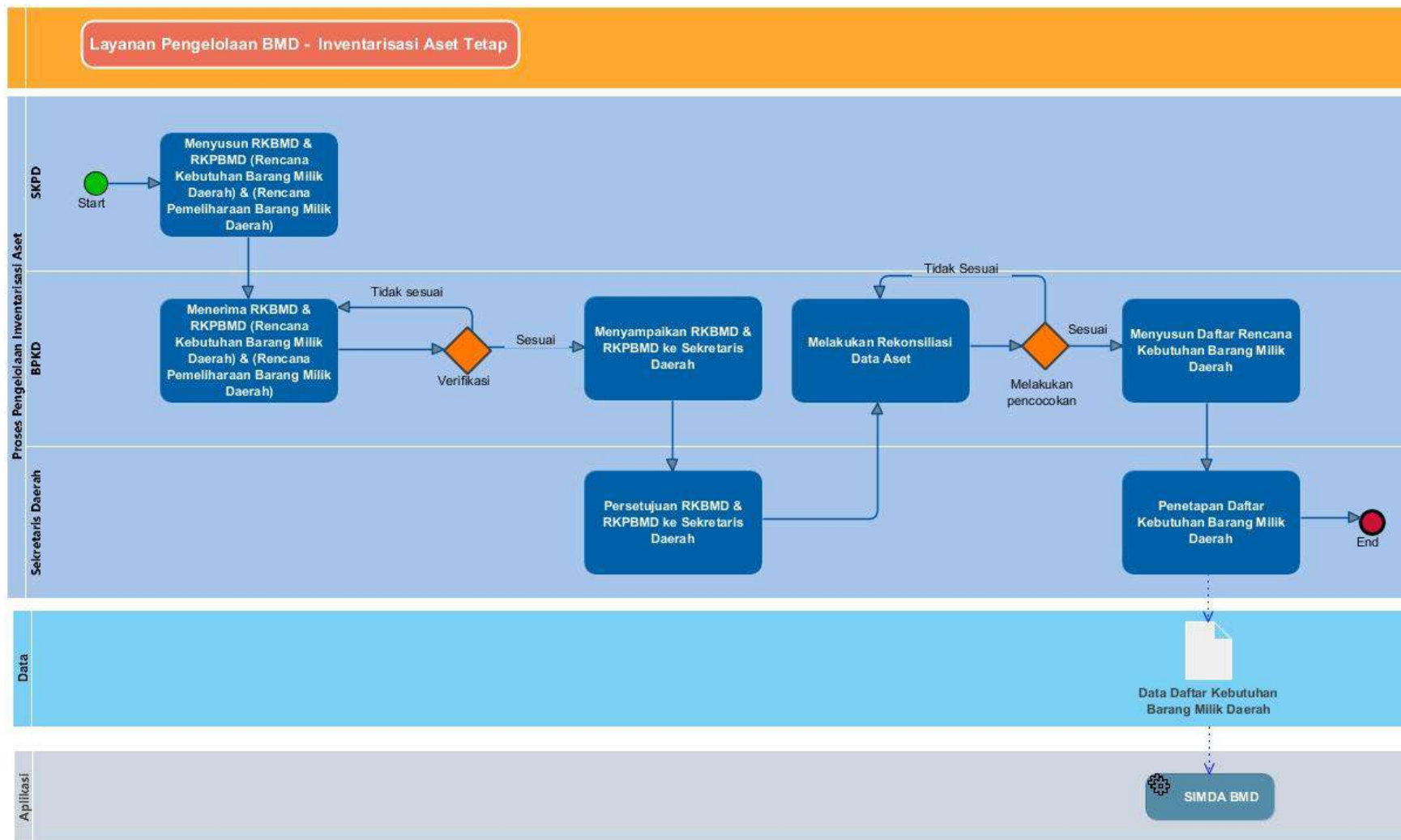
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, BKAD melaksanakan fungsi:

- a) Penyusunan kebijakan teknis di Bidang Aset Daerah;
- b) Pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Aset Daerah;
- c) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Aset Daerah; dan
- d) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Aset Daerah.

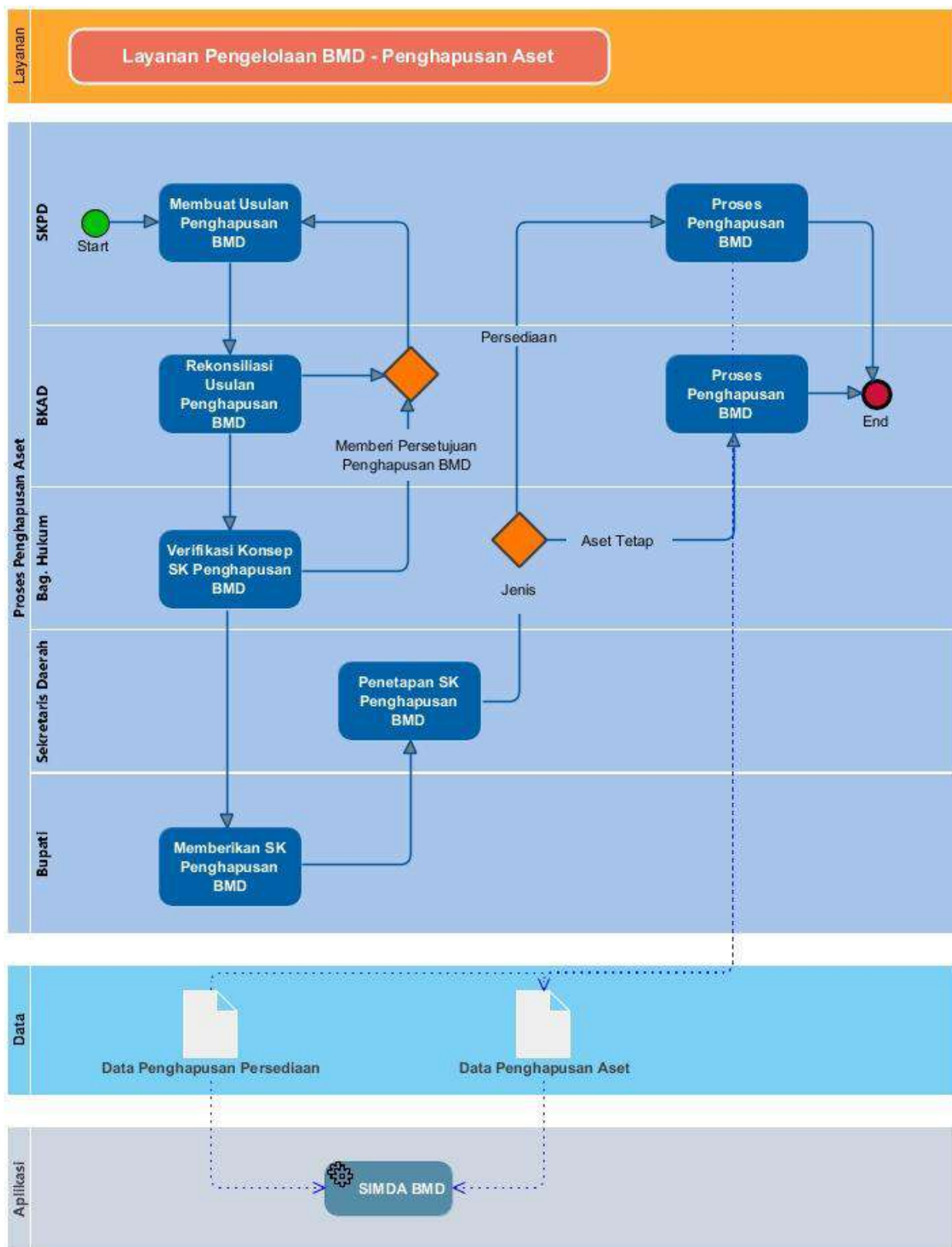
Adapun berdasarkan fungsinya maka layanan pengelolaan aset yang terdapat di BKAD adalah

No.	Deskripsi	Uraian
1	Domain Layanan	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan
2	Area Layanan	RAL.02.07 Dukungan Umum Organisasi
3	Kategori Layanan	RAL.02.07.01 Layanan Pelaporan BMD RAL.02.07.01 Layanan Pengelolaan Aset RAL.02.07.01 Layanan Penghapusan Aset

Badan Keuangan Dan Aset Daerah memiliki 3 kategori layanan pengelolaan aset yaitu Inventaris aset tetap, Penghapusan aset, dan pelaporan BMD yang melibatkan SKPD, BPKD, sekretariat Daerah, BKAD, Bag. Hukum, dan Bupati. Pada layanan pengelolaan aset ini Aplikasi yang digunakan adalah SIMDA BMD.



Gambar 3.4.11 RAL.02.07.01 Layanan Inventaris Aset Tetap



Gambar 3.4.12 RAL.02.07.01 Layanan Penghapusan Aset



## 5. Layanan Kepegawaian

Dalam menunjang layanan kepegawaian yang diampu oleh Badan Kepegawaian, dan Pengembangan SDM (BKPSDM) mempunyai tugas pokok fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang kepegawaian yang menjadi kewenangan daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tapin mempunyai fungsi sebagai berikut :

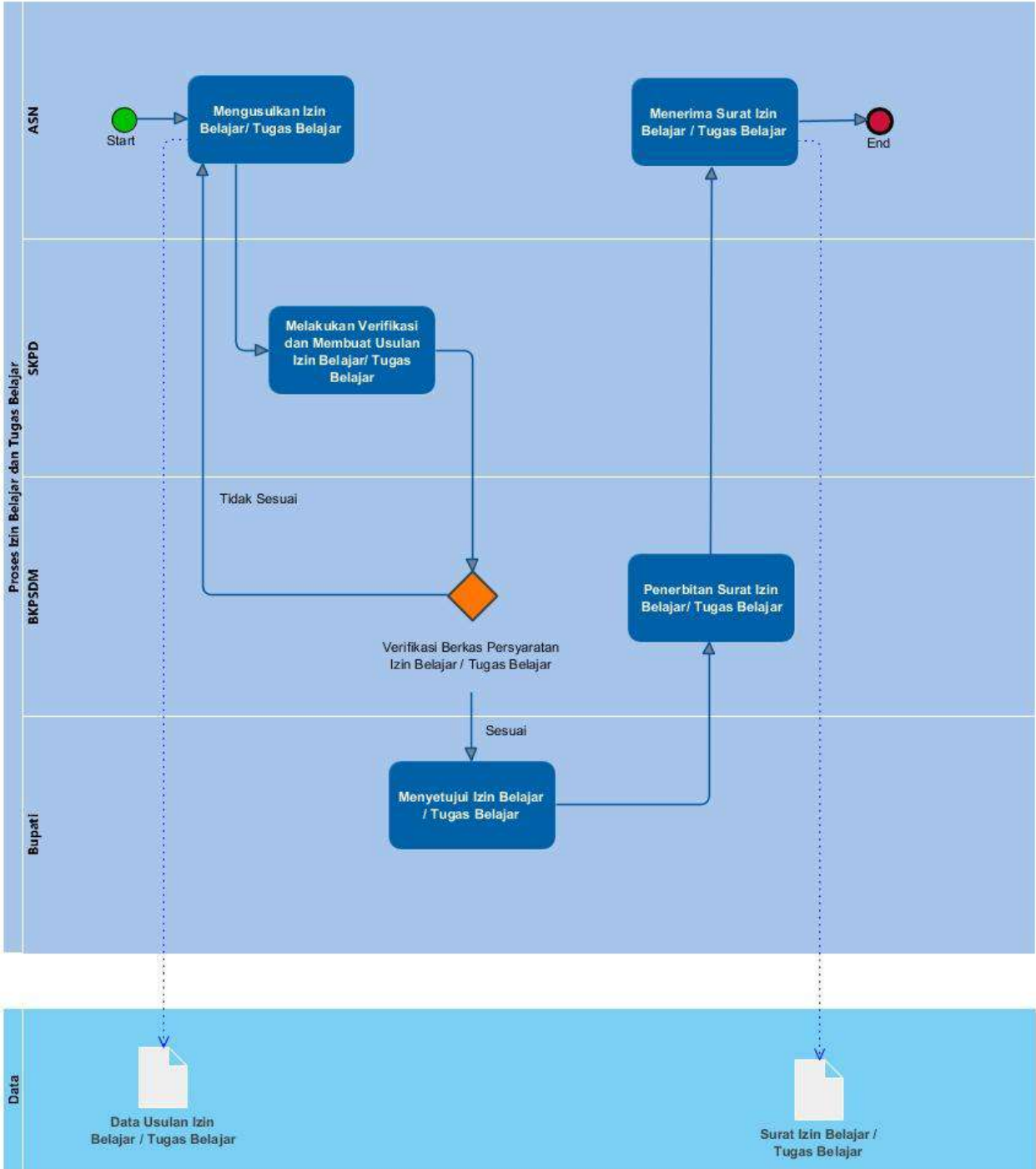
- a) penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pengembangan pegawai, mutasi, pembinaan dan kesejahteraan pegawai, dan informasi kepegawaian;
- b) pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan dan pengembangan pegawai, mutasi, pembinaan dan kesejahteraan pegawai dan informasi kepegawaian;
- c) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan dan pengembangan pegawai, mutasi, pembinaan dan kesejahteraan pegawai, dan informasi kepegawaian; dan
- d) pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah di bidang perencanaan dan pengembangan pegawai, mutasi, pembinaan dan kesejahteraan pegawai dan informasi kepegawaian.

Adapun berdasarkan fungsinya maka layanan kepegawaian yang terdapat di BKPSDM adalah

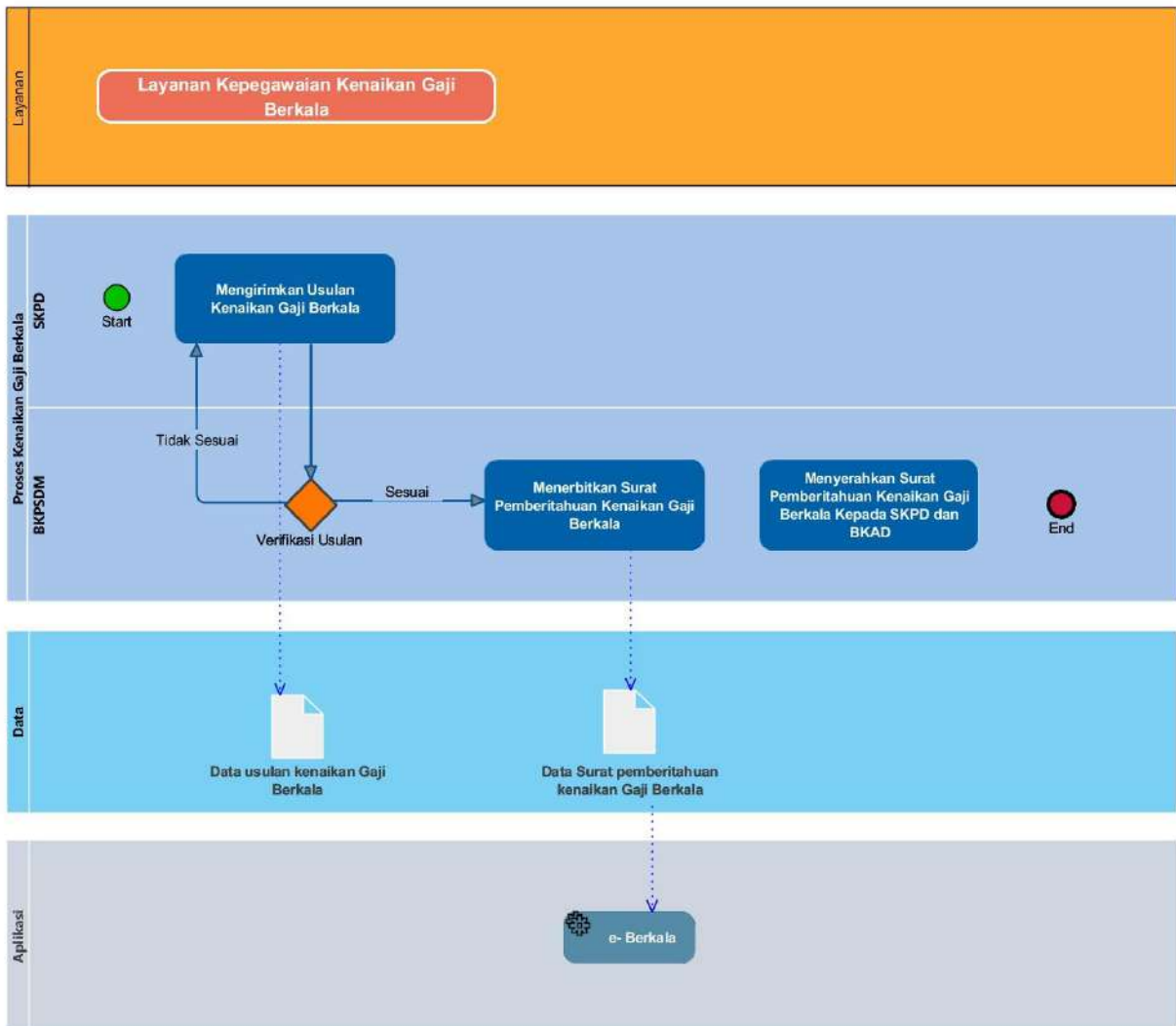
No.	Deskripsi	Uraian
1	Domain Layanan	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan
2	Area Layanan	RAL.02.04 Sumber Daya Manusia
3	Kategori Layanan	RAL.02.04.01 Layanan Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan SDM RAL.02.04.02 Layanan Kenaikan Pangkat dan Jabatan RAL.02.04.03 Layanan Terpadu Satu Pintu RAL.02.04.03 Layanan Promosi dan Pola Karir RAL.02.04.03 Layanan Pengusulan Pensiun RAL.02.04.03 Layanan Kenaikan Gaji Berkala RAL.02.04.03 Layanan Izin Belajar dan Tugas Belajar

Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM memiliki 7 kategori layanan kepegawaian yang melibatkan SKPD, BKPDSDM, Bag. Organisasi, BKN, Kemenpan RB, Bupati, Masyarakat, dan ASN. Terdapat beberapa aplikasi yang digunakan dalam layanan kepegawaian milik kab Tapin diantaranya adalah e-Formasi, SSCASN, dan SAPK yang digunakan pada layanan penyusunan dan penetapan kebutuhan SDM. kemudian Doku Digital dan SAPK BKN pada layanan kepegawaian pangkat dan Golongan dan proses pengusulan pegawai. dan yang terakhir e-berkala yang digunakan pada layanan kepegawaian kenaikan gaji berkala.

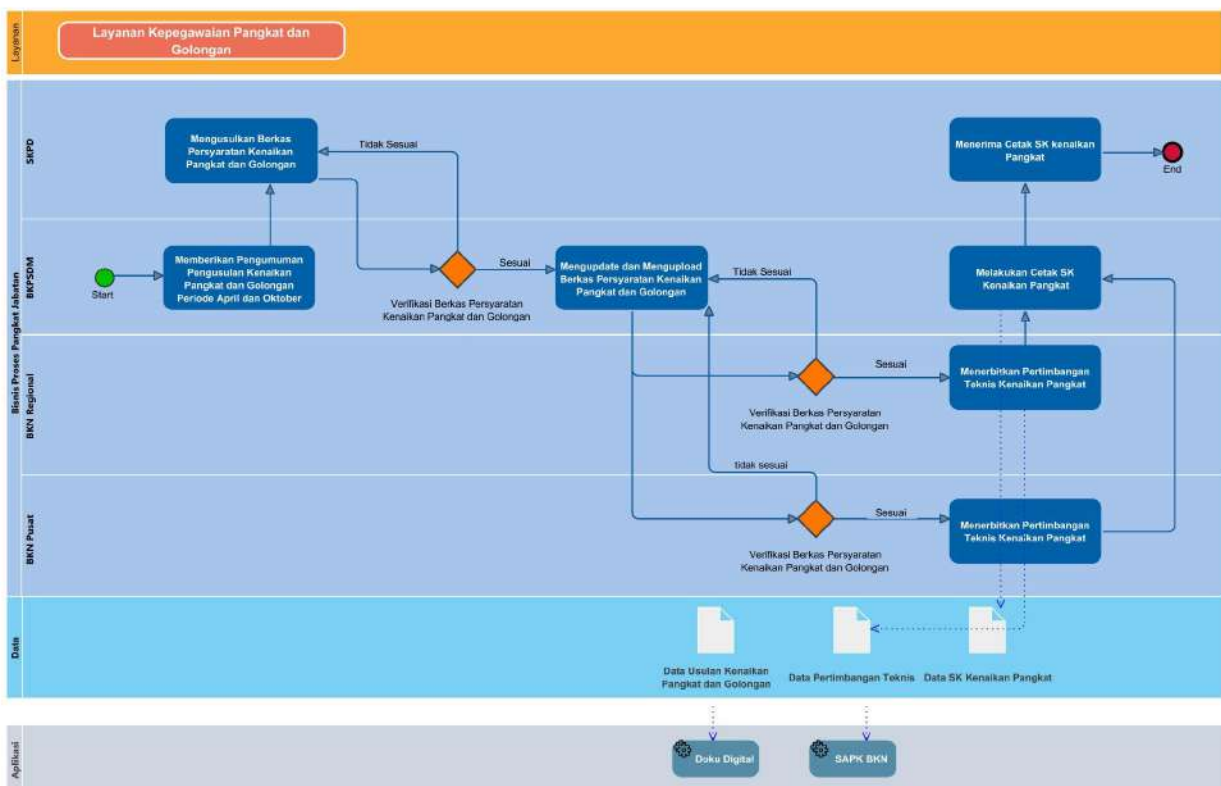
Layanan  
**Layanan Kepegawaian - Izin Belajar dan Tugas Belajar**



Gambar 3.4.14 RAL.02.04.01 Layanan Izin Belajar dan Tugas Belajar



Gambar 3.4.15 RAL.02.04.01 Layanan Kenaikan Gaji Berkala

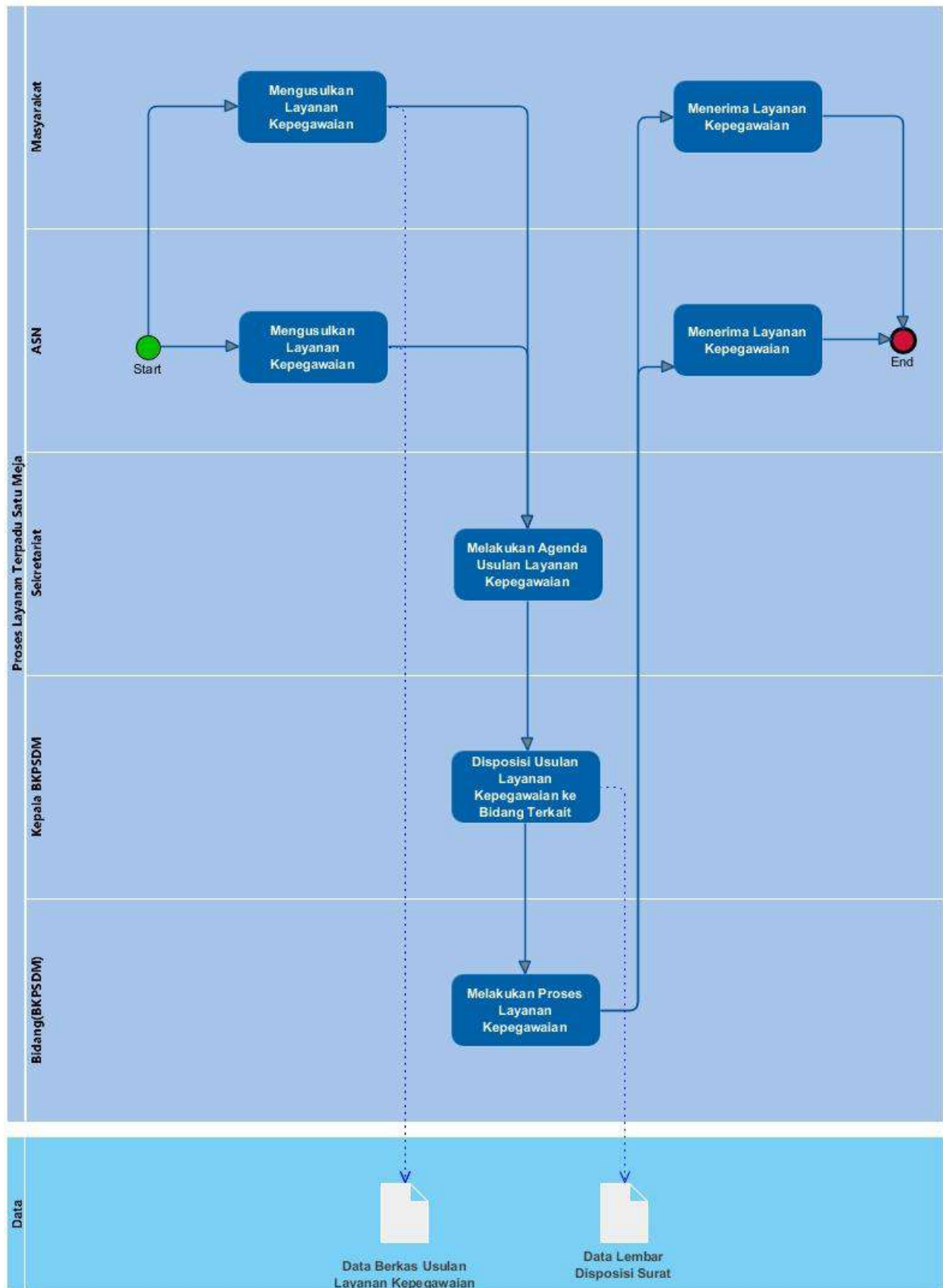


Gambar 3.4.16 RAL.02.04.01 Layanan Pangkat dan Golongan

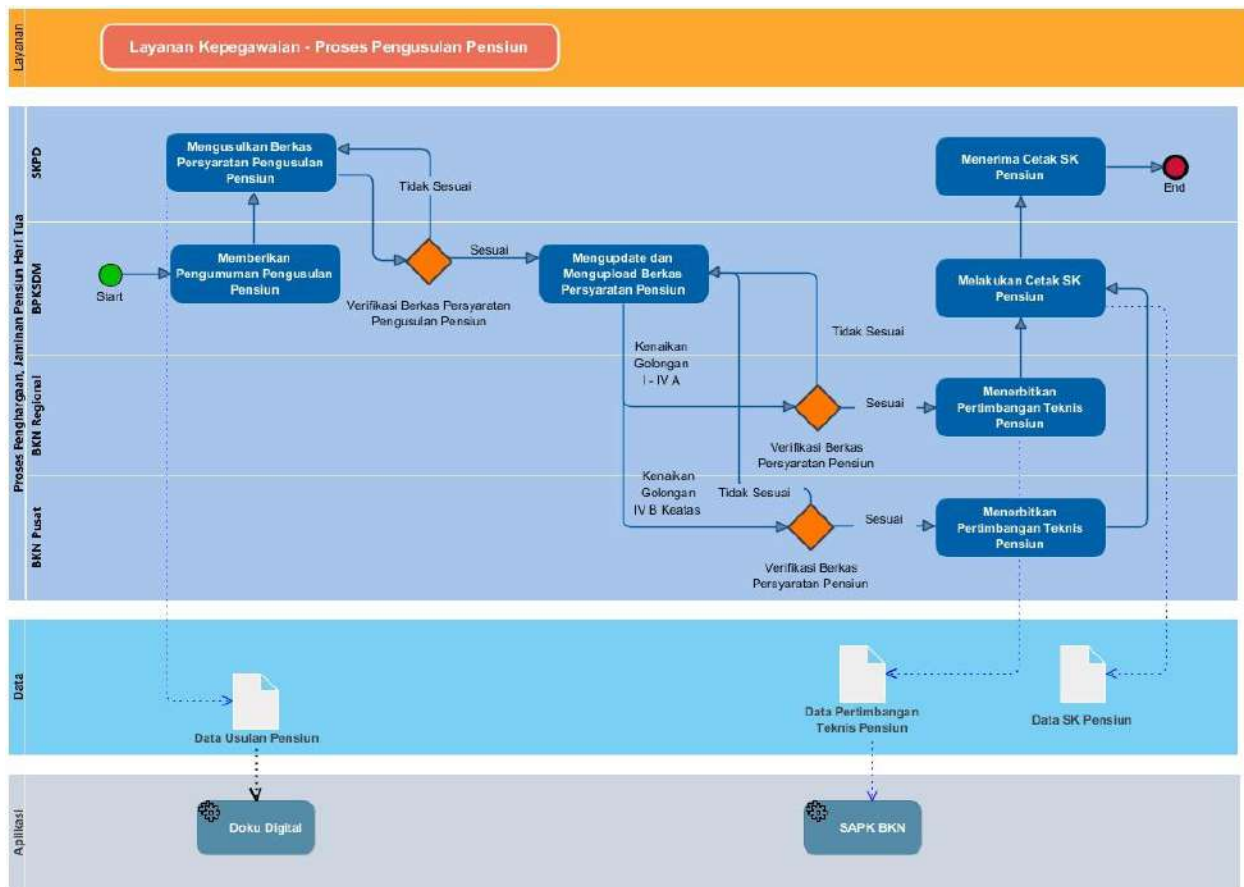


Layanan

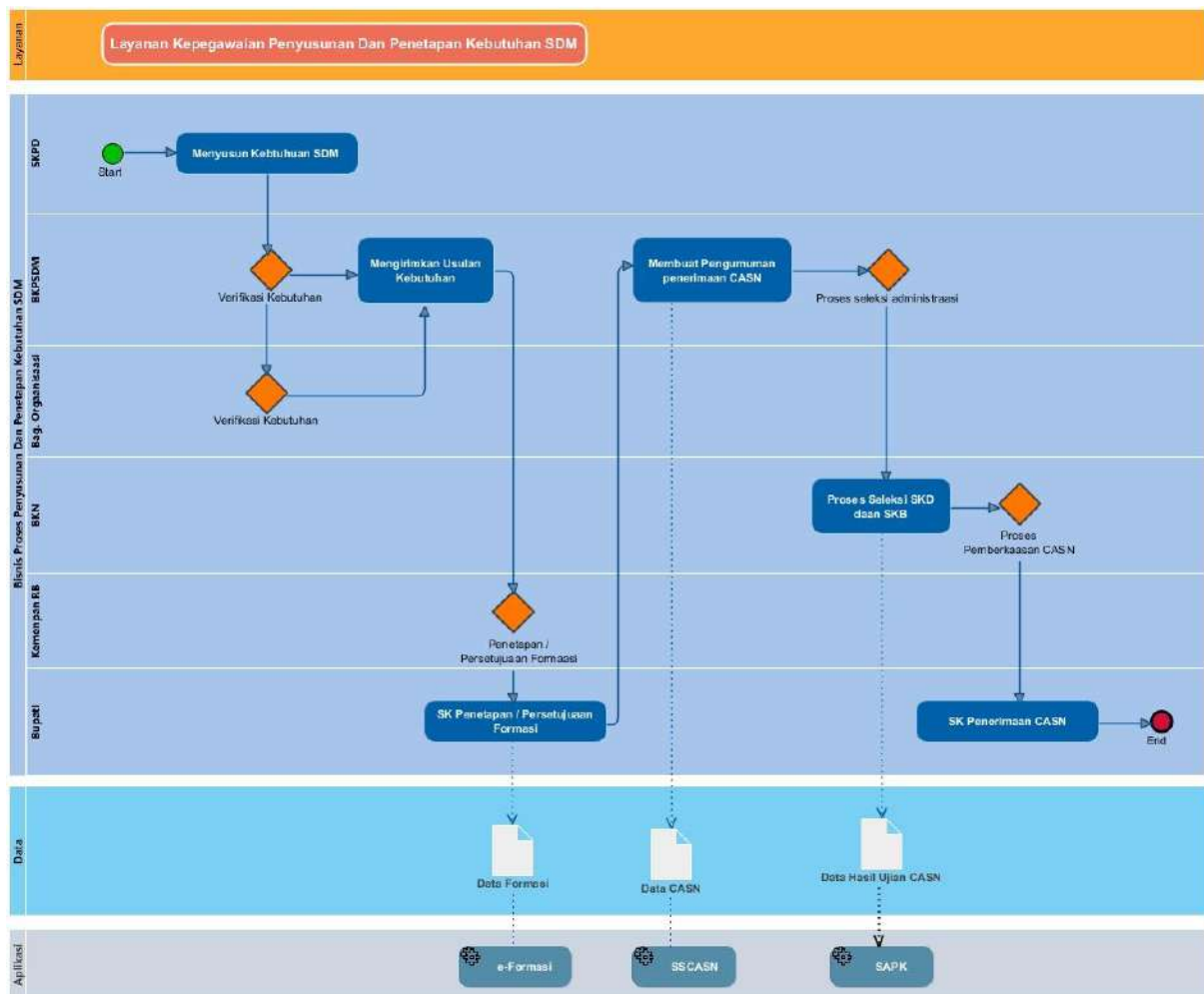
**Layanan Kepegawaian Pelayanan Terpadu Satu Pintu**



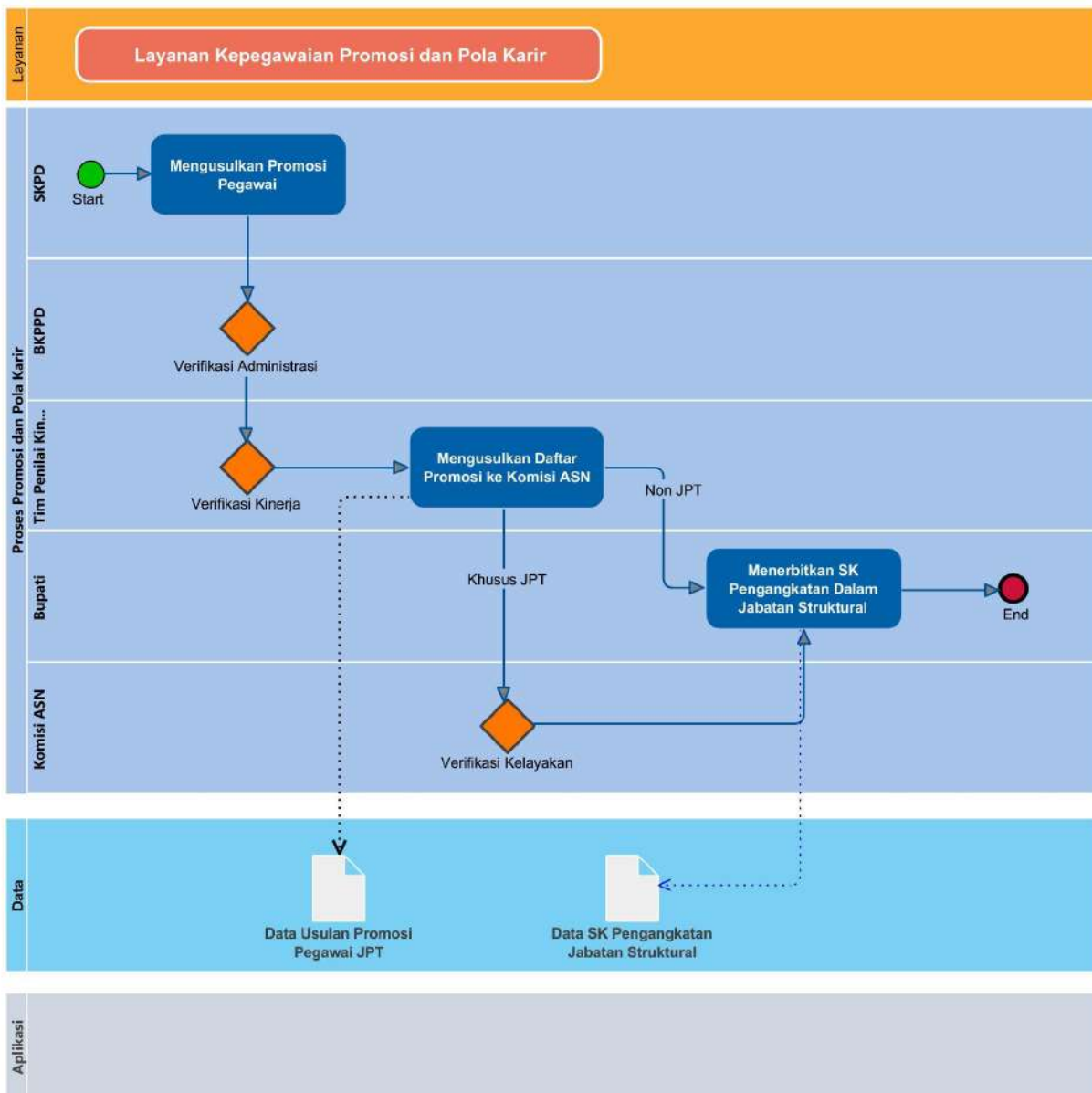
Gambar 3.4.17 RAL.02.04.01 Layanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Gambar 3.4.18 RAL.02.04.01 Layanan Pengusulan Pensiun



Gambar 3.4.19 RAL.02.04.01 Layanan Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan SDM



Gambar 3.4.20 RAL.02.04.01 Layanan Promosi dan Pola Karir

## 6. Layanan Kinerja Pegawai

Dalam menunjang layanan Kinerja Pegawai yang diampu oleh Badan Kepegawaian, dan Pengembangan SDM (BKPSDM) mempunyai tugas pokok fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang kepegawaian yang menjadi kewenangan daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Badan Kepegawaian, dan Pengembangan SDM (BKPSDM) Kabupaten Tapin mempunyai fungsi sebagai berikut :

- penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pengembangan pegawai, mutasi, pembinaan dan kesejahteraan pegawai, dan informasi kepegawaian;
- pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan dan pengembangan pegawai, mutasi, pembinaan dan kesejahteraan pegawai dan informasi kepegawaian;
- pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan dan pengembangan pegawai, mutasi, pembinaan dan kesejahteraan pegawai, dan informasi kepegawaian; dan

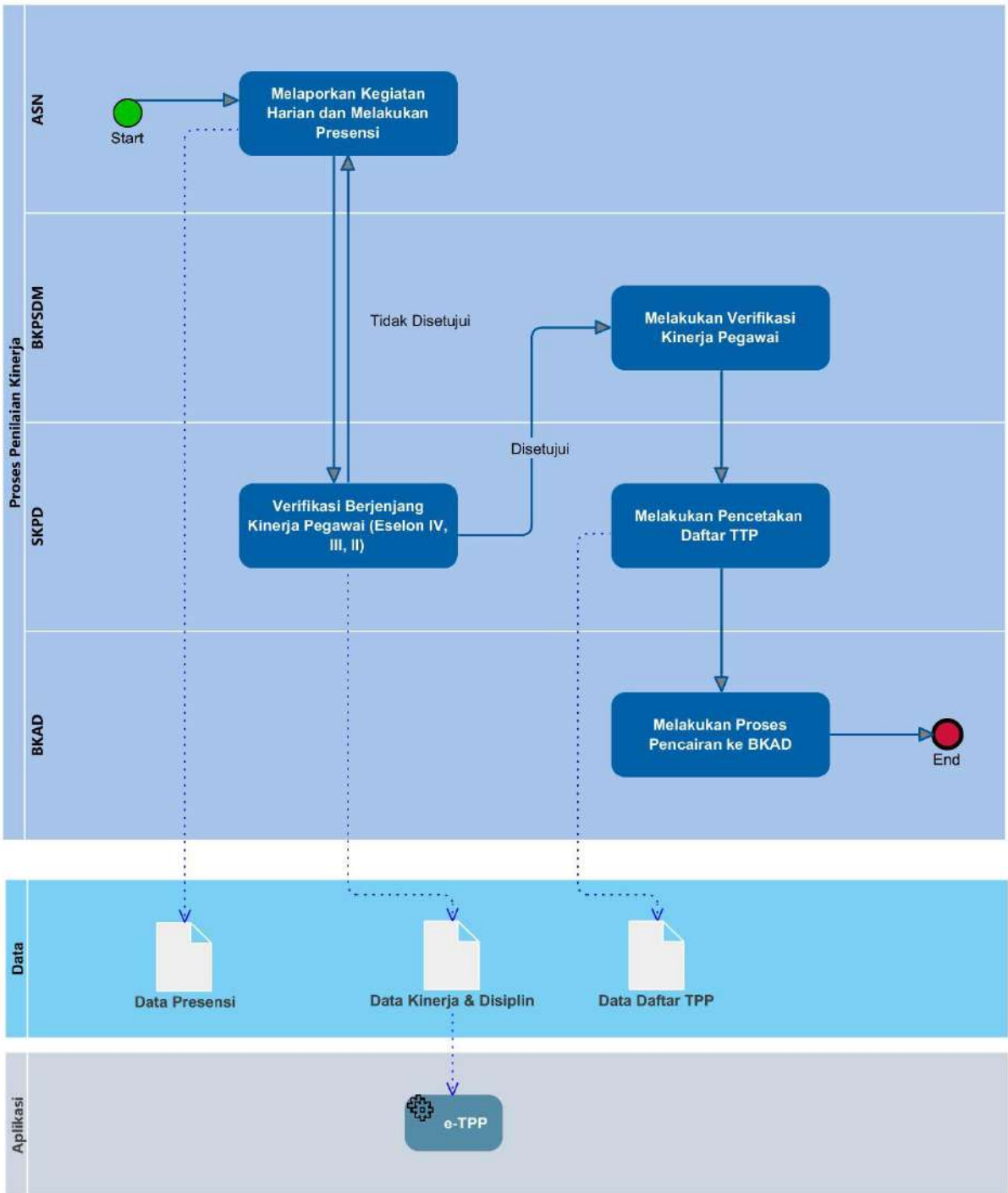
- d) pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah di bidang perencanaan dan pengembangan pegawai, mutasi, pembinaan dan kesejahteraan pegawai dan informasi kepegawaian.

Adapun berdasarkan fungsinya maka layanan kepegawaian yang terdapat di BKPSDM adalah

No.	Deskripsi	Uraian
1	Domain Layanan	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan
2	Area Layanan	RAL.02.03 Sumber Daya Manusia
3	Kategori Layanan	RAL.02.04.07 Layanan Proses Kinerja

Badan Kepegawaian, dan Pengembangan SDM (BKPSDM) memiliki 2 kategori layanan kinerja pegawai yang melibatkan ASN, BKPSDM, SKPD, BKAD. Kemudian terdapat aplikasi yang digunakan dalam layanan kinerja pegawai yaitu e-TPP.

Layanan  
**Layanan Kinerja - Proses Penilaian Kinerja**



Gambar 3.4.21 RAL.02.04.07 Layanan Proses Kinerja

## 7. Layanan Kearsipan Dinamis

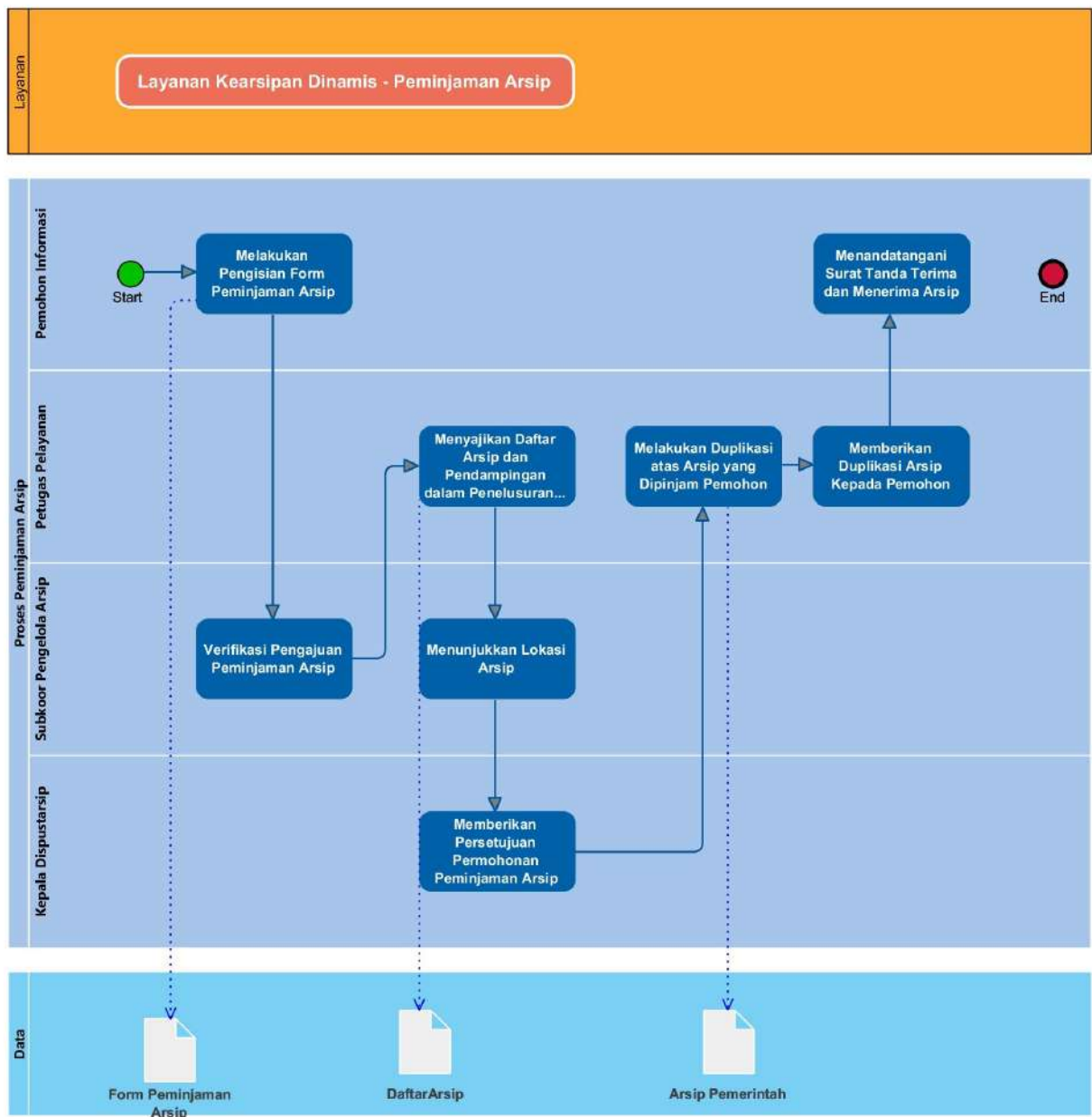
Dalam menunjang layanan kearsipan yang diampu oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai tugas pokok dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kearsipan dan perpustakaan. Untuk melaksanakan tugas pokok Dinas Perpustakaan dan Kearsipan melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a) Perumusan kebijakan teknis bidang kearsipan dan perpustakaan;
- b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kearsipan dan perpustakaan;
- c) Pembinaan, pengembangan dan pengawasan kearsipan, pengelolaan dan pelestarian arsip, layanan dan pemanfaatan arsip, deposit dan pengolahan bahan perpustakaan, pengembangan perpustakaan;
- d) Pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan, pengembangan dan pengawasan kearsipan, pengelolaan dan pelestarian arsip, layanan dan pemanfaatan arsip, deposit dan pengolahan bahan perpustakaan, pengembangan perpustakaan; dan
- e) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pembinaan, pengembangan dan pengawasan kearsipan, pengelolaan dan pelestarian arsip, layanan dan pemanfaatan arsip, deposit dan pengolahan bahan perpustakaan, pengembangan perpustakaan.

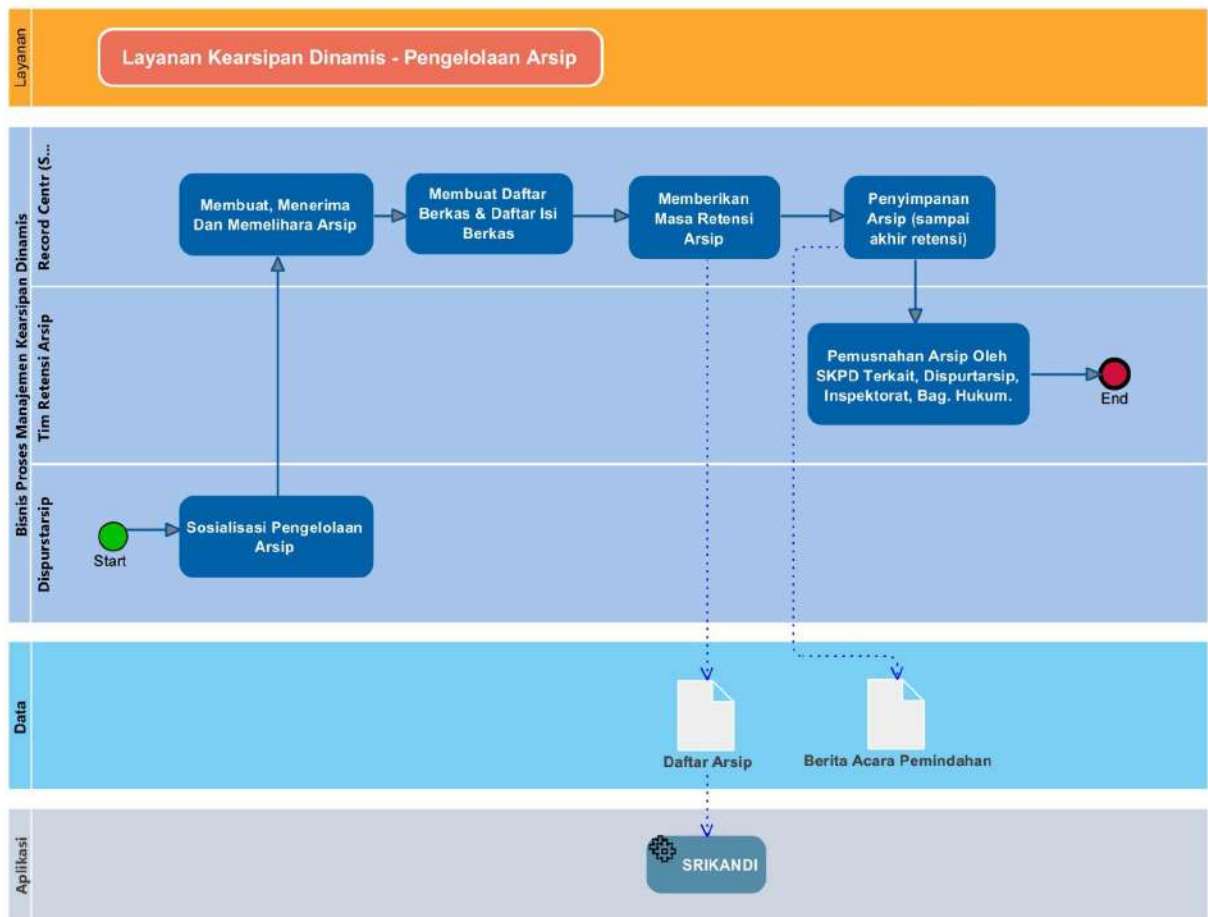
Adapun berdasarkan fungsinya maka layanan kearsipan yang terdapat di Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan adalah

No.	Deskripsi	Uraian
1	Domain Layanan	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan
2	Area Layanan	RAL.02.06 Dukungan Operasional Organisasi
3	Kategori Layanan	RAL.02.06.01 Layanan Peminjaman Arsip RAL.02.06.02 Layanan Pengelolaan Kearsipan RAL.02.06.03 Layanan Manajemen Surat Masuk RAL.02.06.03 Layanan Manajemen Surat Keluar

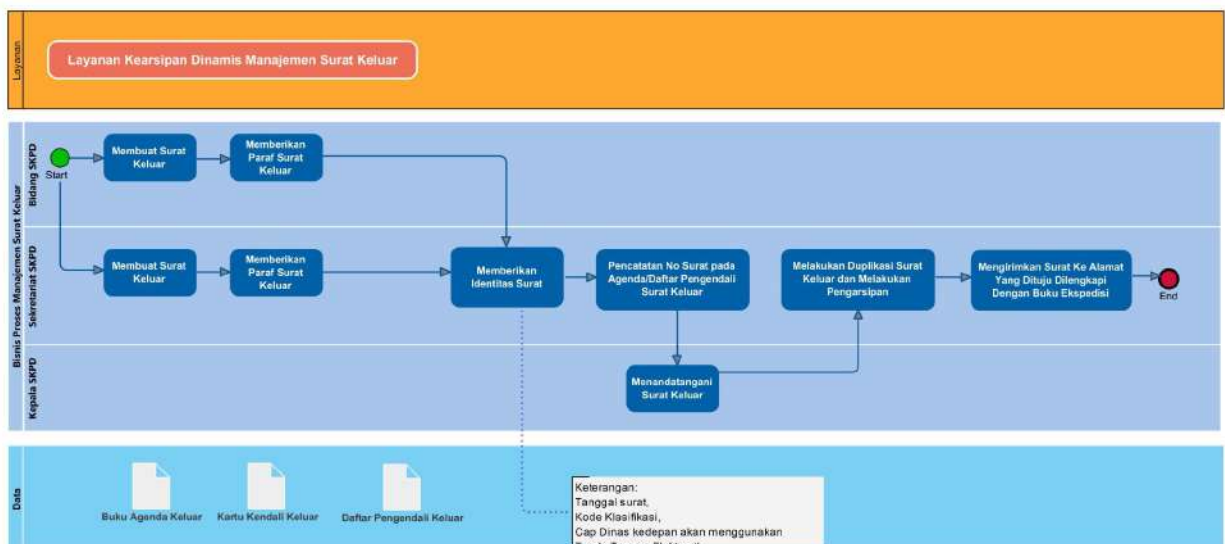
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan memiliki 4 kategori layanan kearsipan yang melibatkan SKPD terkait kab Tapin. Pada layanan kearsipan ini Aplikasi yang digunakan adalah SRIKANDI.



Gambar 3.4.22 RAL.02.06.01 Layanan Peminjaman Arsip

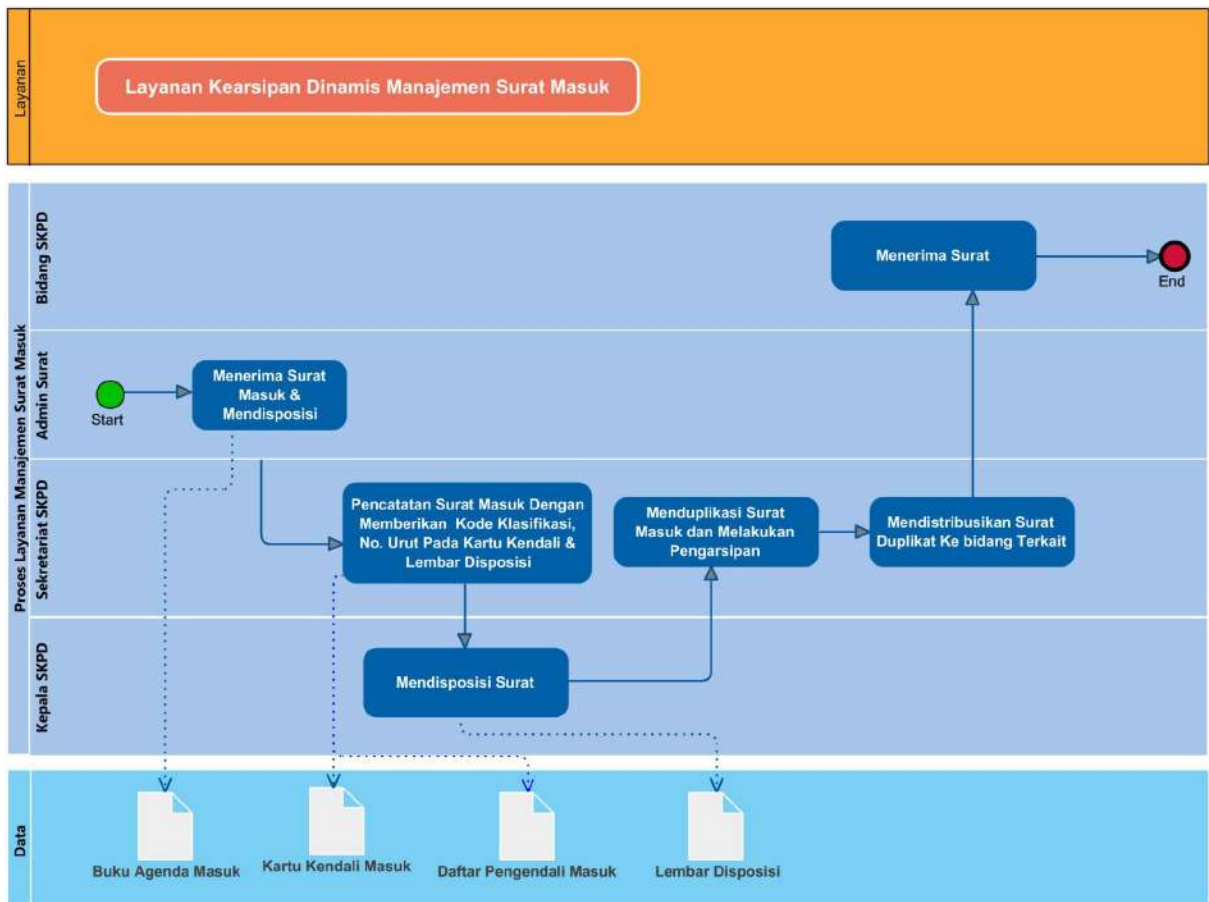


Gambar 3.4.23 RAL.02.06.01 Layanan Pengelolaan Arsip



Gambar 3.4.24 RAL.02.06.01 Layanan Manajemen Surat Keluar





**Gambar 3.4.25** RAL.02.06.01 Layanan Manajemen Surat Masuk

## 8. Layanan Pengawasan Internal Pemerintah

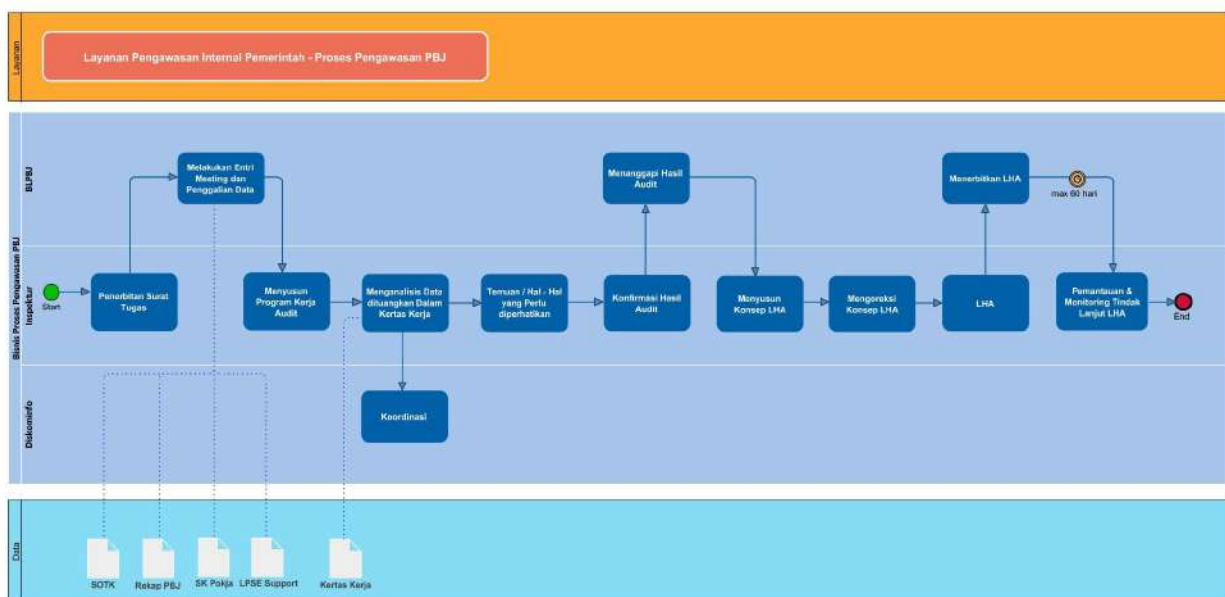
Dalam menunjang layanan pengawasan internal pemerintah (SPIP) yang diampu oleh Inspektorat dengan tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintah Provinsi. Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Inspektorat mempunyai fungsi:

- Perencanaan program pengawasan;
- Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan di bidang Pembangunan, Pemerintahan, dan Kemasyarakatan;
- Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan; dan
- Evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan.

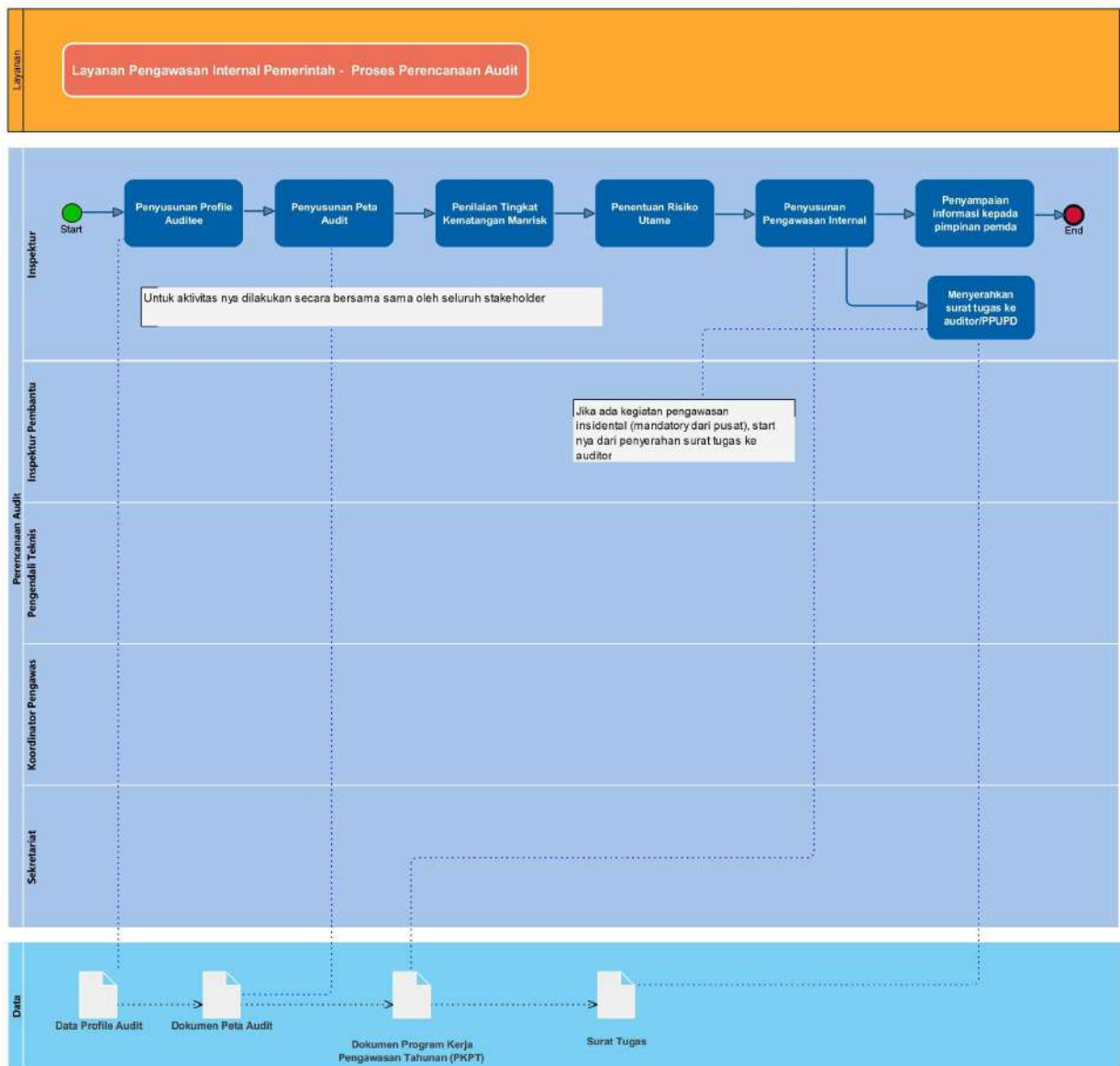
Adapun berdasarkan fungsinya maka layanan SPIP yang terdapat di Inspektorat adalah

No.	Deskripsi	Uraian
1	Domain Layanan	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan
2	Area Layanan	RAL.02.05 Kesekretariatan Negara
3	Kategori Layanan	RAL.02.05.01 Layanan Perencanaan Audit RAL.02.05.03 Layanan Pelaksanaan Audit RAL.02.05.03 Layanan Tindak Lanjut Audit RAL.02.05.03 Layanan Pengawasan PBJ

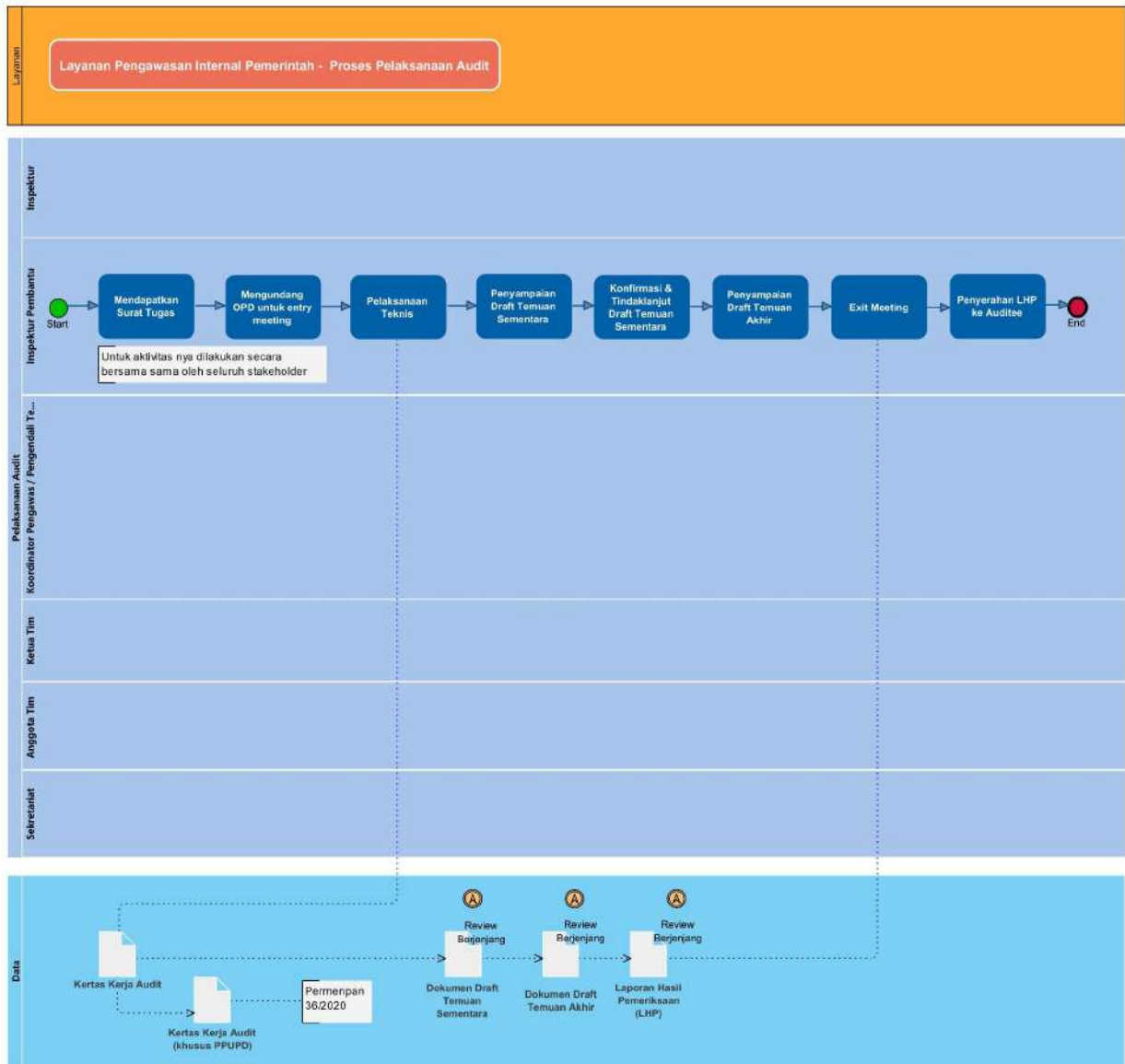
Inspektorat memiliki 5 kategori layanan SPIP yang melibatkan Inspektur, Pengendali Teknis, Ketua, koordinator pengawas, Sekretariat, Tim, Anggota Tim, Auditee .



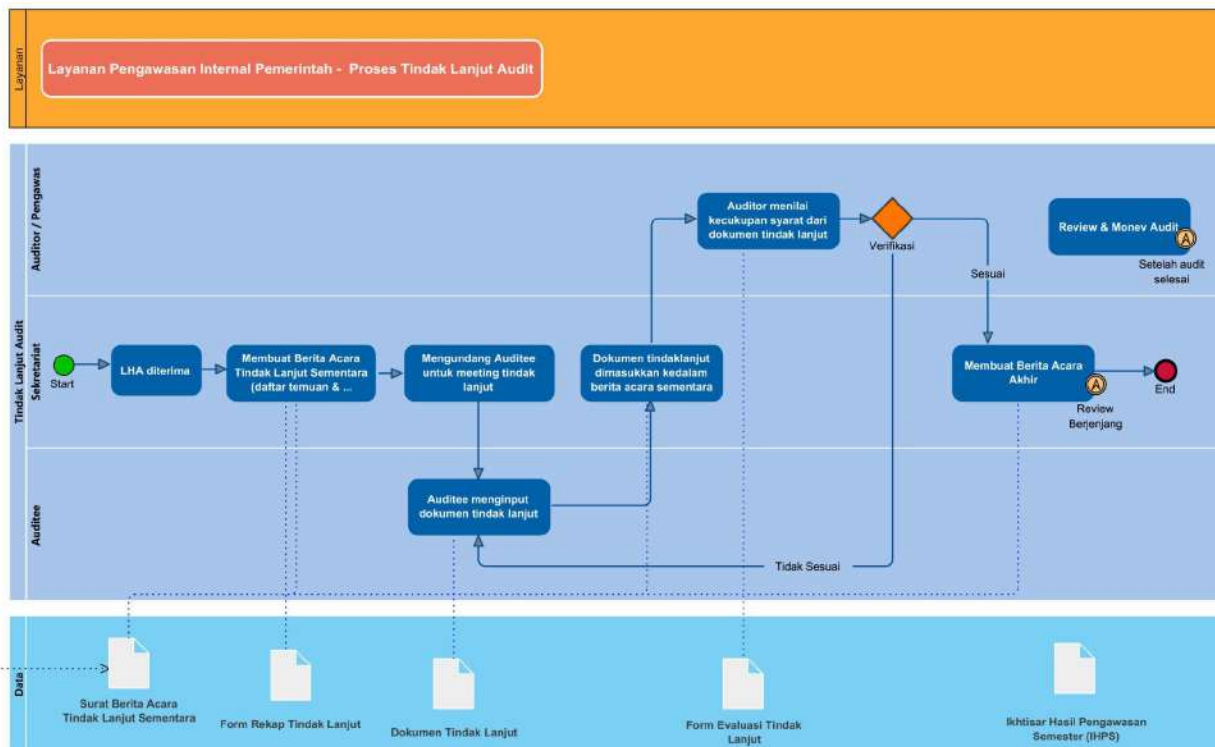
Gambar 3.4.26 RAL.02.05.02 Layanan Pengawasan PBJ



Gambar 3.4.26 RAL.02.05.01 Layanan Perencanaan Audit



**Gambar 3.4.27** RAL.02.05.03 Layanan Pelaksanaan Audit



Gambar 3.4.28 RAL.02.05.04 Layanan Tindak Lanjut Audit

## 9. Layanan Pengaduan Publik

Dalam menunjang layanan pengaduan publik yang diampu oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) mempunyai Tugas untuk melaksanakan Urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

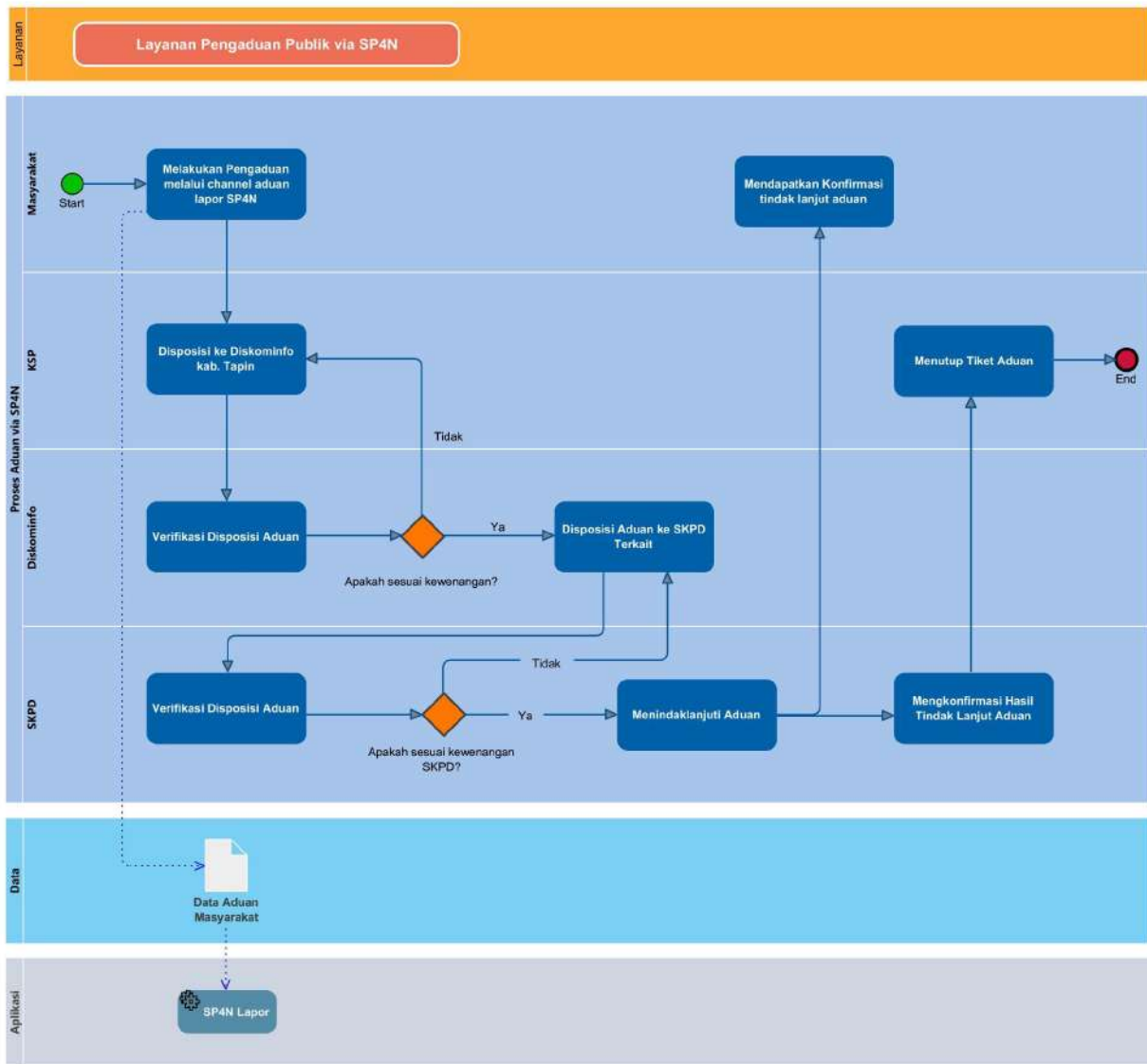
Dalam melaksanakan tugas Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan fungsi :

- perumusan kebijakan Bidang Pengelolaan Informasi;
- pelaksanaan kebijakan Bidang Pengelolaan Informasi;
- pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Bidang Pengelolaan Informasi Publik.

Adapun berdasarkan fungsinya maka layanan pengaduan publik Diskominfo dijelaskan sebagai berikut

No.	Deskripsi	Uraian
1	Domain Layanan	RAL.01 Layanan Publik
2	Area Layanan	RAL.01.44 Informasi
3	Kategori Layanan	RAL.01.44.01 Layanan Pengaduan Publik via SP4N Lapor

Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki 1 kategori layanan pengaduan publik yang melibatkan Masyarakat, KSP, Diskominfo, SKPD. Pada layanan pengaduan publik ini Aplikasi yang digunakan adalah SP4N Lapor.



**Gambar 3.4.29** RAL.01.44.01 Layanan Pengaduan Publik via SP4N Lapor

## 10. Layanan Data Terbuka

Dalam menunjang layanan data terbuka yang diampu oleh Diskominfo yang mempunyai fungsi di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

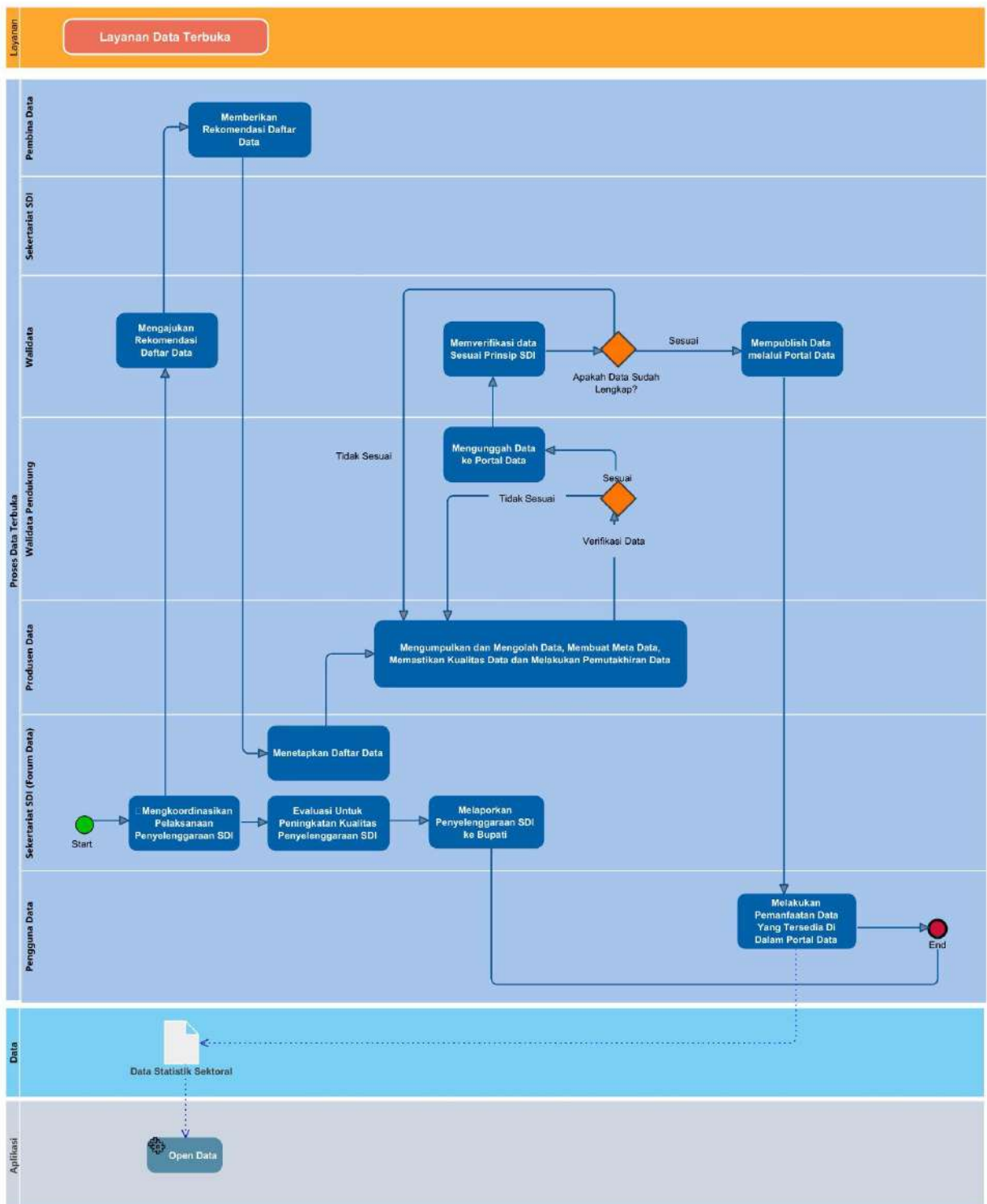
Dalam melaksanakan tugas Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan fungsi :

- a) perumusan kebijakan Bidang Penyelenggaraan Statistik Sektoral,
- b) pelaksanaan kebijakan Bidang Penyelenggaraan Statistik Sektoral,
- c) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Bidang Penyelenggaraan Statistik Sektoral.

Adapun berdasarkan fungsinya maka proses bisnis yang terdapat di Diskominfo adalah

No.	Deskripsi	Uraian
1	Domain Layanan	RAL.02 Administrasi Pemerintahan
2	Area Layanan	RAL.02.09 Data dan Informasi Pemerintahan
3	Kategori Layanan	RAL.02.09.01 Pengumpulan Data Sektoral

Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki 1 kategori layanan data terbuka yang melibatkan Pembina Data, Sekretariat SDI, Walidata, Walidata Pendukung, Produsen Data, Sekretariat SDI (Forum Data) dan Pengguna Data. Pada layanan penganggaran ini Aplikasi yang digunakan adalah Open Data.



Gambar 3.4.30 RAL.02.09.01 Layanan Data Terbuka



## 11. Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Dalam menunjang layanan akuntabilitas kinerja organisasi yang diampu oleh Bag. Organisasi mempunyai tugas melaksanakan fungsi pendukung perumusan kebijakan strategis bidang organisasi.

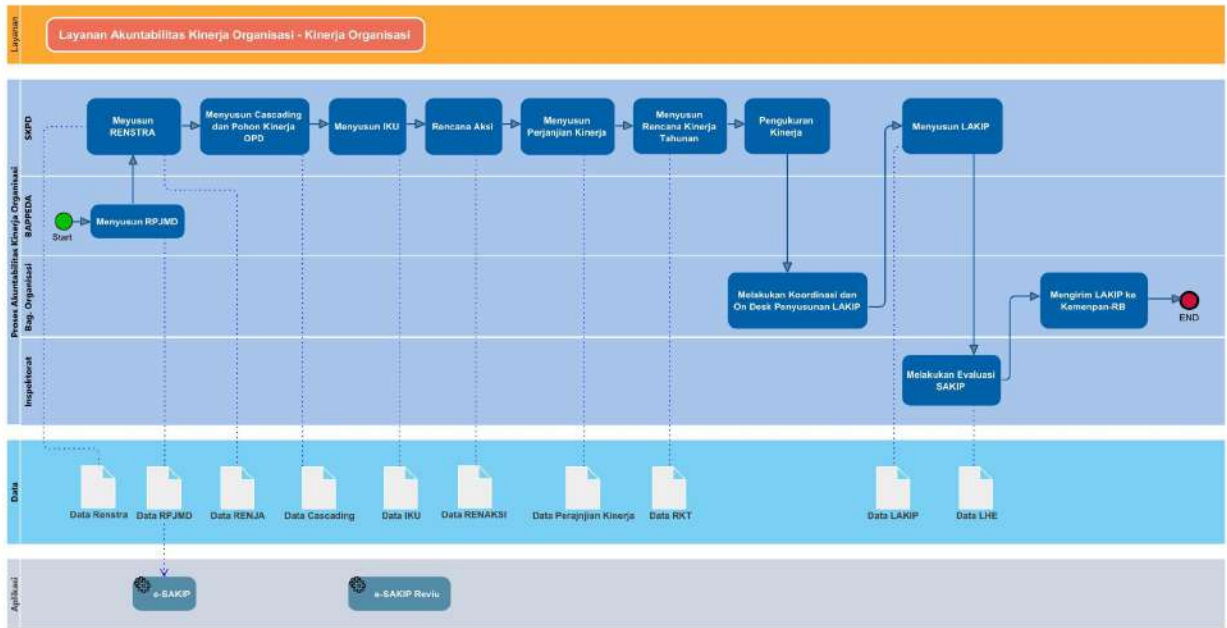
Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bag. Organisasi mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Bag. Organisasi;
- b. penyiapan bahan kebijakan bidang kelembagaan dan tatalaksana, standardisasi dan pelayanan publik serta reformasi birokrasi Pemerintah Daerah;
- c. penyiapan bahan koordinasi bidang kelembagaan dan tatalaksana, standardisasi dan pelayanan publik serta reformasi birokrasi Pemerintah Daerah;
- d. perumusan kebijakan strategis, perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan bidang kelembagaan Pemerintah Daerah;
- e. penataan kelembagaan dan tatalaksana, standardisasi dan pelayanan publik serta reformasi birokrasi Pemerintah Daerah;
- f. fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Daerah;
- g. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kebijakan bidang kelembagaan, tatalaksana dan pelayanan publik, serta reformasi birokrasi Pemerintah Daerah;
- h. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan.

Adapun berdasarkan fungsinya maka layanan akuntabilitas kinerja organisasi yang terdapat di Bagian Organisasi adalah

No.	Deskripsi	Uraian
1	Domain Layanan	RAL.02 Administrasi Pemerintahan
2	Area Layanan	RAL.02.07 Akuntabilitas Kinerja
3	Kategori Layanan	RAL.02.07.01 Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Bagian Organisasi memiliki 1 kategori layanan akuntabilitas kinerja organisasi yang melibatkan SKPD, BAPPEDA, Bag. Organisasi, Inspektorat. Pada layanan penganggaran ini Aplikasi yang digunakan adalah e-SAKIP dan e-SAKIP reviu.



**Gambar 3.4.31** RAL.02.07.01 Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi

## 12. Layanan Pengadaan Barang dan Jasa

Dalam menunjang layanan pengadaan barang dan jasa yang diampu oleh Bag. Pengadaan Barang & Jasa yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang pengkajian dan standarisasi, perencanaan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

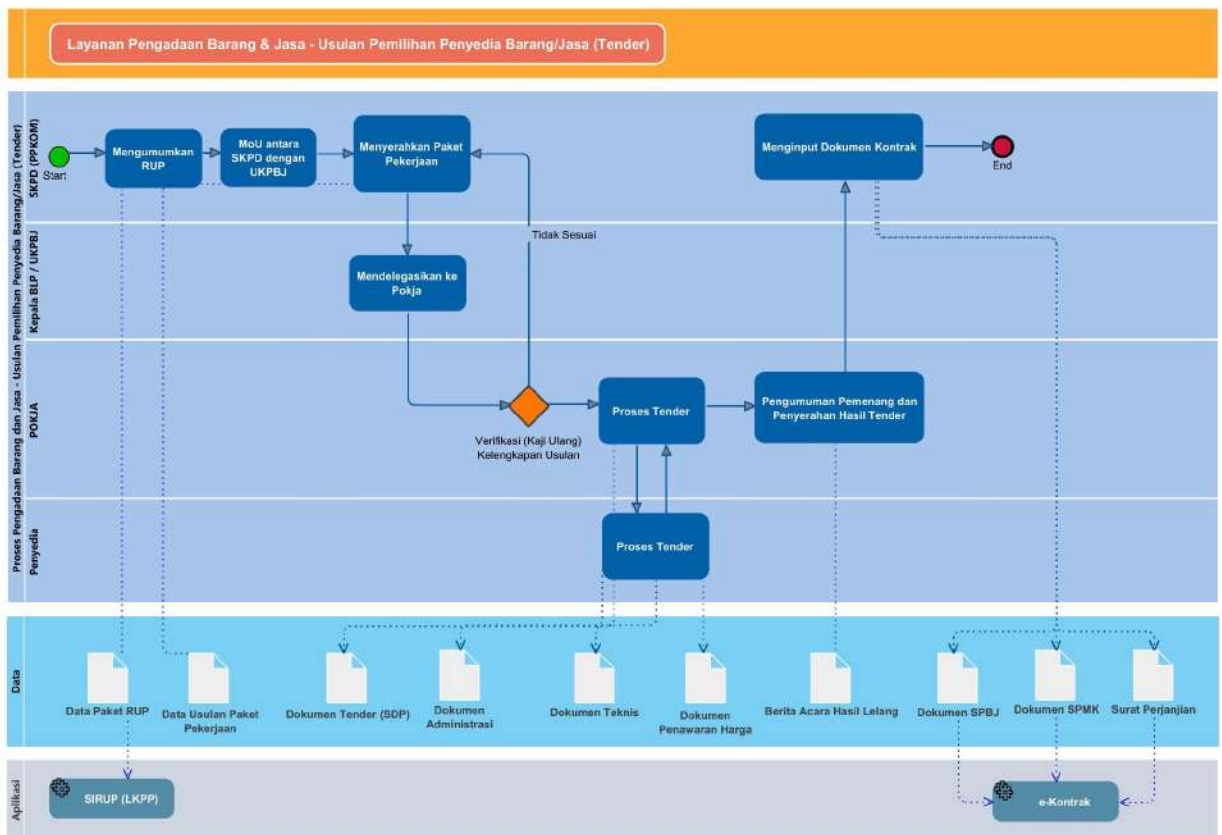
Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan pengoordinasian, pengelolaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah dan pelayanan di bidang pengkajian dan standarisasi pengadaan barang/jasa;
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian, pengelolaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah dan pelayanan di bidang perencanaan pengadaan barang/jasa;
- c. Penyiapan bahan pengoordinasian, pengelolaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah dan pelayanan dibidang pelaksanaan pengadaan barang/jasa; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian pengadaan barang/jasa sesuai dengan tugas dan fungsinya.

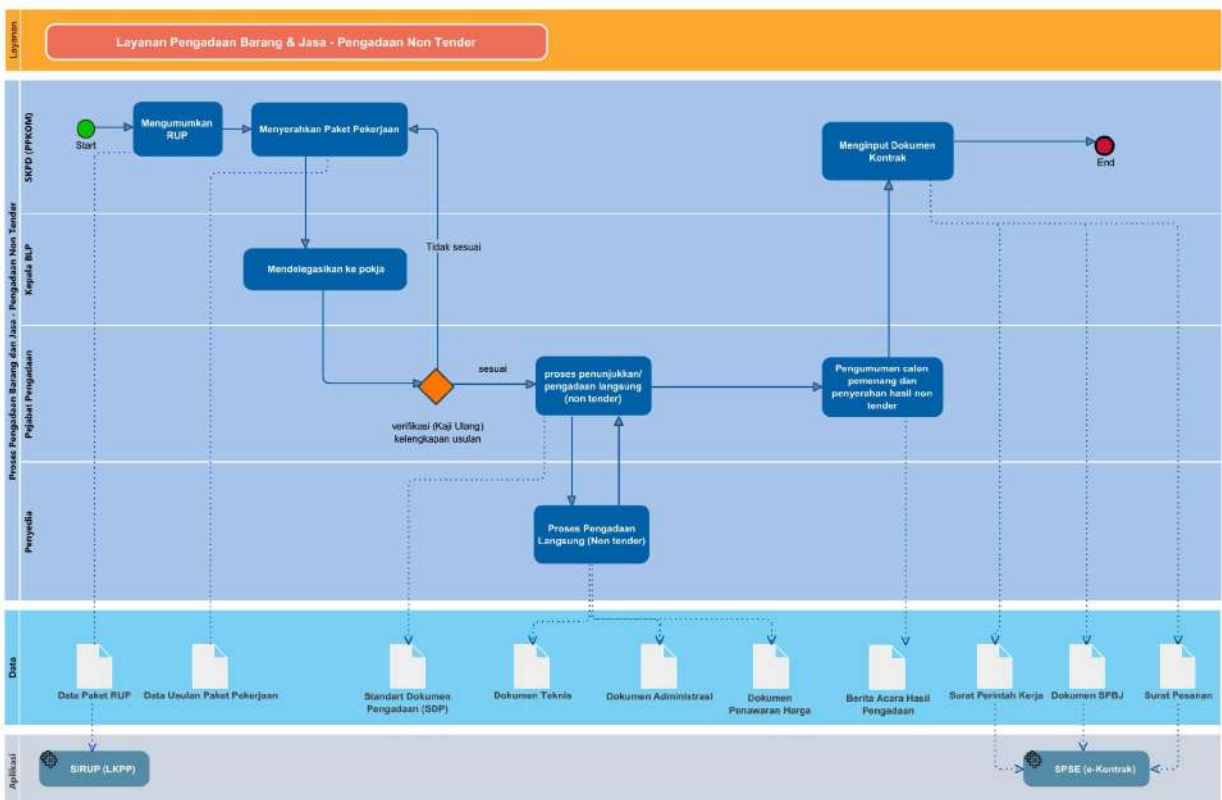
Adapun berdasarkan fungsinya maka layanan pengadaan barang dan jasa yang terdapat di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa adalah

No.	Deskripsi	Uraian
1	Domain Layanan	RAL.02 Administrasi Pemerintahan
2	Area Layanan	RAL.02.06 Dukungan Operasional Organisasi
3	Kategori Layanan	RAL.02.06.01 Layanan Usulan Pemilihan Penyedia Barang / Jasa RAL.02.06.02 Layanan Reviu Usulan Pemeliharaan Penyedia RAL.02.06.03 Layanan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa RAL.02.06.04 Layanan Klarifikasi, Negosiasi dan Pembuktian Kualifikasi RAL.02.06.05 Layanan Dokumen PBJ

Biro Administrasi Pengadaan Barang & Jasa memiliki 2 kategori layanan pengadaan barang dan jasa yang melibatkan SKPD, Kepala BLP/UKPBJ, POKJA, Penyedia, dan Pejabat Pengadaan. Pada layanan penganggaran ini Aplikasi yang digunakan adalah SIRUP(LKPP) dan SPSE(e-Kontrak).



Gambar 3.4.32 RAL.02.06.01 Layanan Usulan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa (Tender)



Gambar 3.4.34 RAL.02.06.02 Layanan Reviu Usulan Pemeliharaan Penyedia(Non Tender)

### 13. Layanan JDIH

Dalam menunjang layanan JDIH yang diampu oleh Bag. Hukum melaksanakan pengkoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, sebagai wakil pemerintah pusat bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia dan pengawasan produk hukum daerah dan Jaringan Dokumentasi serta Informasi Hukum.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Biro Hukum melaksanakan fungsi:

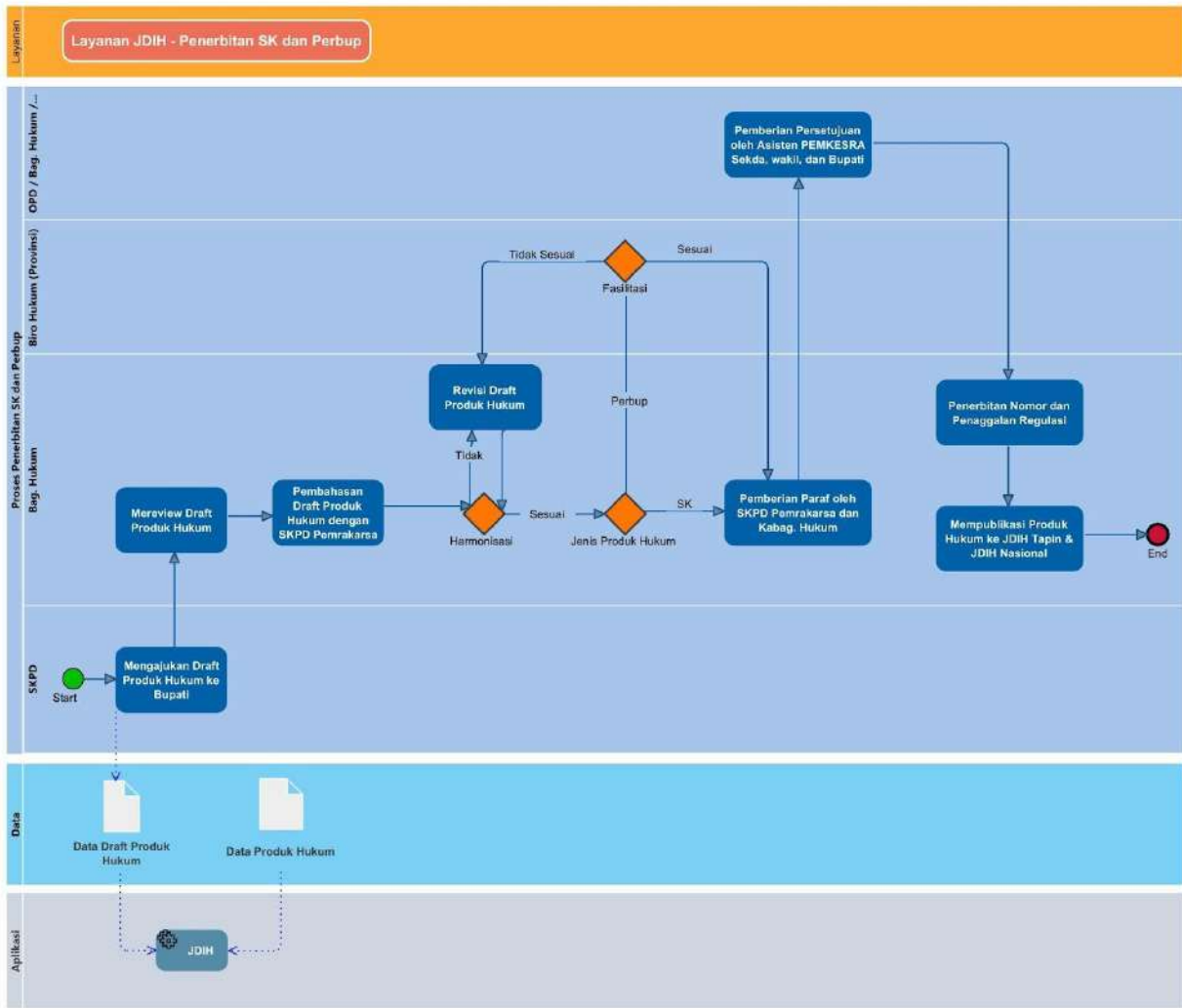
- a) Pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia dan pengawasan produk hukum daerah, serta jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- b) Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia dan pengawasan produk hukum daerah, serta jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- c) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia dan pengawasan produk hukum daerah, serta jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- d) Pengoordinasian pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang hukum; dan
- e) Pelaksanaan pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia dan pengawasan produk hukum daerah, serta jaringan dokumentasi dan informasi hukum.

Adapun berdasarkan fungsinya maka layanan JDIH yang terdapat di Biro Hukum adalah

No.	Deskripsi	Uraian
1	Domain Layanan	RAL.01 Administrasi Pemerintahan
2	Area Layanan	RAL.01.28 Hukum
3	Kategori Layanan	RAL.01.28.01 Layanan JDIH

Biro Hukum memiliki 2 kategori layanan JDIH yang melibatkan Bupati, DPRD, Biro Hukum, Kemenkumham, Bag. Hukum, SKPD. Pada layanan JDIH ini Aplikasi yang digunakan adalah JDIH.





Gambar 3.4.36 RAL.01.28.01 Layanan Penyusunan SK dan Perbup

## 14. Layanan Perizinan

Dalam menunjang layanan Perizinan yang diampu oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana, DPMPTSP melaksanakan fungsi:

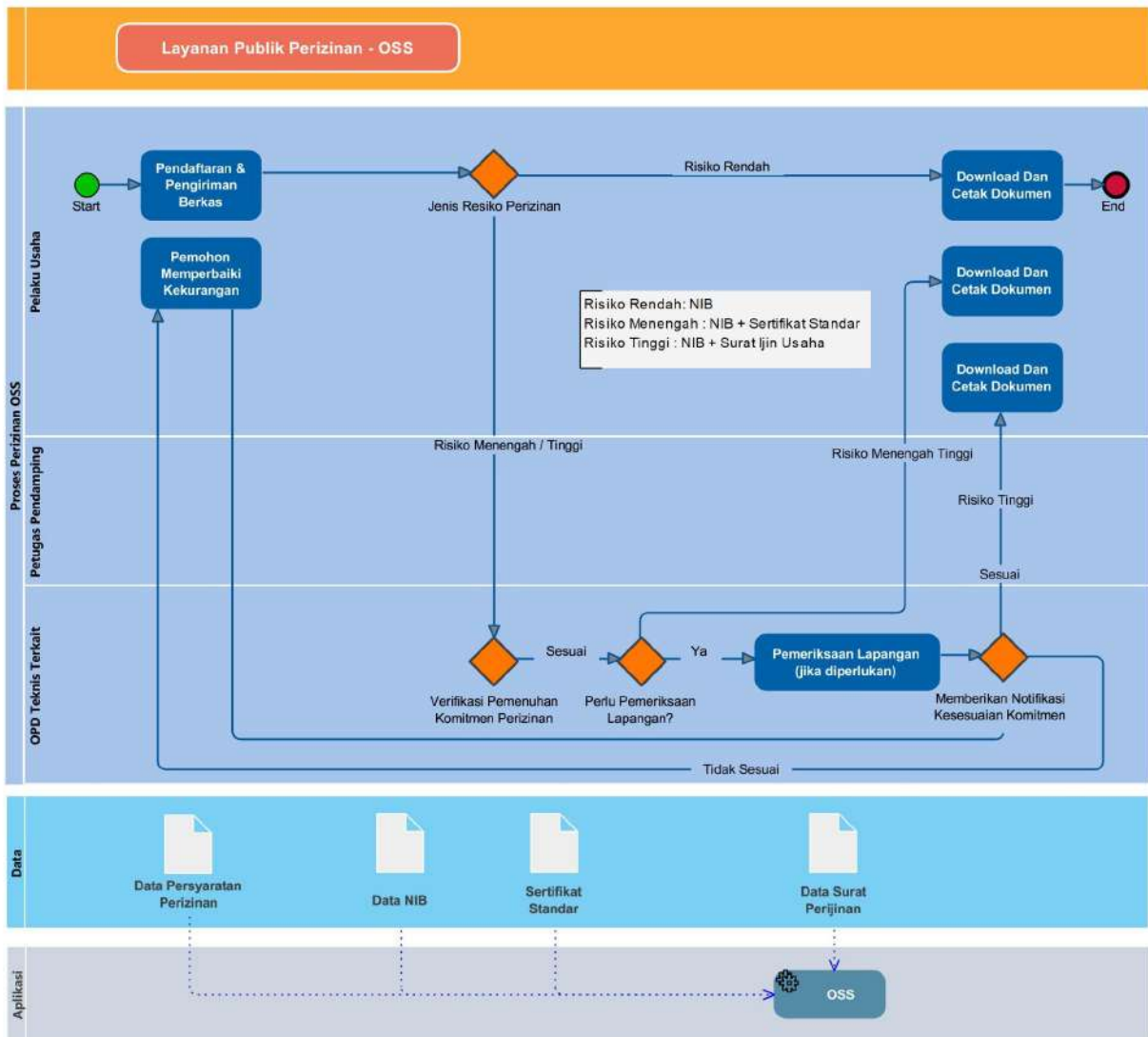
- a) Pengoordinasian kebijakan bidang perencanaan dan pengembangan, promosi penanaman modal, pelayanan perizinan, pengawasan dan pengendalian penanaman modal, pengaduan dan peningkatan layanan, dan pengelolaan data dan informasi;
- b) Pelaksanaan kebijakan bidang perencanaan dan pengembangan, promosi penanaman modal, pelayanan perizinan, pengawasan dan pengendalian penanaman modal, pengaduan dan peningkatan layanan, dan pengelolaan data dan informasi;
- c) Pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas.

Adapun berdasarkan fungsinya maka layanan Perizinan yang terdapat di DPMPTSP adalah

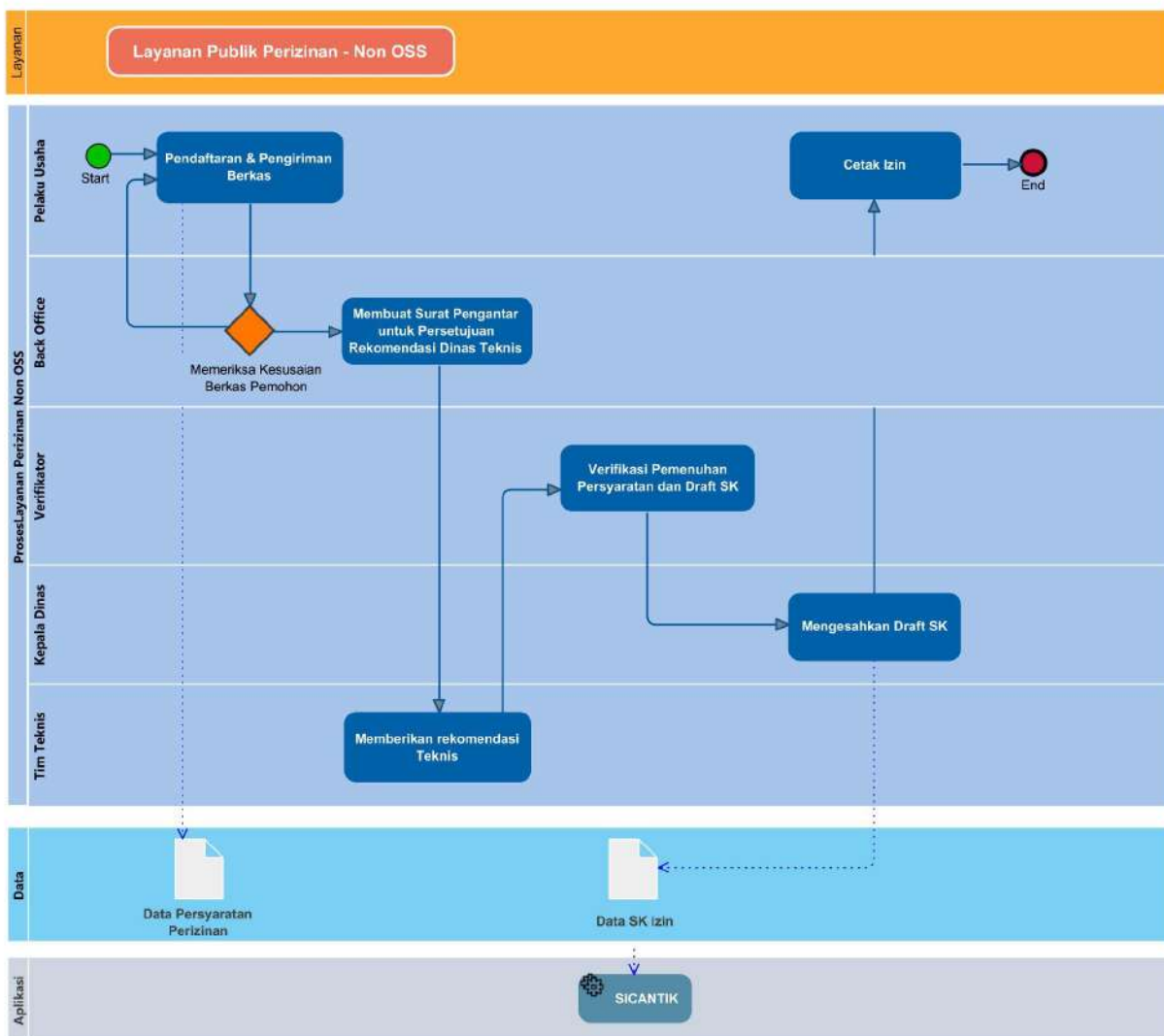
No.	Deskripsi	Uraian
1	Domain Layanan	RAL.01 Administrasi Pemerintahan
2	Area Layanan	RAL.01.16 Perizinan
3	Kategori Layanan	RAL.01.16.01 Layanan Perizinan OSS RAL.01.16.01 Layanan Perizinan SINOM

DPMPTSP memiliki 2 kategori layanan perizinan yang melibatkan SKPD Terkait, Petugas Pendamping, Pelaku Usaha, Kepala Dinas, verifikator, Tim Teknis. Pada layanan perizinan ini Aplikasi yang digunakan adalah OSS dan SICANTIK.





Gambar 3.4.37 RAL.01.16.01 Layanan Perizinan OSS



Gambar 3.4.38 RAL.01.16.01 Layanan Perizinan Non-OSS

## 15. Layanan Kesehatan

Dalam menunjang layanan Kesehatan yang diampu oleh Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

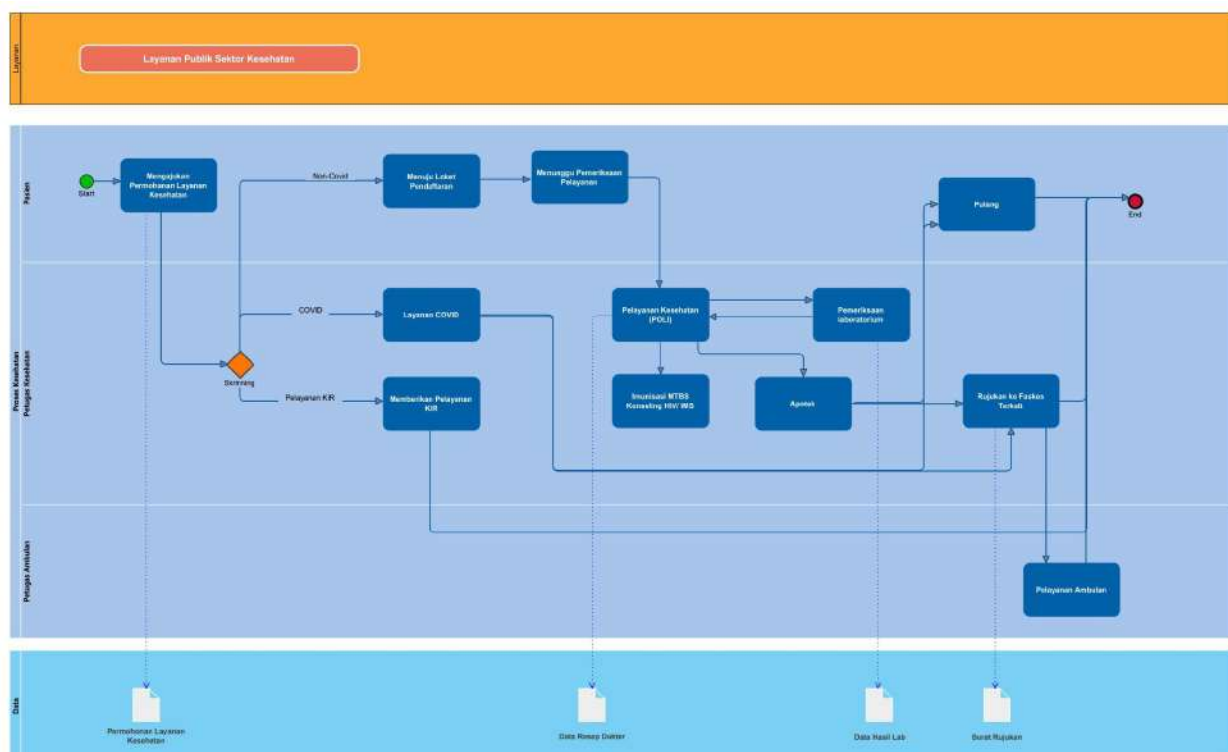
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana, Dinas Kesehatan melaksanakan fungsi:

- a) Perumusan kebijakan bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan serta sumber daya kesehatan;
- b) Pelaksanaan kebijakan bidang kesehatan masyarakat, pencegahan, dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan serta sumber daya kesehatan;
- c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan serta sumber daya kesehatan;
- d) Pelaksanaan dan pembinaan administrasi, dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan dinas.
- e) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

Adapun berdasarkan fungsinya maka layanan kesehatan yang terdapat di Dinas Kesehatan adalah

No.	Deskripsi	Uraian
1	Domain Layanan	RAL.01 Administrasi Pemerintahan
2	Area Layanan	RAL.01.25 Kesehatan
3	Kategori Layanan	RAL.01.25.01 Layanan Registrasi RAL.01.25.02 Layanan Telemedicine

Dinas Kesehatan memiliki 1 kategori layanan kesehatan yang melibatkan Pasien, Petugas Kesehatan, dan Petugas Ambulan.



Gambar 3.4.39 RAL.01.25.01 Layanan Kesehatan

## 16. Layanan Kependudukan

Dalam menunjang layanan Kependudukan yang diampu oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana, Dinas Kependudukan melaksanakan fungsi:

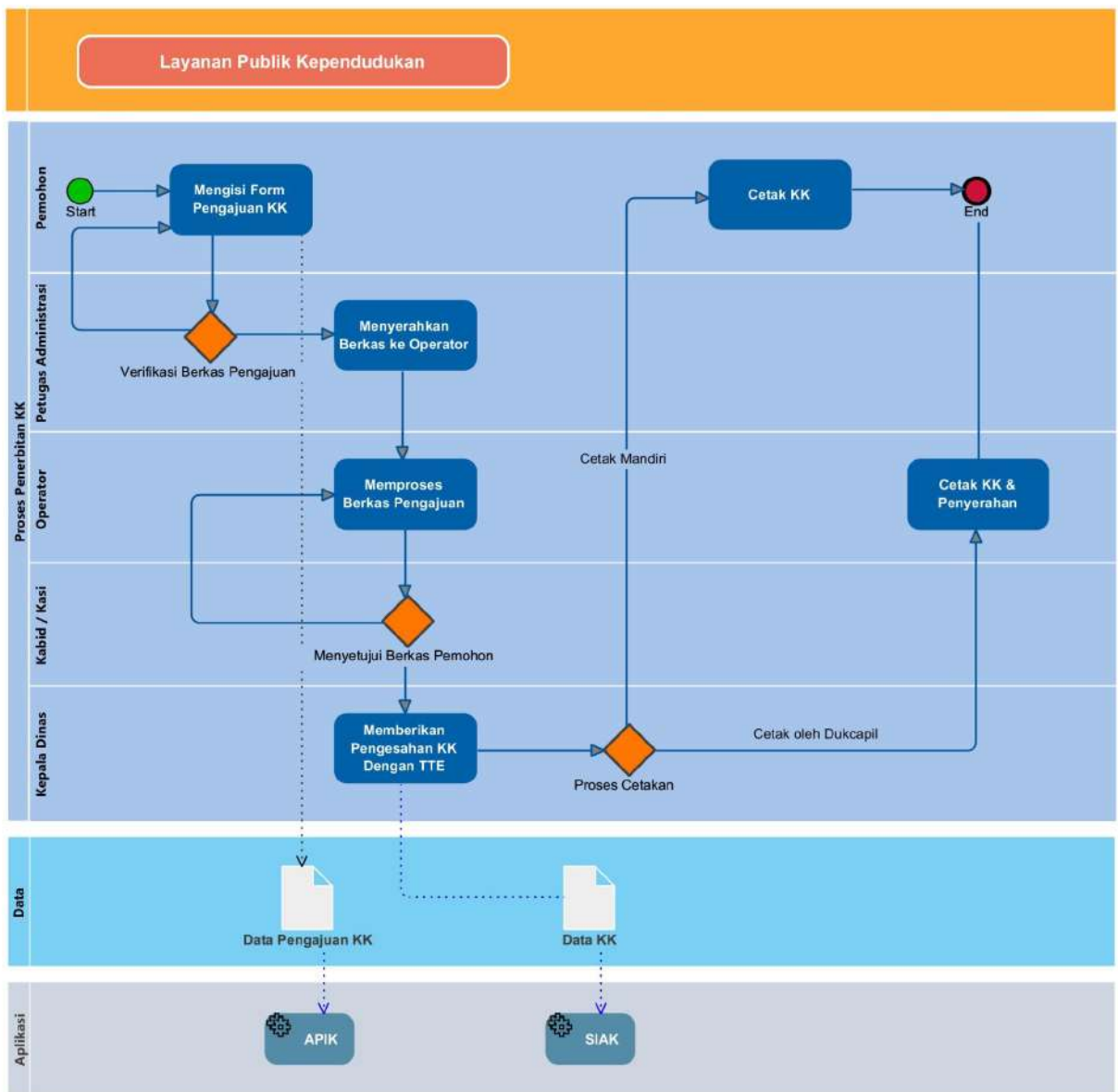
- Melaksanakan pendaftaran dan pencatatan, memeriksa dan meneliti berkas pencatatan, mengelola data serta menerbitkan Akta Kelahiran, Akta kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengakuan Anak.

- b) Melaksanakan pendaftaran dan pencatatan, memeriksa dan meneliti berkas pencatatan, serta mencatat pengesahan dan pengangkatan anak, perubahan nama Warga Negara Indonesia (WNI) dan Orang Asing
- c) Melaksanakan pendaftaran dan pencatatan, memeriksa dan meneliti berkas pencatatan, serta mengelola perubahan status kewarganegaraan
- d) Melaksanakan pendaftaran dan pencatatan, memeriksa dan meneliti berkas pencatatan, serta mencatat pembatalan perkawinan dan perceraian

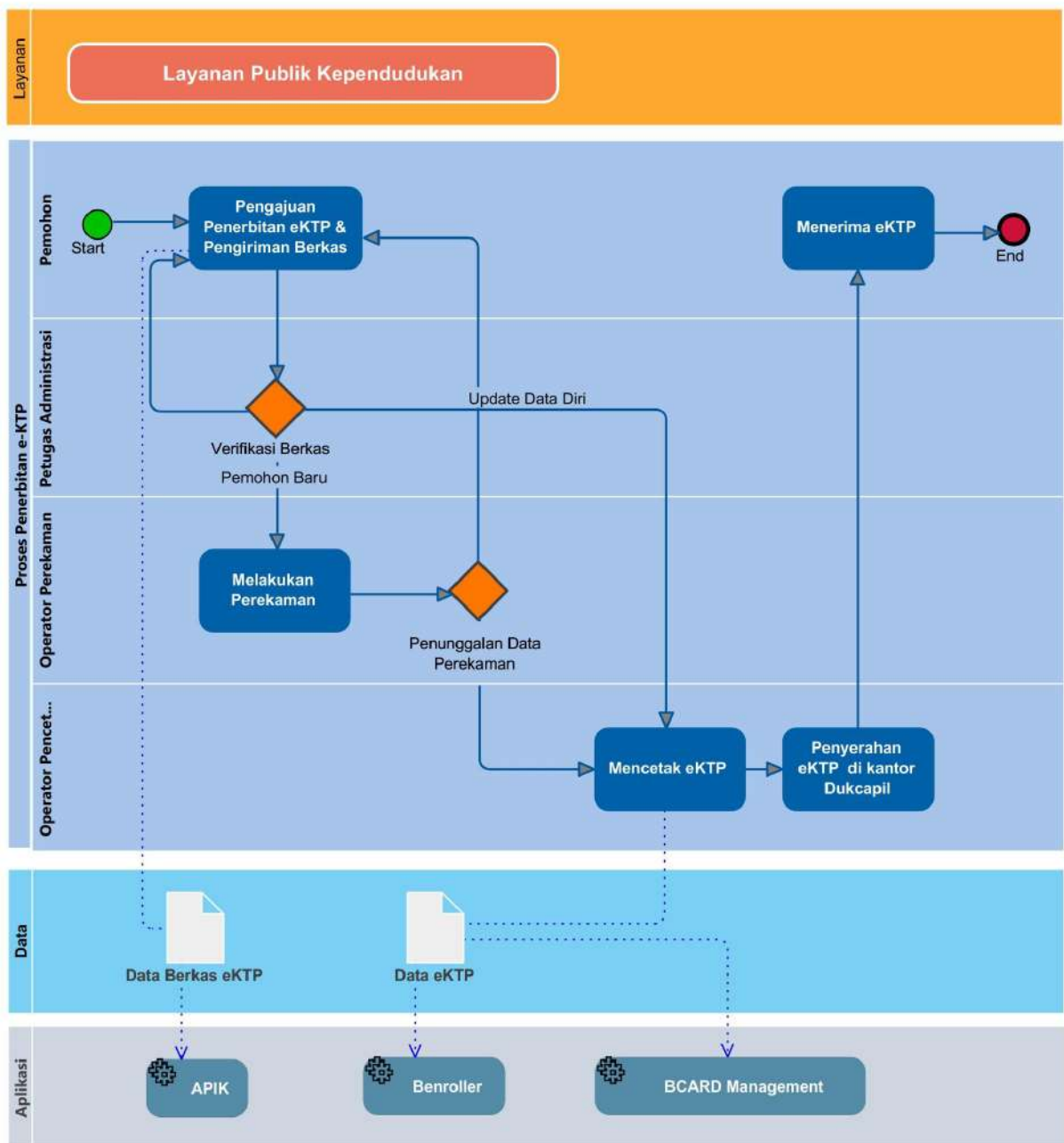
Adapun berdasarkan fungsinya maka layanan Kependudukan yang terdapat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah

No.	Deskripsi	Uraian
1	Domain Layanan	RAL 01 Layanan Publik
2	Area Layanan	01.23 Kependudukan
3	Kategori Layanan	RAL.01.23.01 Layanan Penerbitan KK RAL.01.25.02 Layanan Penerbitan e-KTP RAL.01.23.03 Layanan Akta Kelahiran RAL.01.23.04 Layanan Akta kematian

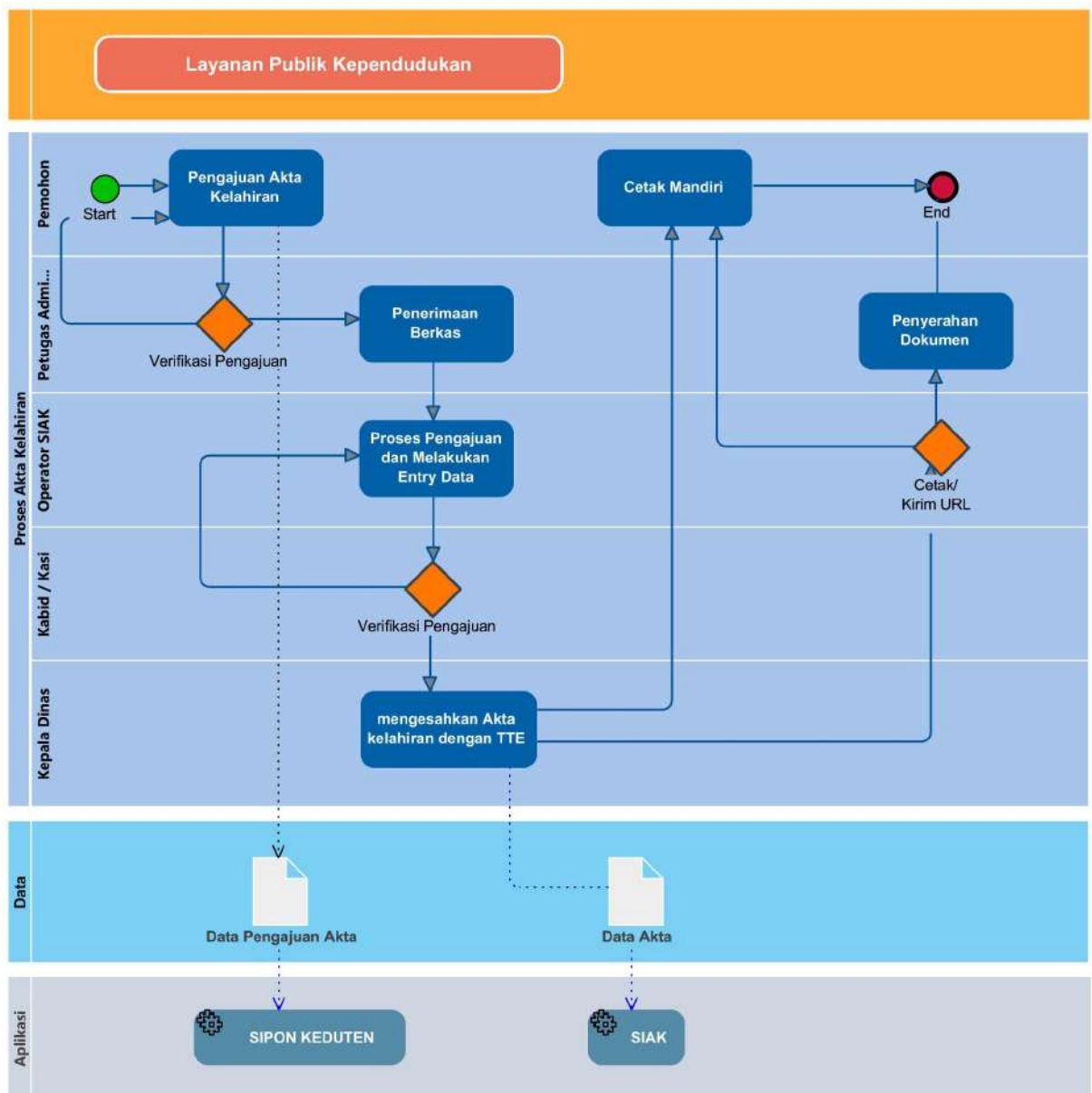
Dinas Kependudukan memiliki 8 kategori layanan Kependudukan yang melibatkan DUKCAPIL, Kabid/Kasi, Kepala Dinas, Petugas dan Masyarakat. Pada layanan kesehatan ini Aplikasi yang digunakan adalah APIK dan SIAK untuk penerbitan KK, Akta kematian, Surat Pindah, Penerbitan KIA, Akta Perkawinan, dan perceraian hanya SIAK. kemudian terdapat juga Benroller dan BCARD Management untuk layanan penerbitan e-KTP serta SIPON KEDUTEN pada akta Kelahiran



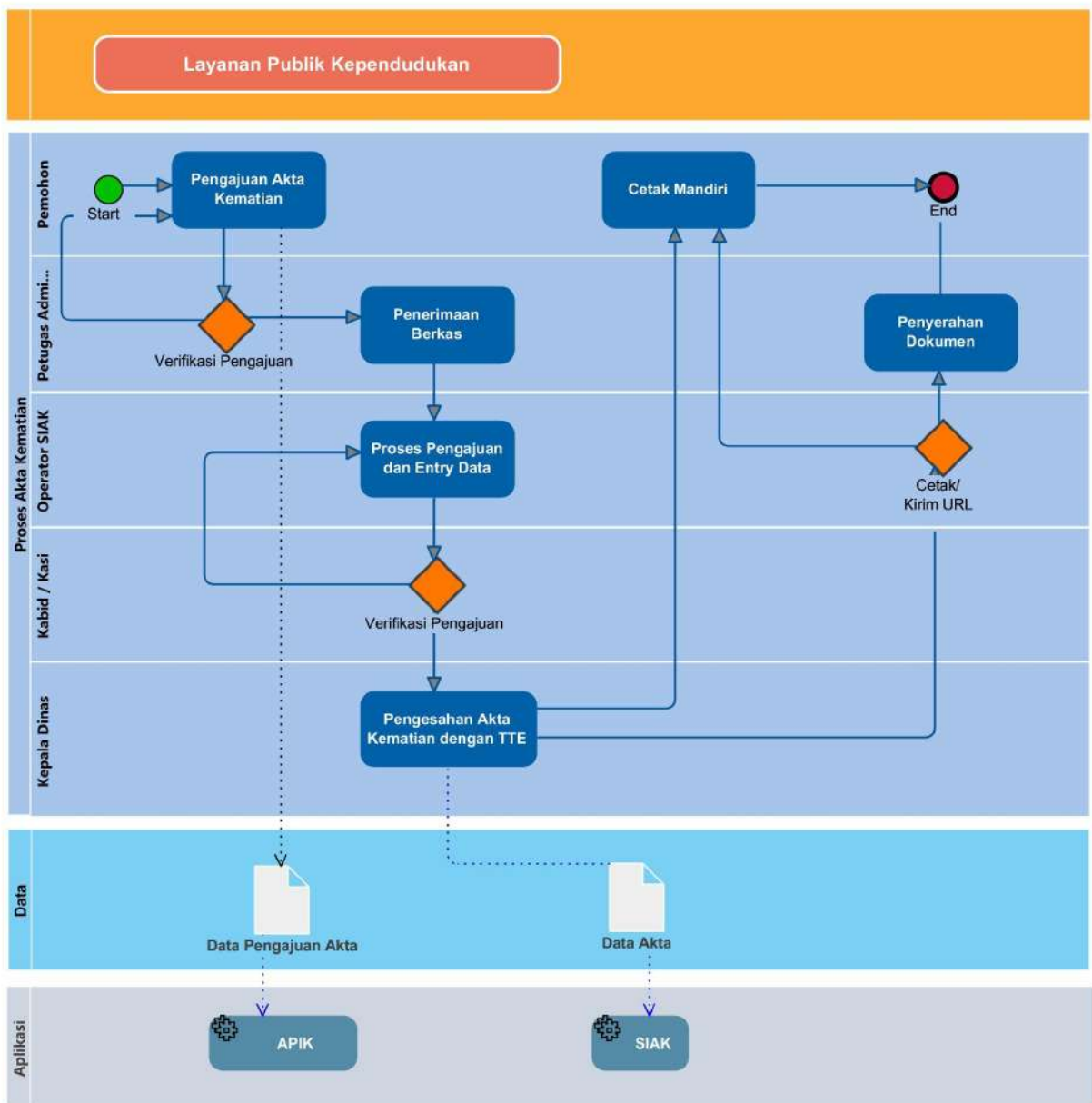
Gambar 3.4.40 RAL.01.23.01 Layanan Penerbitan KK



**Gambar 3.4.41** RAL.01.25.02 Layanan Penerbitan e-KTP

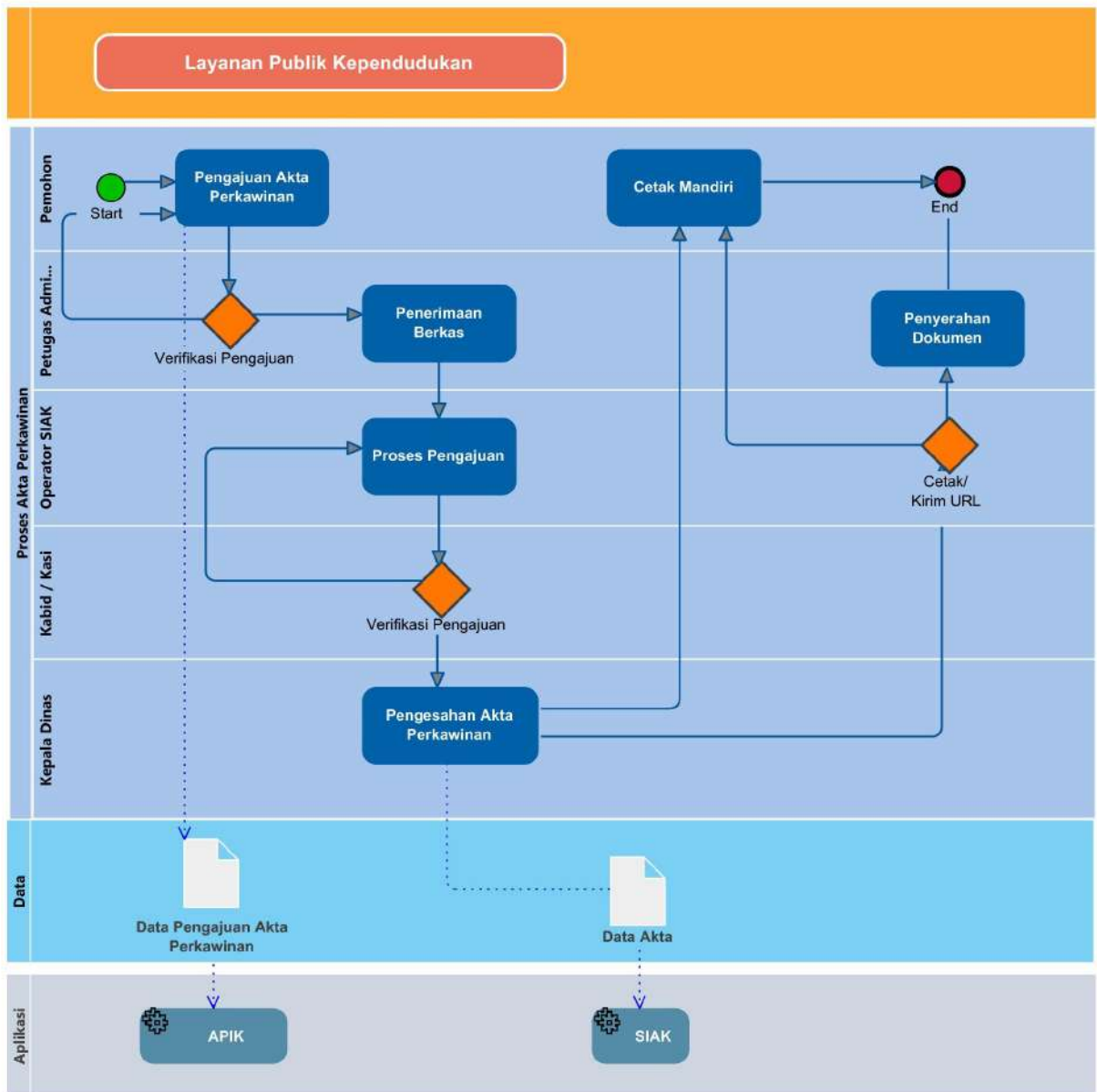


**Gambar 3.4.42** RAL.01.23.03 Layanan Akta Kelahiran

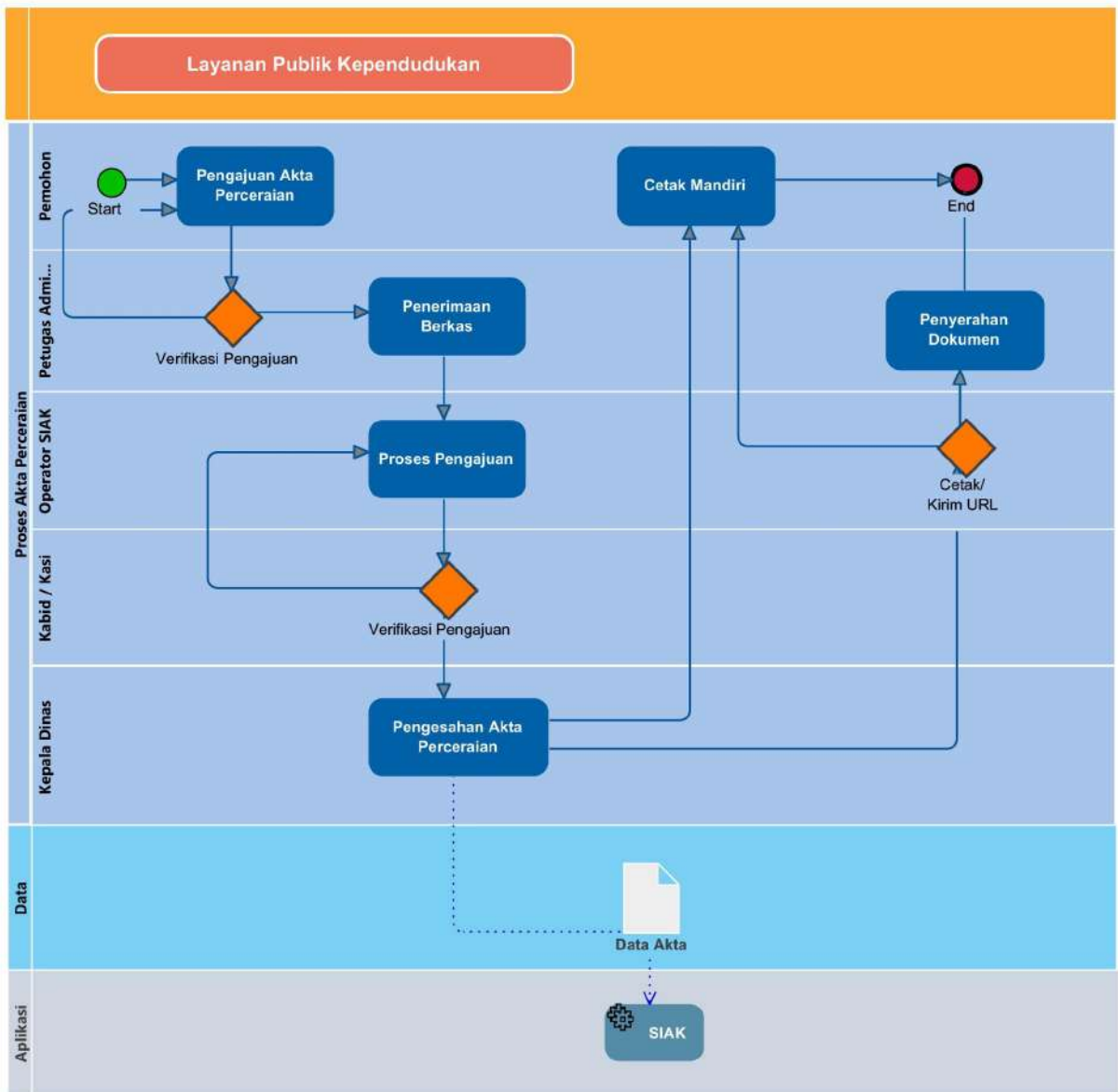


**Gambar 3.4.43** RAL.01.25.04 Layanan Akta Kematian

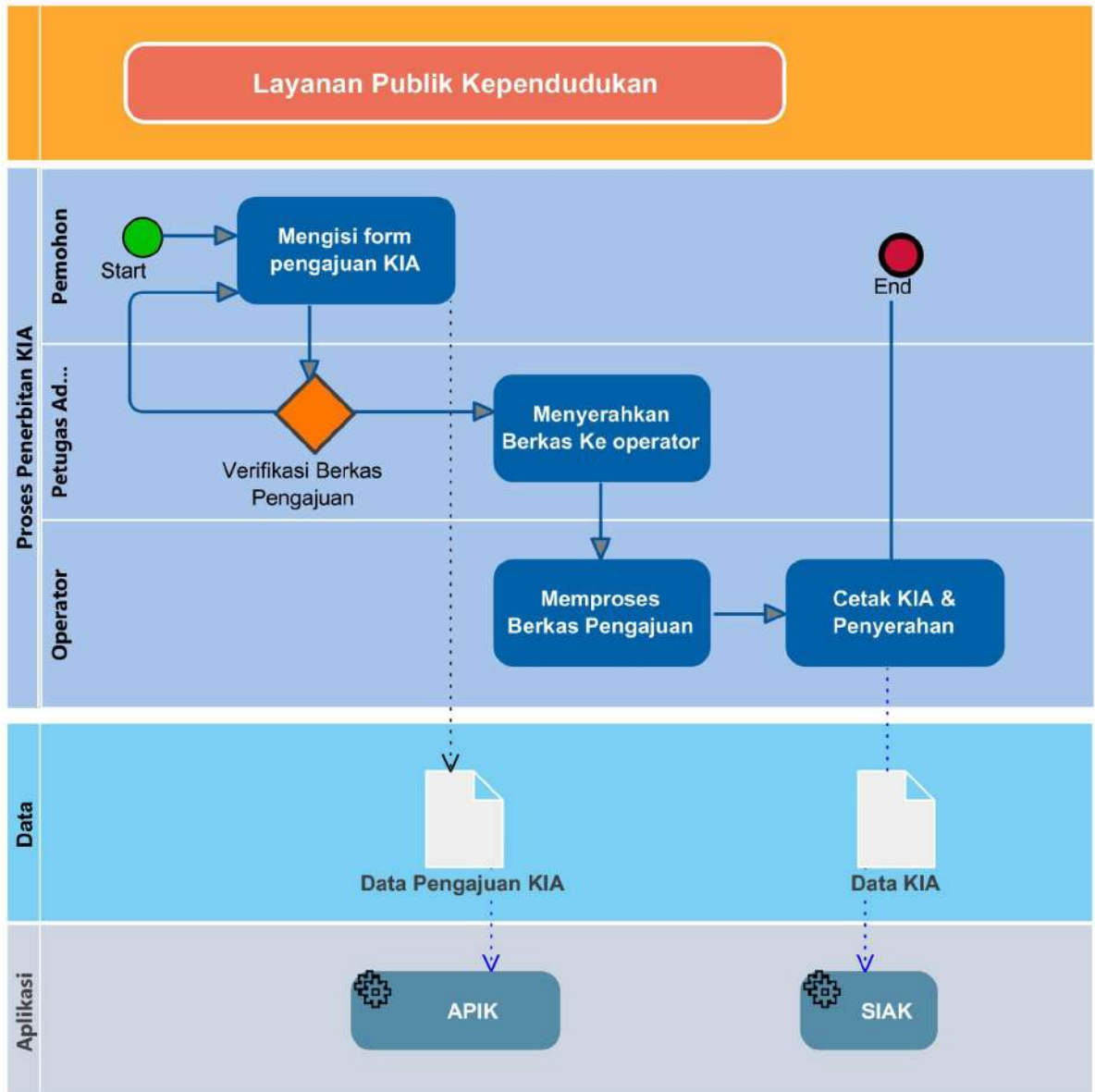




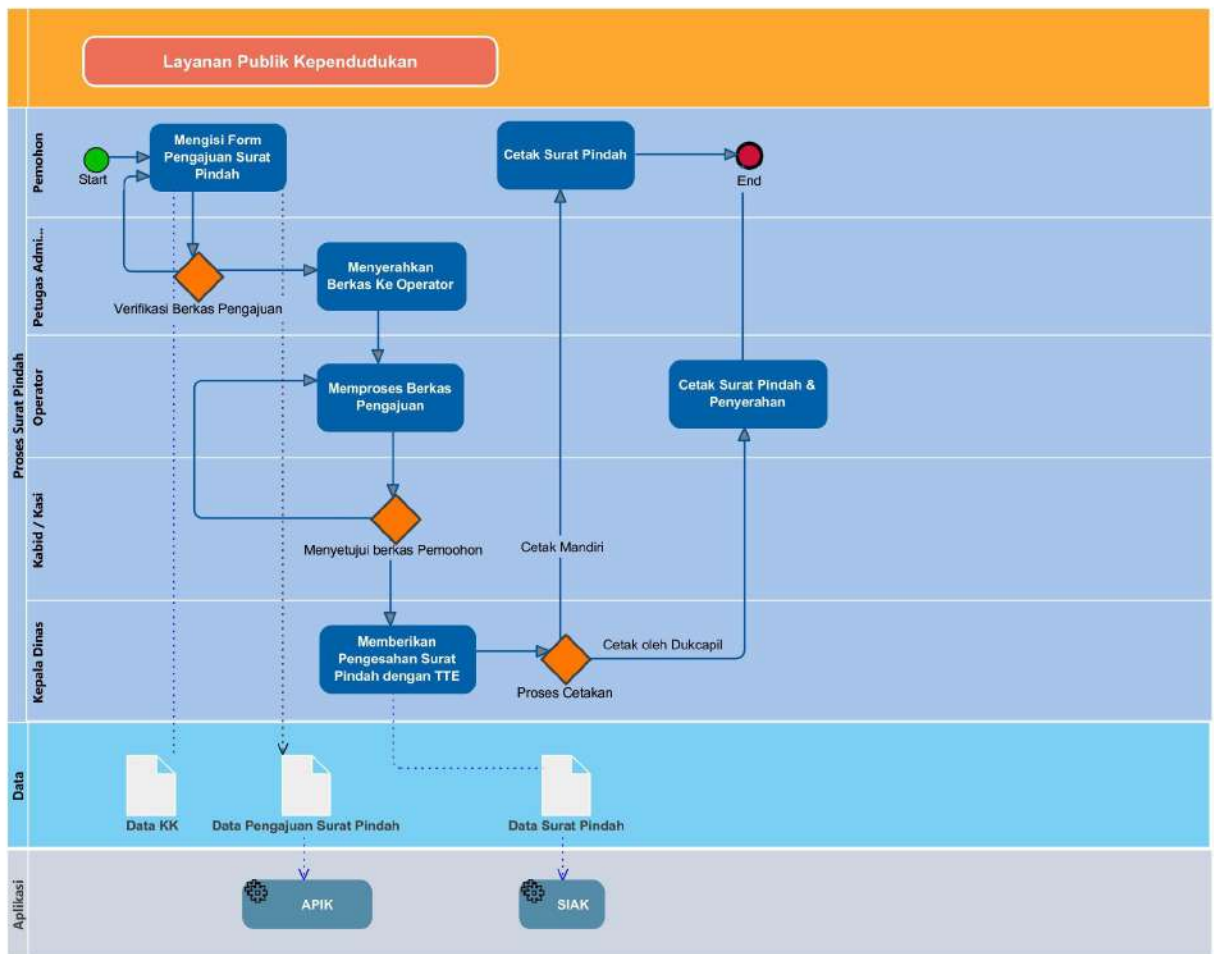
Gambar 3.4.44 RAL.01.25.04 Layanan Akta Perkawinan



Gambar 3.4.45 RAL.01.25.04 Layanan Akta Perceraian



Gambar 3.4.46 RAL.01.25.04 Layanan Penerbitan KIA



**Gambar 3.4.47** RAL.01.25.04 Layanan Proses Surat Pindah

## B. Katalog Layanan

Berikut ini dijelaskan mengenai katalog layanan dari seluruh SKPD di pemerintah kabupaten Tapin. Dimana untuk Level 1 & 2 mengacu pada kodifikasi referensi arsitektur layanan SPBE nasional. Selanjutnya untuk level 3 mengacu pada layanan yang ada di seluruh SKPD.

**Tabel 3.4.1** Katalog Layanan

ID Layanan	Nama Layanan	Unit Pelaksana Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
Layanan TPN-001	Layanan Gaji Berkala	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	TPN.07.02 Pengelolaan Kepegawaian	RAL 02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.02. Keuangan	Layanan TPN-001 Layanan Gaji Berkala
Layanan TPN-002	Layanan Kartu Taspen	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	TPN.07.02 Pengelolaan Kepegawaian	RAL 02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.04. Aparatur Negara	Layanan TPN-002 Layanan Kartu Taspen
Layanan TPN-003	Layanan Permohonan Pembuatan karis/Karsu	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	TPN.07.02 Pengelolaan Kepegawaian	RAL 02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.04. Aparatur Negara	Layanan TPN-003 Layanan Permohonan Pembuatan karis/Karsu
Layanan TPN-004	Layanan Permohonan Pembuatan Karpeg	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	TPN.07.02 Pengelolaan Kepegawaian	RAL 02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.04. Aparatur Negara	Layanan TPN-004 Layanan Permohonan Pembuatan Karpeg
Layanan TPN-005	Layanan Profil Kepegawaian	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	TPN.07.02 Pengelolaan Kepegawaian	RAL 02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.04. Aparatur Negara	Layanan TPN-005 Layanan Profil Kepegawaian
Layanan TPN-006	Layanan TPP	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	TPN.07.02 Pengelolaan Kepegawaian	RAL 02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.04. Aparatur Negara	Layanan TPN-006 Layanan TPP
Layanan TPN-007	Layanan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	TPN.07.02 Pengelolaan Kepegawaian	RAL 02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.04. Aparatur Negara	Layanan TPN-007 Layanan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah
Layanan TPN-008	Layanan Usul Kenaikan Pangkat	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	TPN.07.02 Pengelolaan Kepegawaian	RAL 02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.04. Aparatur Negara	Layanan TPN-008 Layanan Usul Kenaikan Pangkat
Layanan TPN-009	Layanan Usul pencatuman Gelar	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	TPN.07.02 Pengelolaan Kepegawaian	RAL 02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.04. Aparatur Negara	Layanan TPN-009 Layanan Usul pencatuman Gelar
Layanan TPN-010	Layanan Usul Pensiun	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	TPN.07.02 Pengelolaan Kepegawaian	RAL 02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.04. Aparatur Negara	Layanan TPN-010 Layanan Usul Pensiun

ID Layanan	Nama Layanan	Unit Pelaksana Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
Layanan TPN-011	Layanan Pelatihan ASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	TPN.07.02 Pengelolaan Kepegawaian	RAL 02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.04. Aparatur Negara	Layanan TPN-011 Layanan Pelatihan ASN
Layanan TPN-012	Layanan Pendataan dan Permohonan SKT	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	TPN.08.03 Pembinaan Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Dan Politik	RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.29. Keamanan	Layanan TPN-012 Layanan Pendataan dan Permohonan SKT
Layanan TPN-013	Layanan Data Anggaran	Badan Keuangan dan Aset Daerah	TPN.12.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	RAL 02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.02. Keuangan	Layanan TPN-013 Layanan Data Anggaran
Layanan TPN-014	Layanan Keuangan	Badan Keuangan dan Aset Daerah	TPN.12.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	RAL 02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.02. Keuangan	Layanan TPN-014 Layanan Keuangan
Layanan TPN-015	Layanan Informasi dan Bantuan Logistik Kebencanaan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	TPN.05.04 Penyiapan Tangguh Bencana	RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.26. Sosial	Layanan TPN-015 Layanan Informasi dan Bantuan Logistik Kebencanaan
Layanan TPN-016	Layanan Pajak Daerah	Badan Pendapatan Daerah	TPN.02.05 Pengelolaan Pendapatan Daerah	RAL 02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.02. Keuangan	Layanan TPN-016 Layanan Pajak Daerah
Layanan TPN-017	Layanan Retribusi Daerah	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	TPN.02.05 Pengelolaan Pendapatan Daerah	RAL 02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.02. Keuangan	Layanan TPN-017 Layanan Retribusi Daerah
Layanan TPN-018	Layanan Data Inovasi	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan	TPN.09.01 Penelitian Dan Pengembangan Daerah	RAL 02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.03. Perencanaan Pembangunan Nasional	Layanan TPN-018 Layanan Data Inovasi
Layanan TPN-019	Layanan Informasi Profil Dinas	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan	TPN.12.01 Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	RAL 02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.09. Data dan Informasi Pemerintahan	Layanan TPN-019 Layanan Informasi Profil Dinas
Layanan TPN-020	Layanan Pengaduan Masyarakat	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan	TPN.12.01 Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.45. Komunikasi	Layanan TPN-020 Layanan Pengaduan Masyarakat
Layanan TPN-021	Layanan Perencanaan Dan Penganggaran	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan	TPN.12.01 Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	RAL 02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.03. Perencanaan Pembangunan Nasional	Layanan TPN-021 Layanan Perencanaan Dan Penganggaran
Layanan TPN-022	Layanan Perencanaan Dan Penganggaran Pagu	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan	TPN.12.01 Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	RAL 02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.03. Perencanaan Pembangunan Nasional	Layanan TPN-022 Layanan Perencanaan Dan Penganggaran Pagu

ID Layanan	Nama Layanan	Unit Pelaksana Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
Layanan TPN-023	Layanan Informasi Produk Hukum	Bagian Hukum	TPN.13.04 Penyusunan Kebijakan	RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.28. Hukum	Layanan TPN-023 Layanan Informasi Produk Hukum
Layanan TPN-024	Layanan Informasi Pemerintahan, Informasi Sosial Kemasyarakatan	Bagian Kesejahteraan Rakyat	TPN.03.01 Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.26. Sosial	Layanan TPN-024 Layanan Informasi Pemerintahan, Informasi Sosial Kemasyarakatan
Layanan TPN-025	Layanan Informasi, Birokrasi Dan Tata Lakasana	Bagian Organisasi	TPN.07.01 Peningkatan Tata Kelola Organisasi	RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.26. Sosial	Layanan TPN-025 Layanan Informasi, Birokrasi Dan Tata Lakasana
Layanan TPN-026	Layanan Pelaporan Pembangunan Daerah	Bagian Pemerintahan	TPN.12.01 Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.45. Komunikasi	Layanan TPN-026 Layanan Pelaporan Pembangunan Daerah
Layanan TPN-027	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	TPN.10.03 Pengadaan Barang Dan Jasa	RAL 02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.03. Perencanaan Pembangunan Nasional	Layanan TPN-027 Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
Layanan TPN-028	Layanan Adminstrasi	Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	TPN.13.02 Pendampingan Dan Asistensi Administrasi Daerah	RAL 02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.09. Data dan Informasi Pemerintahan	Layanan TPN-028 Layanan Adminstrasi
Layanan TPN-029	Layanan Perlengkapan dan Pemeliharaan Rumah Tangga	Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga	TPN.10.02 Pengelolaan Kerumahtanggaan	RAL 02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.09. Data dan Informasi Pemerintahan	Layanan TPN-029 Layanan Perlengkapan dan Pemeliharaan Rumah Tangga
Layanan TPN-030	Layanan Informasi, Kebudayaan, Wisata, Ekonomi Kreatif	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	TPN.03.03 Peningkatan Pariwisata	RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.15. Pariwisata	Layanan TPN-030 Layanan Informasi, Kebudayaan, Wisata, Ekonomi Kreatif
Layanan TPN-031	Layanan Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	TPN.06.01 Manajemen Pelayanan Publik	RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.23. Kependudukan	Layanan TPN-031 Layanan Kependudukan
Layanan TPN-032	Layanan Survey Masyarakat	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	TPN.06.01 Manajemen Pelayanan Publik	RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.45. Komunikasi	Layanan TPN-032 Layanan Survey Masyarakat
Layanan TPN-033	Layanan Covid-19	Dinas Kesehatan	TPN.02.01 Pengelolaan Kesehatan Masyarakat	RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.25. Kesehatan	Layanan TPN-033 Layanan Covid-19
Layanan TPN-034	Layanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	TPN.02.01 Pengelolaan Kesehatan Masyarakat	RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.25. Kesehatan	Layanan TPN-034 Layanan Kesehatan
Layanan TPN-035	Layanan Obat dan Resep	Dinas Kesehatan	TPN.02.01 Pengelolaan Kesehatan Masyarakat	RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.25. Kesehatan	Layanan TPN-035 Layanan Obat dan Resep

ID Layanan	Nama Layanan	Unit Pelaksana Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
Layanan TPN-036	Layanan Rujukan Rumah Sakit	Dinas Kesehatan	TPN.02.01 Pengelolaan Kesehatan Masyarakat	RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.25. Kesehatan	Layanan TPN-036 Layanan Rujukan Rumah Sakit
Layanan TPN-037	Layanan Informasi Data Harga Pangan, Keamanan Pangan, Pengisian Lumbung Gabah, Dan Keamanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan	TPN.04.02 Peningkatan Kemandirian Pangan	RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.07. Pertanian	Layanan TPN-037 Layanan Informasi Data Harga Pangan, Keamanan Pangan, Pengisian Lumbung Gabah, Dan Keamanan Pangan
Layanan TPN-038	Layanan Evaluasi	Dinas Komunikasi dan Informatika	TPN.11.01 Pengelolaan Informasi	RAL 02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.09. Data dan Informasi Pemerintahan	Layanan TPN-038 Layanan Evaluasi
Layanan TPN-039	Layanan Identifikasi Data	Dinas Komunikasi dan Informatika	TPN.11.03 Pengelolaan Satu Data Indonesia	RAL 02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.09. Data dan Informasi Pemerintahan	Layanan TPN-039 Layanan Identifikasi Data
Layanan TPN-040	Layanan Pelaporan	Dinas Komunikasi dan Informatika	TPN.11.01 Pengelolaan Informasi	RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.45. Komunikasi	Layanan TPN-040 Layanan Pelaporan
Layanan TPN-041	Layanan Portal Website	Dinas Komunikasi dan Informatika	TPN.11.02 Pengelolaan Aplikasi	RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.44. Informasi	Layanan TPN-041 Layanan Portal Website
Layanan TPN-042	Layanan Satu Data	Dinas Komunikasi dan Informatika	TPN.11.03 Pengelolaan Satu Data Indonesia	RAL 02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.09. Data dan Informasi Pemerintahan	Layanan TPN-042 Layanan Satu Data
Layanan TPN-043	Layanan Informasi Pencemaran Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup	TPN.05.02 Pengelolaan Lingkungan Hidup	RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.41. Lingkungan Hidup	Layanan TPN-043 Layanan Informasi Pencemaran Lingkungan
Layanan TPN-044	Layanan Izin Pengelolaan Limbah B3	Dinas Lingkungan Hidup	TPN.05.02 Pengelolaan Lingkungan Hidup	RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.41. Lingkungan Hidup	Layanan TPN-044 Layanan Izin Pengelolaan Limbah B3
Layanan TPN-045	Layanan Permohonan Izin Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup	TPN.05.02 Pengelolaan Lingkungan Hidup	RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.41. Lingkungan Hidup	Layanan TPN-045 Layanan Permohonan Izin Lingkungan
Layanan TPN-046	Layanan Izin Penutupan Saluran Irigasi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	TPN.05.01 Pengelolaan Infrastruktur Dasar	RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.41. Lingkungan Hidup	Layanan TPN-046 Layanan Izin Penutupan Saluran Irigasi
Layanan TPN-047	Layanan Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Milik Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	TPN.05.01 Pengelolaan Infrastruktur Dasar	RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.41. Lingkungan Hidup	Layanan TPN-047 Layanan Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Milik Jalan
Layanan TPN-048	Layanan Informasi Keuangan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	TPN.04.01 Pemberdayaan Desa	RAL 02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.02. Keuangan	Layanan TPN-048 Layanan Informasi Keuangan Desa



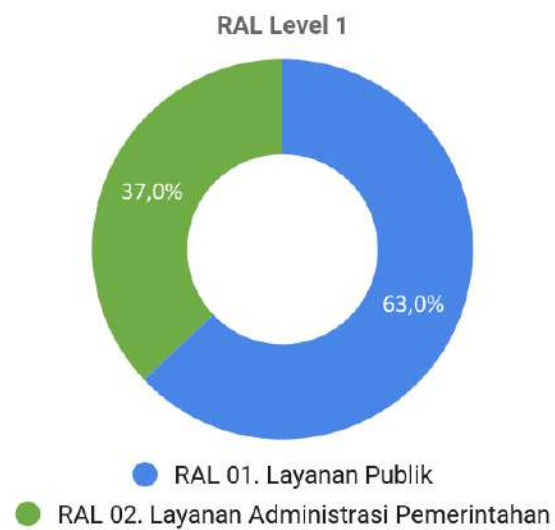
ID Layanan	Nama Layanan	Unit Pelaksana Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
Layanan TPN-049	Layanan Informasi Pusat Pembelajaran Keluarga	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	TPN.02.06 Pemberdayaan Keluarga	RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.27. Pemberdayaan Perempuan	Layanan TPN-049 Layanan Informasi Pusat Pembelajaran Keluarga
Layanan TPN-050	Layanan Kedinasan Pembinaan Olahraga	Dinas Pemuda dan Olahraga	TPN.04.03 Pembinaan Kepemudaan	RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.36. Olahraga	Layanan TPN-050 Layanan Kedinasan Pembinaan Olahraga
Layanan TPN-051	Layanan Paskibraka, Popda	Dinas Pemuda dan Olahraga	TPN.04.03 Pembinaan Kepemudaan	RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.36. Olahraga	Layanan TPN-051 Layanan Paskibraka, Popda
Layanan TPN-052	Layanan Aspirasi	Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu	TPN.02.02 Peningkatan Perekonomian Masyarakat	RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.36. Olahraga	Layanan TPN-052 Layanan Aspirasi
Layanan TPN-053	Layanan Perizinan	Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu	TPN.02.02 Peningkatan Perekonomian Masyarakat	RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.16. Perizinan dan Akreditasi	Layanan TPN-053 Layanan Perizinan
Layanan TPN-054	Layanan Berkala Dan Sk	Dinas Pendidikan	TPN.01.02 Fasilitasi SDM Unggul	RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.31. Pendidikan	Layanan TPN-054 Layanan Berkala Dan Sk
Layanan TPN-055	Layanan Penerimaan Siswa Baru	Dinas Pendidikan	TPN.01.01 Peningkatan Pendidikan PAUD, SD, SMP	RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.31. Pendidikan	Layanan TPN-055 Layanan Penerimaan Siswa Baru
Layanan TPN-056	Layanan Pendidikan	Dinas Pendidikan	TPN.01.01 Peningkatan Pendidikan PAUD, SD, SMP	RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.31. Pendidikan	Layanan TPN-056 Layanan Pendidikan
Layanan TPN-057	Layanan Konsuling	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	TPN.02.06 Pemberdayaan Keluarga	RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.27. Pemberdayaan Perempuan	Layanan TPN-057 Layanan Konsuling
Layanan TPN-058	Layanan Konsultasi Keluarga	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	TPN.02.06 Pemberdayaan Keluarga	RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.27. Pemberdayaan Perempuan	Layanan TPN-058 Layanan Konsultasi Keluarga
Layanan TPN-059	Layanan Keluarga Berencana	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	TPN.02.06 Pemberdayaan Keluarga	RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.23. Kependudukan	Layanan TPN-059 Layanan Keluarga Berencana
Layanan TPN-060	Layanan Database Toko Pasar	Dinas Perdagangan	TPN.02.04 Pengelolaan Perdagangan	RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.06. Perdagangan	Layanan TPN-060 Layanan Database Toko Pasar

ID Layanan	Nama Layanan	Unit Pelaksana Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
Layanan TPN-061	Layanan Retribusi Pelayanan Pasar Dan Pelayanan Persampahan/Kebersihan Pasar	Dinas Perdagangan	TPN.02.04 Pengelolaan Perdagangan	RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.06. Perdagangan	Layanan TPN-061 Layanan Retribusi Pelayanan Pasar Dan Pelayanan Persampahan/Kebersihan Pasar
Layanan TPN-062	Layanan Informasi Lingkungan Perhubungan Dan Keselamatan	Dinas Perhubungan	TPN.05.01 Pengelolaan Infrastruktur Dasar	RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.29. Keamanan	Layanan TPN-062 Layanan Informasi Lingkungan Perhubungan Dan Keselamatan
Layanan TPN-063	Layanan Data Informasi Perikanan	Dinas Perikanan	TPN.03.04 Peningkatan Pertanian Perikanan dan Peternakan	RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.10. Perikanan	Layanan TPN-063 Layanan Data Informasi Perikanan
Layanan TPN-064	Layanan Produk UMKM	Dinas Perindustrian	TPN.03.01 Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.14. Usaha Kecil dan Menengah	Layanan TPN-064 Layanan Produk UMKM
Layanan TPN-065	Layanan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	TPN.01.02 Fasilitasi SDM Unggul	RAL 02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.05. Kesekretariatan Negara	Layanan TPN-065 Layanan Perpustakaan
Layanan TPN-066	Layanan Surat Menyurat Dan Arsip Dinamis	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	TPN.10.01 Pengelolaan Kearsipan	RAL 02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.05. Kesekretariatan Negara	Layanan TPN-066 Layanan Surat Menyurat Dan Arsip Dinamis
Layanan TPN-067	Layanan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Dinas Pertanian	TPN.03.04 Peningkatan Pertanian Perikanan dan Peternakan	RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.07. Pertanian	Layanan TPN-067 Layanan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
Layanan TPN-068	Layanan Pembinaan Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Pertanian	Dinas Pertanian	TPN.03.04 Peningkatan Pertanian Perikanan dan Peternakan	RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.07. Pertanian	Layanan TPN-068 Layanan Pembinaan Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Pertanian
Layanan TPN-069	Layanan Fasilitasi Dan Sertifikasi Aset Tanah	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertahanan	TPN.05.03 Pengelolaan Pemanfaatan Tata Ruang	RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.22. Pertanahan	Layanan TPN-069 Layanan Fasilitasi Dan Sertifikasi Aset Tanah
Layanan TPN-070	Layanan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertahanan	TPN.05.03 Pengelolaan Pemanfaatan Tata Ruang	RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.21. Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal	Layanan TPN-070 Layanan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum
Layanan TPN-071	Layanan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertahanan	TPN.05.03 Pengelolaan Pemanfaatan Tata Ruang	RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.20. Perumahan	Layanan TPN-071 Layanan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni

ID Layanan	Nama Layanan	Unit Pelaksana Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
Layanan TPN-072	Layanan Rekomendasi Pengesahan Siteplan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertahanan	TPN.05.03 Pengelolaan Pemanfaatan Tata Ruang	RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.21. Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal	Layanan TPN-072 Layanan Rekomendasi Pengesahan Siteplan
Layanan TPN-073	Layanan Kesejahteraan Sosial	Dinas Sosial	TPN.08.01 Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial Keagamaan	RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.26. Sosial	Layanan TPN-073 Layanan Kesejahteraan Sosial
Layanan TPN-074	Layanan Data PPKS	Dinas Sosial	TPN.08.01 Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial Keagamaan	RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.26. Sosial	Layanan TPN-074 Layanan Data PPKS
Layanan TPN-075	Layanan Rujukan Terpadu (SLRT)	Dinas Sosial	TPN.08.01 Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial Keagamaan	RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.26. Sosial	Layanan TPN-075 Layanan Rujukan Terpadu (SLRT)
Layanan TPN-076	Layanan Terpadu Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja	TPN.08.01 Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial Keagamaan	RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.32. Ketenagakerjaan	Layanan TPN-076 Layanan Terpadu Ketenagakerjaan
Layanan TPN-077	Layanan Pelaporan Dan Akuntabilitas	Inspektorat	TPN.13.01 Penyelenggaraan Pengawasan	RAL 02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.07. Akuntabilitas Kinerja	Layanan TPN-077 Layanan Pelaporan Dan Akuntabilitas
Layanan TPN-078	Layanan Informasi Rumah Sakit	Rumah Sakit Umum Daerah	TPN.02.01 Pengelolaan Kesehatan Masyarakat	RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.25. Kesehatan	Layanan TPN-078 Layanan Informasi Rumah Sakit
Layanan TPN-079	Layanan Pendaftaran Pasien	Rumah Sakit Umum Daerah	TPN.02.01 Pengelolaan Kesehatan Masyarakat	RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.25. Kesehatan	Layanan TPN-079 Layanan Pendaftaran Pasien
Layanan TPN-080	Layananan Rekam Medis	Rumah Sakit Umum Daerah	TPN.02.01 Pengelolaan Kesehatan Masyarakat	RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.25. Kesehatan	Layanan TPN-080 Layananan Rekam Medis
Layanan TPN-081	Layanan Pelaporan	SatpolPP	TPN.08.02 Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	RAL 02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.07. Akuntabilitas Kinerja	Layanan TPN-081 Layanan Pelaporan

### C. Analisis Diagram Layanan

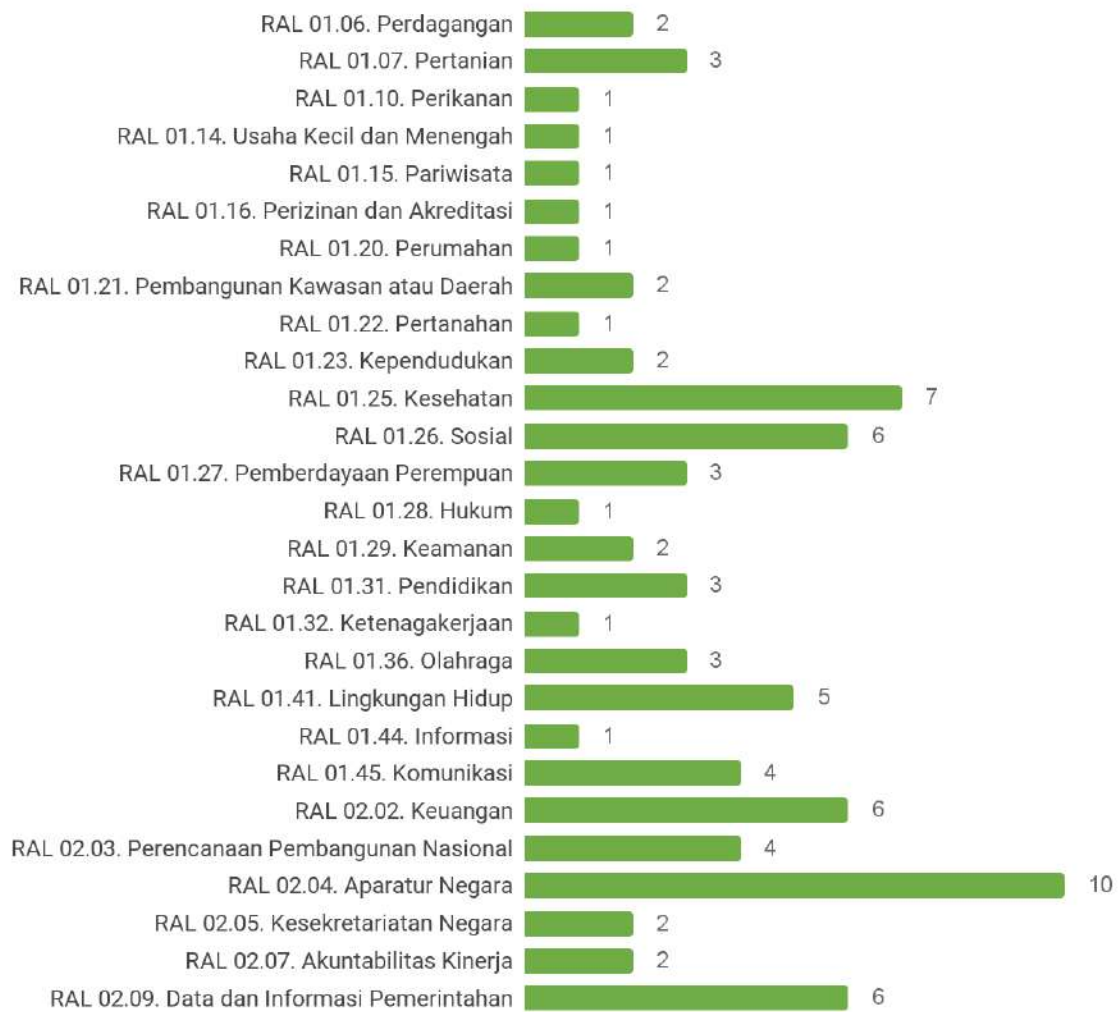
Analisa terhadap kondisi Layanan eksisting dapat dijabarkan sebagai berikut :



**Grafik 3.4.1** RAL Level 1

Untuk RAL Level 1 penyesuaian dengan Standar Nasional, dimana ada 63,0% (51 Layanan) Merupakan Layanan Publik, dan 37,0% (30 Layanan) Merupakan Layanan Administrasi Pemerintahan.

## RAL Level 2



**Grafik 3.4.2** RAL Level 2

Untuk RAL Level 2 penyesuaian dengan Standar Nasional, Paling Banyak pada RAL 02.04 Aparatur Negara (10 Layanan), dan Paling Sedikit pada RAL 01.10 Perikanan, RAL 01.14 Usaha Kecil dan Menengah, RAL 01.15 Pariwisata, RAL 01.16 Perizinan dan Akreditasi, RAL 01.20 Perumahan, RAL 01.22 Pertanahan, RAL 01.28 Hukum, RAL 01.32 Ketenagakerjaan, RAL 01.44 Informasi.

### 3.5. Arsitektur Aplikasi Eksisting

#### A. Katalog Aplikasi Eksisting

Analisis kondisi eksisting dilakukan untuk mendapatkan data terkait aplikasi yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Tapin dalam menjalankan layanan yang dimilikinya. Penggalan data aplikasi yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Tapin dilakukan dengan pengisian mandiri tiap SKPD dan survey. Setelah data didapatkan akan dilakukan rekap data dan disusun katalog aplikasi eksisting keseluruhan Kabupaten Tapin Hasil dari kondisi eksisting dijadikan acuan untuk Menyusun kondisi ideal yang diinginkan oleh Pemerintah Kabupaten Tapin. Berikut ini disajikan daftar aplikasi eksisting yang digunakan di lingkungan pemerintah Kabupaten Tapin baik aplikasi dari instansi pusat maupun aplikasi internal daerah.

**Tabel 3.5.1** Daftar Aplikasi yang dikelola oleh SKPD di Kabupaten Tapin.

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Basis Aplikasi	Tipe Lisensi Aplikasi	Nama Basis Data	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Data dan Informasi (Dependency)	→ Layanan (Dependency)
APP-001	Aplikasi Gaji Berkala	Sistem Informasi Kenaikan Gaji Berkala Pegawai	Web Based	Open Source		Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	RAA 01. Aplikasi Umum	RAA 01.02. Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Data Gaji	Layanan Gaji Berkala
APP-002	Kerja Tamasa	Sistem Informasi Pengelolaan TPP	Web Based	Open Source	MySQL	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	RAA 01. Aplikasi Umum	RAA 01.02. Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Data TPP	Layanan TPP
APP-003	SAPA Tapin	Sistem Informasi Kepegawaian	Web Based	Open Source	MySQL	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	RAA 01. Aplikasi Umum	RAA 01.02. Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Data Kepegawaian	Layanan Profil Kepegawaian
APP-004	SAPK BKN	Sistem Informasi Layanan Kepegawaian	Web Based	Open Source	MySQL	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	RAA 01. Aplikasi Umum	RAA 01.02. Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Data Kepegawaian	Layanan Profil Kepegawaian
APP-005	Sinormas Tapin	Sistem Informasi Monitoring Pelayanan Administrasi Pendaftaran Dan Pendataan	Web Based	Open Source	MySQL	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.02. Aplikasi Fungsi Tertentu	Data Ormas	

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Basis Aplikasi	Tipe Lisensi Aplikasi	Nama Basis Data	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Data dan Informasi (Dependency)	→ Layanan (Dependency)
		Ormas/Parpol								
APP-006	PINTBUK	Sistem Informasi Transaksi Tuntunai Bendahara	Web Based	Open Source	MySQL	Badan Keuangan dan Aset Daerah	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.01. Aplikasi Misi Tertentu	Data Anggaran / Keuangan	
APP-007	SIMDA	Sistem Informasi Keuangan	Desktop	Open Source	MySQL	Badan Keuangan dan Aset Daerah	RAA 01. Aplikasi Umum	RAA 01.02. Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Data Anggaran / Keuangan	Layanan Keuangan
APP-008	SIPD	Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah	Web Based	Open Source	MySQL	Badan Keuangan dan Aset Daerah	RAA 01. Aplikasi Umum	RAA 01.02. Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Data Anggaran / Keuangan	Layanan Keuangan
APP-009	Logistik Bencana	Sistem Informasi Bantuan Logistik Bencana	Web Based	Open Source		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.01. Aplikasi Misi Tertentu	Data Logistik	Layanan Informasi dan Bantuan Logistik Kebencanaan
APP-010	SIMDA Pendapatan	Sistem Informasi Penetapan Dan Penerimaan Daerah	Desktop	Open Source		Badan Pendapatan Daerah	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.02. Aplikasi Fungsi Tertentu	Data keuangan dan pajak retribusi daerah	Layanan Pajak Daerah
APP-011	SIMPBB	Sistem Informasi Penetapan Dan Penerimaan Daerah	Web Based	Open Source	MySQL	Badan Pendapatan Daerah	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.02. Aplikasi Fungsi Tertentu	Data keuangan dan pajak retribusi daerah	Layanan Retribusi Daerah
APP-012	SIMPBHTB	Sistem Informasi Penetapan Dan Penerimaan Pajak PBHTB	Web Based	Open Source	MySQL	Badan Pendapatan Daerah	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.02. Aplikasi Fungsi Tertentu	Data Arsip Statis dan Arsip Dinamis	
APP-013	e-Monev	Sistem Informasi Monitoring Evaluasi	Web Based	Open Source	MySQL	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan	RAA 01. Aplikasi Umum	RAA 01.02. Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Data Monitoring Evaluasi	Layanan Evaluasi
APP-014	e-Office	Sistem Informasi Tata Naskah Dinas Elektronik	Web Based	Open Source	MySQL	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan	RAA 01. Aplikasi Umum	RAA 01.02. Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Data Arsip Statis dan Arsip Dinamis	Layanan Surat Menyurat Dan Arsip Dinamis
APP-015	e-Starlitbang	Sistem Informasi Inovasi Dan Berita Penelitian Dan Pembangunan	Web Based	Open Source	MySQL	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan	RAA 01. Aplikasi Umum	RAA 01.02. Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Data Perencanaan Keuangan	Layanan Keuangan

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Basis Aplikasi	Tipe Lisensi Aplikasi	Nama Basis Data	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Data dan Informasi (Dependency)	→ Layanan (Dependency)
APP-016	e-Tamasa V1	Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Etamasa V1	Web Based	Open Source	MySQL	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan	RAA 01. Aplikasi Umum	RAA 01.02. Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Data Perencanaan Keuangan	Layanan Perencanaan Dan Penganggaran
APP-017	e-Tamasa V2	Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Etamasa V2	Web Based	Open Source	MySQL	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan	RAA 01. Aplikasi Umum	RAA 01.02. Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Data Perencanaan Keuangan	Layanan Perencanaan Dan Penganggaran
APP-018	KRISNA DAK	Sistem Informasi DAK Fisik	Web Based	Open Source		Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan	RAA 01. Aplikasi Umum	RAA 01.02. Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Data DAK Fisik	
APP-019	SI DAMA SUKA CETING	Sistem Informasi Dasa Wisma Supaya Kita Cegah Stunting	Web Based	Open Source	MySQL	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.01. Aplikasi Misi Tertentu	Data Stunting	
APP-020	JDIH	Sistem Informasi Produk Hukum	Web Based	Open Source	MySQL	Bagian Hukum	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.02. Aplikasi Fungsi Tertentu	Data Produk Hukum	Layanan Informasi Produk Hukum
APP-021	e-SAKIP	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Online	Web Based	Open Source		Bagian Organisasi	RAA 01. Aplikasi Umum	RAA 01.02. Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Data Akuntabilitas Kinerja	
APP-022	e-SAKIP REVIU	Sistem Informasi Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja	Web Based	Open Source	MySQL	Bagian Organisasi	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.02. Aplikasi Fungsi Tertentu	Data Akuntabilitas Kinerja	Layanan Pelaporan Dan Akuntabilitas
APP-023	PMPRB	Sistem Informasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Web Based	Open Source	MySQL	Bagian Organisasi	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.02. Aplikasi Fungsi Tertentu	Data Reformasi Birokrasi	
APP-024	SIMONA	Monitoring Dan Evaluasi Pada Pemerintah Daerah Provinsi Dan Kabupaten / Kota	Web Based	Open Source	MySQL	Bagian Organisasi	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.02. Aplikasi Fungsi Tertentu	Data Monitoring Evaluasi	



ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Basis Aplikasi	Tipe Lisensi Aplikasi	Nama Basis Data	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Data dan Informasi (Dependency)	→ Layanan (Dependency)
APP-025	SINOVIK	Sistem Informasi Inovasi Pelayanan Publik	Web Based	Open Source	MySQL	Bagian Organisasi	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.02. Aplikasi Fungsi Tertentu	Data Pelayanan Publik	
APP-026	SILPPD	Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Web Based	Open Source		Bagian Pemerintahan	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.02. Aplikasi Fungsi Tertentu	Data Pemerintahan Desa	
APP-027	LPSE	Sistem Informasi Pengadaan Secara Elektronik	Web Based	Open Source	MySQL	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	RAA 01. Aplikasi Umum	RAA 01.02. Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Data Pengadaan Barang dan Jasa	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
APP-028	SimantabKu	Sistem Informasi Penatausahaan Keuangan Sekretariat Daerah	Web Based	Open Source	MySQL	Bagian Umum dan Keuangan	RAA 01. Aplikasi Umum	RAA 01.02. Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Data informasi dan keuangan	
APP-029	SIAK	Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Web Based	Open Source		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.01. Aplikasi Misi Tertentu	Data Kependudukan	Layanan Kependudukan
APP-030	Survey Kepuasan Masyarakat	Aplikasi Survei Kepuasan Publik	Web Based	Open Source		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	RAA 01. Aplikasi Umum	RAA 01.01. Aplikasi Layanan Publik	Data Survey Kepuasan Masyarakat	Layanan Survey Masyarakat
APP-031	All Record Antigen	Sistem Informasi Penginputan Rapid Antigen	Web Based	Open Source	MySQL	Dinas Kesehatan	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.02. Aplikasi Fungsi Tertentu	Data Antigen dan PCR	Layanan Covid-19
APP-032	All Record PCR	Sistem Informasi Allrecord Pemeriksaan Pcr Tc-19	Web Based	Open Source	MySQL	Dinas Kesehatan	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.02. Aplikasi Fungsi Tertentu	Data Antigen dan PCR	Layanan Covid-19
APP-033	Aplikasi Keluarga Sehat	Sistem Informasi Keluarga Sehat	Web Based	Open Source	MySQL	Dinas Kesehatan	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.01. Aplikasi Misi Tertentu	Data Informasi Keluarga	Layanan Informasi Pusat Pembelajaran Keluarga
APP-034	e-KOHORT	Sistem Manajemen Data Kohort Kesehatan Ibu Dan Bayi Balita	Web Based	Open Source	MySQL	Dinas Kesehatan	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.01. Aplikasi Misi Tertentu	Data kesehatan Ibu dan Balita	Layanan Kesehatan
APP-035	e-LOGISTIK	Sistem Informasi Bank Data Ketersediaan Obat	Web Based	Open Source	MySQL	Dinas Kesehatan	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.01. Aplikasi Misi Tertentu	Data Ketersediaan Obat	Layanan Obat dan Resep

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Basis Aplikasi	Tipe Lisensi Aplikasi	Nama Basis Data	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Data dan Informasi (Dependency)	→ Layanan (Dependency)
APP-036	KOMDAT	Sistem Informasi Untuk Mengumpulkan Data Informasi Secara Berkala Yang Bersumber Dari Dinas Kesehatan Kab/Kota Dan Dinas Kesehatan Provinsi	Web Based	Open Source	MySQL	Dinas Kesehatan	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.01. Aplikasi Misi Tertentu	Data Informasi, Layanan, Kesehatan	
APP-037	KPCPEN	Sistem Informasi Pemulihan Ekonomi Nasional	Web Based	Open Source	MySQL	Dinas Kesehatan	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.02. Aplikasi Fungsi Tertentu	Data Ekonomi Sosial	
APP-038	MPDN	Sistem Informasi terkait dengan Kematian Maternal dan Perinatal	Web Based	Open Source	MySQL	Dinas Kesehatan	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.01. Aplikasi Misi Tertentu	Data Kematian	
APP-039	PPCOVID	Sistem Informasi Data Covid	Web Based	Open Source	Mysql	Dinas Kesehatan	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.02. Aplikasi Fungsi Tertentu	Data Covid	Layanan Covid-19
APP-040	Program Pelaporan ISPA	Sistem Pelaporan Ispa	Desktop	Open Source	MySQL	Dinas Kesehatan	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.01. Aplikasi Misi Tertentu	Data Penyakit	
APP-041	PWS IMUNISASI	Sistem Pelaporan Dan Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) Program Imunisasi Dengan Aplikasi Data Entri Imunisasi (DETI)	Desktop	Open Source	MySQL	Dinas Kesehatan	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.02. Aplikasi Fungsi Tertentu	Data Imunisasi	
APP-042	SIHA	Sistem Informasi Hiv/Aids Dan Ims	Web Based	Open Source	MySQL	Dinas Kesehatan	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.01. Aplikasi Misi Tertentu	Data Penyakit	
APP-043	SIPK	Sistem Informasi Penatausahaan Keuangan	Desktop	Open Source	MySQL	Dinas Kesehatan	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.01. Aplikasi Misi Tertentu	Data Anggaran / Keuangan	
APP-044	SIPNAP	Sistem Informasi Pelaporan Penggunaan Sediaan Jadi Narkotika & Psikotropika Nasional	Web Based	Open Source	MySQL	Dinas Kesehatan	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.01. Aplikasi Misi Tertentu	Data KKN	
APP-045	SIPTM	Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular	Web Based	Open Source	MySQL	Dinas Kesehatan	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.02. Aplikasi Fungsi Tertentu	Data Penyakit	

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Basis Aplikasi	Tipe Lisensi Aplikasi	Nama Basis Data	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Data dan Informasi (Dependency)	→ Layanan (Dependency)
APP-046	SISFO Gizi Terpadu	Sistem Informasi Gizi Terpadu	Web Based	Open Source	MySQL	Dinas Kesehatan	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.02. Aplikasi Fungsi Tertentu	Data Gizi	
APP-047	SISKOHAT	Sistem Informasi Kesehatan Haji Indonesia	Web Based	Open Source	MySQL	Dinas Kesehatan	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.01. Aplikasi Misi Tertentu	Data Kesehatan Haji	
APP-048	SISMAL	Sistem Informasi Surveilans Malaria	Web Based	Open Source	MySQL	Dinas Kesehatan	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.01. Aplikasi Misi Tertentu	Data Malaria	
APP-049	SITB	Sistem Informasi Tuberkulosis	Web Based	Open Source	MySQL	Dinas Kesehatan	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.01. Aplikasi Misi Tertentu	Data Penyakit	
APP-050	SKDR	Sistem Informasi Perkembangan Trend Suatu Penyakit Menular	Web Based	Open Source	MySQL	Dinas Kesehatan	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.01. Aplikasi Misi Tertentu	Data Penyakit	
APP-051	SMILE	Sistem Monitoring Imunisasi Dan Logistik Secara Elektronik	Web Based	Open Source	MySQL	Dinas Kesehatan	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.01. Aplikasi Misi Tertentu	Data Imunisasi	
APP-052	Sertifikasi Beras	Sistem Informasi Sertifikasi Beras	Web Based	Open Source		Dinas Ketahanan Pangan	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.01. Aplikasi Misi Tertentu	Data Harga Pangan	
APP-053	Monev SPBE	Sistem Informasi Evaluasi SPBE	Web Based	Open Source		Dinas Komunikasi dan Informatika	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.01. Aplikasi Misi Tertentu	Data Monitoring Evaluasi	Layanan Evaluasi
APP-054	SIDAK	Sistem Informasi Data Pemerintahan	Web Based	Open Source	MySQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.02. Aplikasi Fungsi Tertentu	Data informasi, data pemerintahan, data perlengkapan, data pemeliharaan	
APP-055	Sipenari Japin	Sistem Informasi Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	Mobile	Open Source		Dinas Komunikasi dan Informatika	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.02. Aplikasi Fungsi Tertentu	Data Anggaran / Keuangan	Layanan Pelaporan Dan Akuntabilitas
APP-056	SP4N LAPOR!	Sistem Informasi Pengaduan	Web Based	Open Source		Dinas Komunikasi dan Informatika	RAA 01. Aplikasi Umum	RAA 01.01. Aplikasi Layanan Publik	Data Aduan	Layanan Pengaduan

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Basis Aplikasi	Tipe Lisensi Aplikasi	Nama Basis Data	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Data dan Informasi (Dependency)	→ Layanan (Dependency)
										Masyarakat
APP-057	TIK	Sistem Informasi Identifikasi Data Tik	Web Based	Open Source	MySQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.01. Aplikasi Misi Tertentu	Data Identifikasi TIK	
APP-058	Arsip Surat	Aplikasi Surat Menyurat Dinas Pupr	Web Based	Open Source	MySQL	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.01. Aplikasi Misi Tertentu	Data Arsip Statis dan Arsip Dinamis	
APP-059	SI-Jantan	Aplikasi Pelaporan Jalan Dan Jembatan	Web Based	Open Source	MySQL	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.01. Aplikasi Misi Tertentu	Data Laporan Jalan dan Jembatan	
APP-060	Besign	Tanda Tangan Elektronik	Web Based	Open Source		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.01. Aplikasi Misi Tertentu	Data TTD Elektronik	
APP-061	SESKUDES	Sistem Informasi Perencanaan Keuangan Untuk Desa	Desktop	Open Source		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.01. Aplikasi Misi Tertentu	Data Perencanaan Keuangan	Layanan Informasi Keuangan Desa
APP-062	OSS RBA	Sistem Informasi Perizinan	Web Based	Open Source	MySQL	Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu	RAA 01. Aplikasi Umum	RAA 01.01. Aplikasi Layanan Publik	Data Perizinan OSS dan Non OSS	Layanan Perizinan
APP-063	SI CANTIK	Sistem Informasi Perizinan	Web Based	Open Source	MySQL	Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu	RAA 01. Aplikasi Umum	RAA 01.01. Aplikasi Layanan Publik	Data Perizinan OSS dan Non OSS	Layanan Perizinan
APP-064	PPDB	Sistem Informasi Pendaftaran Siswa Baru	Web Based	Open Source		Dinas Pendidikan	RAA 01. Aplikasi Umum	RAA 01.01. Aplikasi Layanan Publik	Data Pendaftaran Siswa Baru	Layanan Pendidikan
APP-065	SIGUCAR	Sistem Informasi Guru Boleh Terpencar Berkala Selalu Lancar	Web Based	Open Source	MySQL	Dinas Pendidikan	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.02. Aplikasi Fungsi Tertentu	Data Guru dan Siswa	Layanan Pendidikan
APP-066	E-Visum BKKBN	Sistem Informasi Pendukung Kinerja PKB/PLKB Di Lini Lapangan	Web Based	Open Source	MySQL	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.02. Aplikasi Fungsi Tertentu	Data Kinerja PKB/PLKB	
APP-067	Kampung KB Online	Sistem Informasi Statistik Dan Pengelolaan Data Di Tingkat Kampung Kb	Web Based	Open Source	MySQL	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.01. Aplikasi Misi Tertentu	Data Keluarga Berencana	

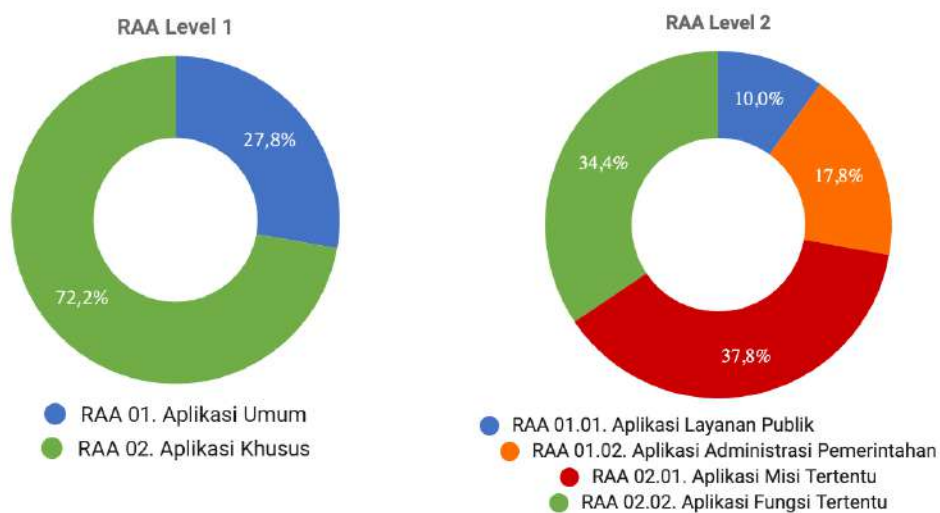
ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Basis Aplikasi	Tipe Lisensi Aplikasi	Nama Basis Data	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Data dan Informasi (Dependency)	→ Layanan (Dependency)
APP-068	Morena BKKBN	Sistem Informasi Pelaporan, Perencanaan, Monitoring Dan Evaluasi Dak	Web Based	Open Source	MySQL	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.02. Aplikasi Fungsi Tertentu	Data Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi DAK	
APP-069	NEW SIGA	Sistem Informasi Pengelolaan Data Dan Pengendalian Lapangan	Web Based	Open Source	MySQL	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.01. Aplikasi Misi Tertentu	Data Informasi Keluarga	Layanan Keluarga Berencana
APP-070	Pembinaan Kader	Website Pembinaan Kader	Web Based	Open Source		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.02. Aplikasi Fungsi Tertentu	Data Informasi	
APP-071	SIRIKA	Sistem Informasi Pengelolaan Dan Pelaporan Logistik Alat Dan Obat Kontrasepsi	Web Based	Open Source	MySQL	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.01. Aplikasi Misi Tertentu	Data Alat dan Obat Kontrasepsi	Layanan Keluarga Berencana
APP-072	Program database toko pasar	Pembuatan Surat Perjanjian Sewa Menyewa Toko	Desktop	Open Source	NULL	Dinas Perdagangan	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.02. Aplikasi Fungsi Tertentu	Data Arsip Statis dan Arsip Dinamis	
APP-073	SIDATU	Sistem Informasi Retribusi Pasar	Web Based	Open Source		Dinas Perdagangan	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.01. Aplikasi Misi Tertentu	Data Retribusi Pasar	Layanan Retribusi Daerah
APP-074	SIPIKAT	Sistem Informasi Berbasis Web Untuk Meningkatkan Daya Saing Produk Hasil Industri	Web Based	Open Source	MySQL	Dinas Perindustrian	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.02. Aplikasi Fungsi Tertentu	Data Industri	
APP-075	INLISLITE	Sistem Informasi Perpustakaan Digital Nasional Indonesia	Desktop	Open Source	MySQL	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	RAA 01. Aplikasi Umum	RAA 01.01. Aplikasi Layanan Publik	Data Perpustakaan dan Katalog	Layanan Perpustakaan
APP-076	SRIKANDI	Sistem Informasi Kearsipan Dinamis	Web Based	Open Source	Mysql	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	RAA 01. Aplikasi Umum	RAA 01.02. Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Data Arsip Statis dan Arsip Dinamis	Layanan Surat Menyurat Dan Arsip Dinamis
APP-077	SIRINTIK	Sistem Informasi Monitoring Statistik Pertanian	Web Based	Open Source	MySQL	Dinas Pertanian	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.02. Aplikasi Fungsi Tertentu	Data Pertanian	
APP-078	Datusoban	Data Pemerlu Pelayanan Sosial (Ppks) Dan Potensi	Web Based	Open Source		Dinas Sosial	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.02. Aplikasi Fungsi Tertentu	Data Terpadu Kesejahteraan	

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Basis Aplikasi	Tipe Lisensi Aplikasi	Nama Basis Data	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Data dan Informasi (Dependency)	→ Layanan (Dependency)
		Sumber Kesejahteraan Sosial (Psks)							Sosial	
APP-079	SIDATUK	Sistem Informasi Fakir Miskin Daerah	Web Based	Open Source		Dinas Sosial	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.01. Aplikasi Misi Tertentu	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	
APP-080	SIKS-NG	Aplikasi Sistem Kesejahteraan Sosial-Next Generation	Web Based	Open Source		Dinas Sosial	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.01. Aplikasi Misi Tertentu	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	
APP-081	SISNAKER	Sistem Informasi Ketenagakerjaan Berbasis Online	Web Based	Open Source		Dinas Tenaga Kerja	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.01. Aplikasi Misi Tertentu	Data Ketenagakerjaan	Layanan Terpadu Ketenagakerjaan
APP-082	e-AUDITEE	Sistem Informasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK	Web Based	Open Source	MySQL	Inspektorat	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.01. Aplikasi Misi Tertentu	Data Tindak Lanjut	
APP-083	e-LHKPN	Sistem Informasi Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara	Web Based	Open Source	MySQL	Inspektorat	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.02. Aplikasi Fungsi Tertentu	Data Harta Kekayaan ASN	
APP-084	JAGA	Sistem Informasi Pencegahan Korupsi	Web Based	Open Source	MySQL	Inspektorat	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.01. Aplikasi Misi Tertentu	Data KKN	
APP-085	SIHARKA	Sistem Informasi Pelaporan Harta Kekayaan Asn	Web Based	Open Source	MySQL	Inspektorat	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.02. Aplikasi Fungsi Tertentu	Data Harta Kekayaan ASN	
APP-086	KhanzaLite	Sistem Informasi Rumah Sakit Online	Web Based	Open Source		Rumah Sakit Umum Daerah	RAA 01. Aplikasi Umum	RAA 01.01. Aplikasi Layanan Publik	Data Layanan Rumah Sakit	Layanan Informasi Rumah Sakit
APP-087	Pendaftaran Online Rumah Sakit	Website Pendaftaran Rumah Sakit	Web Based	Open Source	MySQL	Rumah Sakit Umum Daerah	RAA 01. Aplikasi Umum	RAA 01.01. Aplikasi Layanan Publik	Data Layanan Rumah Sakit	
APP-088	SIMRS Khanza	Sistem Informasi Rumah Sakit Offline	Desktop	Open Source		Rumah Sakit Umum Daerah	RAA 01. Aplikasi Umum	RAA 01.01. Aplikasi Layanan Publik	Data Layanan Rumah Sakit	Layanan Informasi Rumah Sakit
APP-089	SIN@RS	Sistem Informasi Akutansi	Desktop	Open Source	MySQL	Rumah Sakit Umum Daerah	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.02. Aplikasi Fungsi Tertentu	Data Anggaran / Keuangan	Layanan Keuangan

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Basis Aplikasi	Tipe Lisensi Aplikasi	Nama Basis Data	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Data dan Informasi (Dependency)	→ Layanan (Dependency)
APP-090	JDIH DPRD	Produk Hukum DPRD	Web Based	Open Source	MySQL	Sekretariat DPRD	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.02. Aplikasi Fungsi Tertentu	<i>Data Produk Hukum</i>	Layanan Informasi Produk Hukum

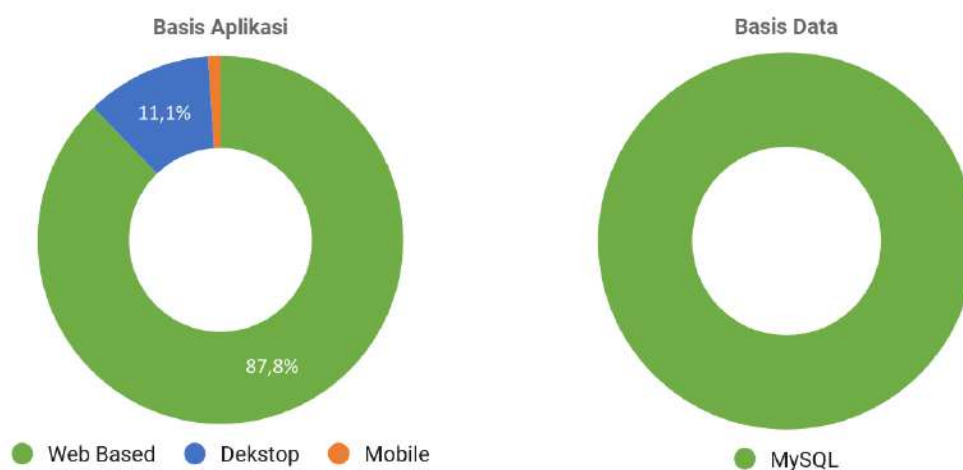
## B. Analisis Diagram Aplikasi Eksisting

Analisa terhadap kondisi aplikasi eksisting dapat dijabarkan sebagai berikut:



**Grafik 3.5.1** Referensi Arsitektur Aplikasi

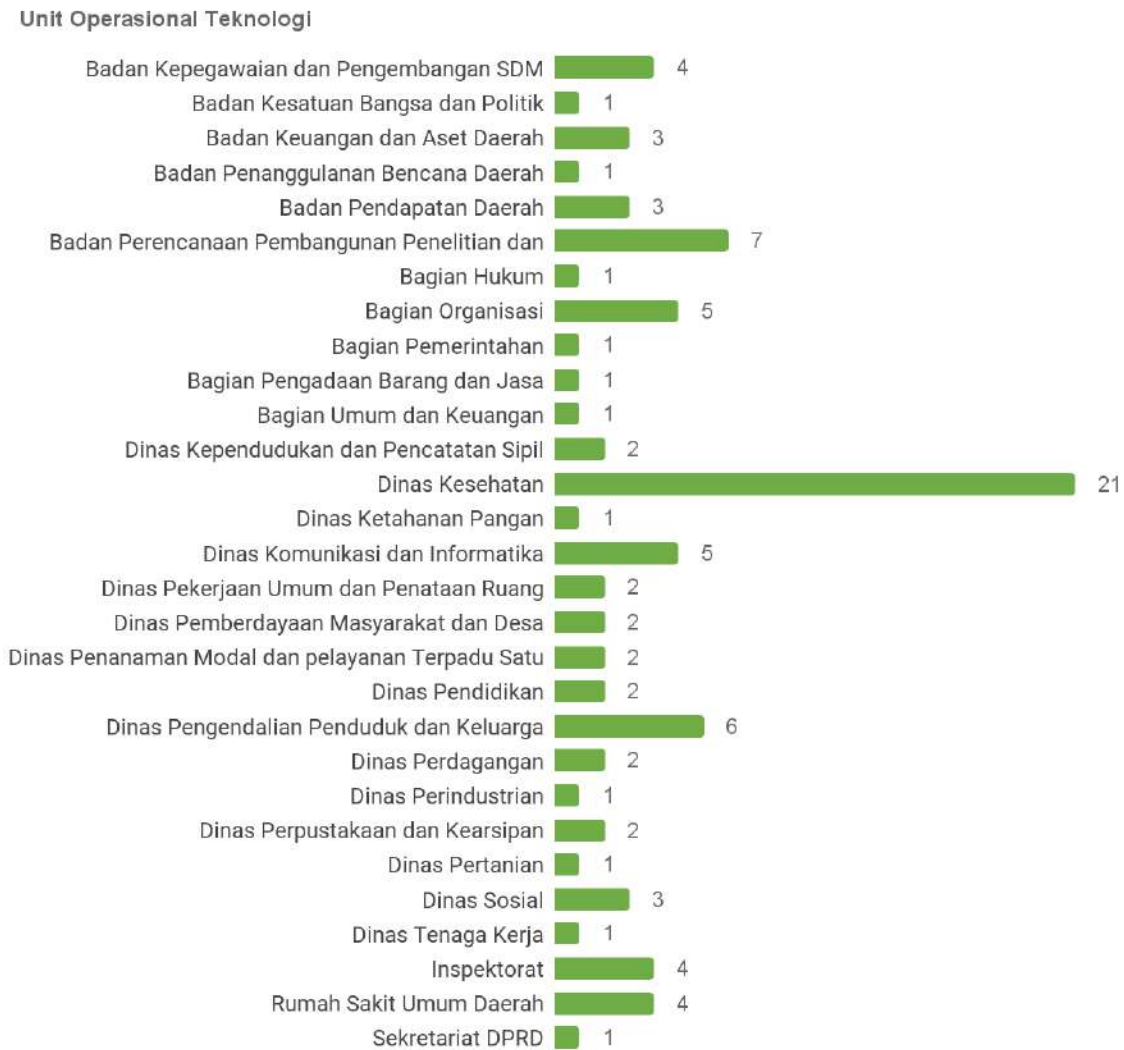
Terdapat 90 aplikasi yang eksisting dimana sesuai Referensi Arsitektur Level 1, 72,2% (69 aplikasi) merupakan RAA 01. Aplikasi Khusus, dan 27,8% (25 aplikasi) merupakan RAA 02. Aplikasi Umum. Untuk Referensi Arsitektur Level 2 dimana 10,0% (9 Aplikasi) merupakan RAA 01.01 Aplikasi Layanan Publik, dilanjut 17,8% (15 Aplikasi) merupakan RAA 01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan, dilanjut 37,8% (34 Aplikasi) merupakan Aplikasi RAA 02.01 Misi Tertentu, dan 34,4% (31 Aplikasi) merupakan Aplikasi RAA 02.02 Fungsi Tertentu di Perangkat Daerah.



**Grafik 3.5.2** Kondisi Teknologi Sistem Informasi (ii)

Untuk Kondisi Teknologi Basis Aplikasi yang digunakan untuk saat ini Web Based sebanyak 87,8% (79 aplikasi), dilanjut dengan Desktop sebanyak 11,1% (10 aplikasi) dan yang ketiga adalah platform Mobile dengan jumlah sebanyak 1,1% (1 Aplikasi). Untuk Kondisi Teknologi Basis Data pada Aplikasi Eksisting dimana 100% (66 aplikasi) merupakan Database MySQL.



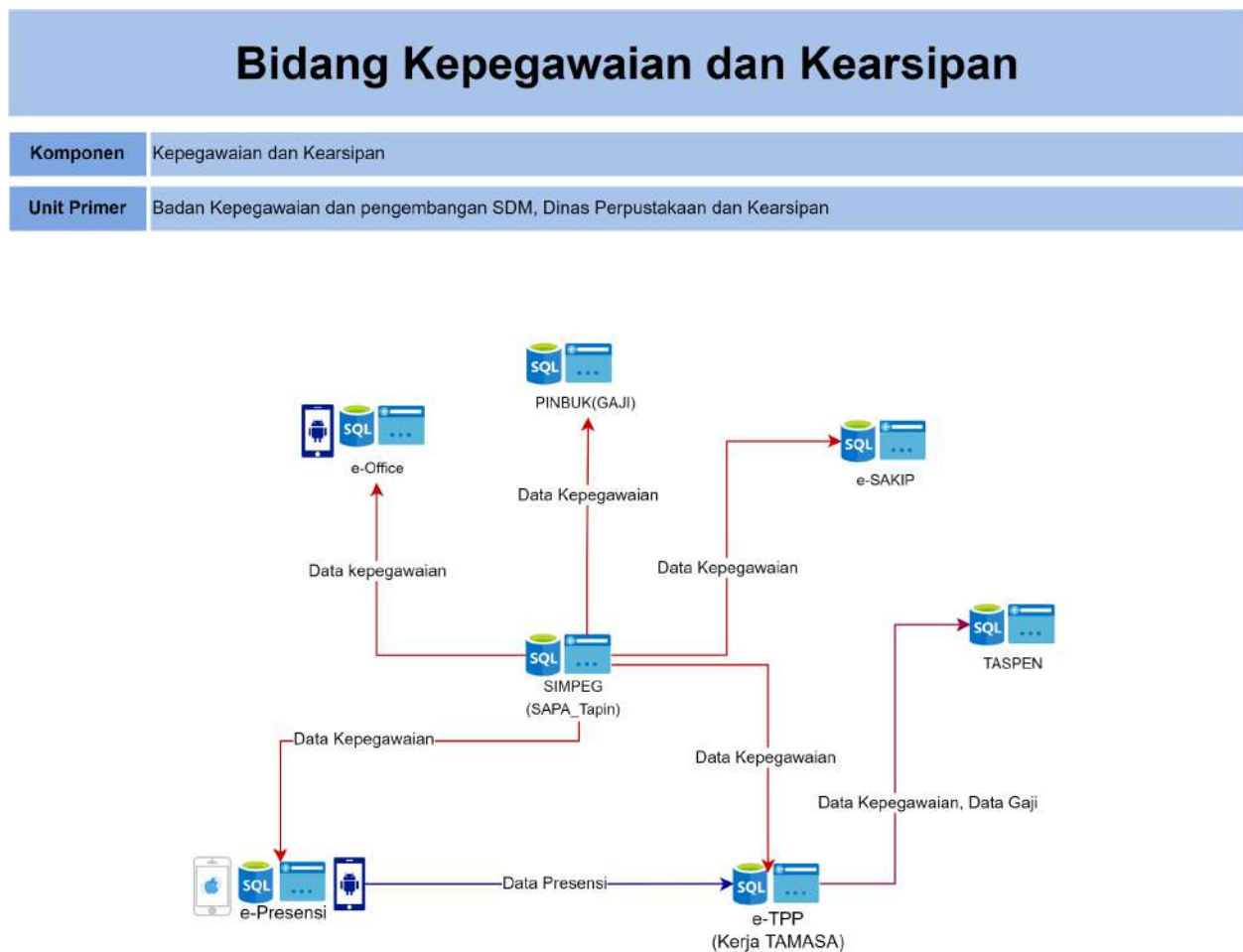


**Grafik 3.5.3** SKPD Pengelola Aplikasi Eksisting

Pada Grafik 3.5.4 dapat dilihat SKPD Pengelola Aplikasi. pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM terdapat 4 aplikasi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdapat 1 aplikasi, Badan Keuangan dan Aset Daerah terdapat 3 aplikasi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdapat 1 aplikasi, Badan Pendapatan daerah terdapat 3 aplikasi, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah terdapat 7 aplikasi, Bagian Hukum terdapat 1 Aplikasi, Bagian Organisasi terdapat 5 aplikasi, Bagian Pemerintahan 1 aplikasi, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa terdapat 1 aplikasi, Bagian umum dan Keuangan terdapat 1 aplikasi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdapat 2 aplikasi, Dinas Kesehatan terdapat 21 aplikasi, Dinas Komunikasi dan Informatika terdapat 5 aplikasi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdapat 2 aplikasi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdapat 2 aplikasi, Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu terdapat 2 aplikasi, Dinas Pendidikan terdapat 2 aplikasi, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdapat 6 aplikasi, Dinas Perdagangan terdapat 2 aplikasi, Dinas Perindustrian terdapat 1 aplikasi, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan terdapat 2 aplikasi, Dinas Pertanian terdapat 1 aplikasi, Dinas Sosial terdapat 3 aplikasi, Dinas Tenaga Kerja terdapat 1 aplikasi, Inspektorat terdapat 4 aplikasi, Rumah Sakit Umum Daerah terdapat 4 aplikasi, Sekretariat terdapat DPRD 1 aplikasi.

### C. Diagram Integrasi Antar Aplikasi

Integrasi aplikasi ini dimulai karena adanya kebutuhan pertukaran data/informasi antara aplikasi yang satu dengan aplikasi yang lain. Kebutuhan dari operasional pemerintahan mengharapkan data/informasi yang dimiliki oleh sebuah aplikasi dari suatu SKPD harus dikirimkan ke aplikasi lain yang dimiliki SKPD yang lain. Kebutuhan pertukaran data/informasi ini pun bisa berlaku dalam skala lebih luas, Seperti integrasi antara pemerintah kabupaten Tapin dengan instansi pusat untuk kepentingan pelaporan dan sebagainya. berikut ini digambarkan aplikasi yang sudah terintegrasi di lingkungan pemerintah kabupaten Tapin.

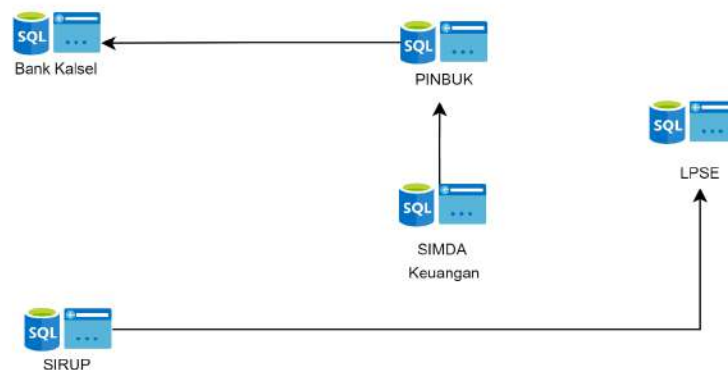


**Gambar 3.5.1** Integrasi Antar Aplikasi pada Bidang Urusan Kepegawaian dan Kearsipan

Pada gambar 3.5.1 menunjukkan diagram Integrasi antar aplikasi kabupaten Tapin di bidang Kepegawaian dan Kearsipan dengan unit primernya adalah badan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, serta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Pada bidang ini terdapat beberapa aplikasi yang digunakan seperti SIMPEG(SAPA\_Tapin), PINBUK(Gaji), e-SAKIP, TASPEN, e-TPP, e-Presensi, dan e-Office. Aplikasi SIMPEG (SAPA\_Tapin) menyediakan data kepegawaian yang digunakan

oleh PINBUK(Gaji), e-SAKIP, e-TPP, e-Presensi, dan e-Office. kemudian e-TPP melakukan pengambilan data presensi dari aplikasi e-presensi. Sedangkan Taspen melakukan pengambilan data Gaji dan kepegawaian dari e-TPP (Kerja TAMASA).

Bidang Pengadaan Barang dan Jasa	
Komponen	Pengadaan Barang dan Jasa
Unit Primer	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

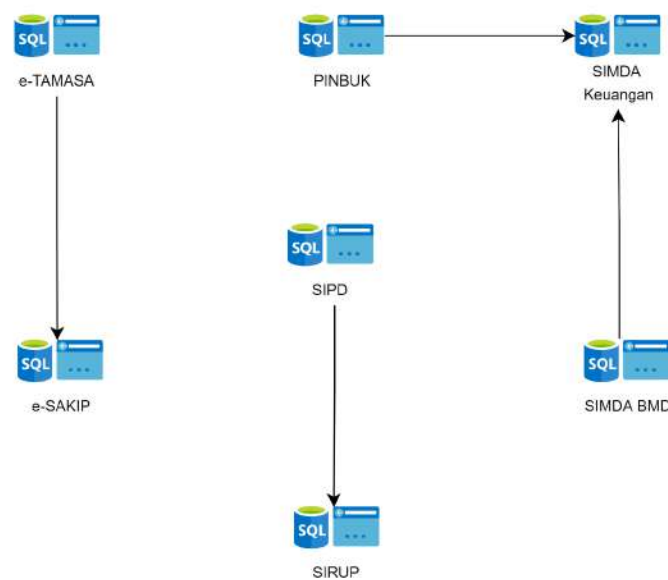


**Gambar 3.5.2** Integrasi Antar Aplikasi pada Bidang Pengadaan Barang dan Jasa

Gambar 3.5.5 menunjukkan integrasi antar aplikasi pada bidang pengadaan barang dan jasa dengan unit primernya adalah Bagian Pengadaan Barang dan Jasa. Dalam bidang ini terdapat beberapa aplikasi yang digunakan yaitu Bank Kalsel, PINBUK, LPSE, SIMDA Keuangan, dan SIRUP. Aplikasi PINBUK melakukan pengambilan data dari aplikasi SIMDA Keuangan. Sedangkan Bank kalsel melakukan pengambilan data dari aplikasi PINBUK. Kemudian aplikasi SIRUP melakukan penyajian data yang nantinya data tersebut akan diambil dari aplikasi SIRUP.

## Bidang Perencanaan, Penganggaran, Keuangan, dan Aset

<b>Komponen</b>	Perencanaan, Penganggaran, Keuangan, dan Aset
<b>Unit Primer</b>	Bagian Perencanaan dan Keuangan, Badan keuangan dan Aset Daerah



**Gambar 3.5.3** Integrasi Antar Aplikasi pada Bidang perencanaan, Penganggaran, Keuangan, dan Aset

Gambar 3.5.6 menunjukkan integrasi antar aplikasi di kabupaten Tapin pada bidang Perencanaan, Penganggaran, Keuangan, dan Aset. dalam bidang tersebut terdapat beberapa aplikasi yang digunakan diantaranya adalah PINBUK, SIMDA Keuangan, SIMDA BMD, SIRUP, SIPD, e-SAKIP, dan e-TAMASA. Aplikasi SIMDA Keuangan melakukan pengambilan data dari aplikasi SIMDA BMD dan PINBUK, Aplikasi SIRUP melakukan pengambilan data dari aplikasi SIPD. Kemudian aplikasi e-Sakip Melakukan Pengambilan data dari e-TAMASA.

## 3.6. Arsitektur Infrastruktur

### A. Infrastruktur SPBE

Infrastruktur pendukung SPBE yang telah dimiliki oleh Diskominfo Kabupaten Tapin meliputi Co-Location Server, Jaringan Data SKPD/UPT. Berikut ini adalah uraian dari komponen infrastruktur SPBE.

#### 1. Colocation Server

Server aplikasi ditempatkan (co-location) di salah satu perusahaan penyedia layanan co-location server (provider) yang berlokasi di Jakarta.

##### a. Teknologi

Aplikasi yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tapin sebagian berbasis web dan dapat diakses melalui internet.

**Tabel 3.6.1.** Aplikasi dan Teknologi

No	Aplikasi	Alamat URL	Bahasa Pemrograman	Kerja Kerja Pemrograman	Platform CMS	Sistem Operasi Server	Aplikasi Web Server
1	PUPR	<a href="https://dinaspuvr.tapinkab.go.id">https://dinaspuvr.tapinkab.go.id</a>	PHP		WordPress		Apache
2	PKK	<a href="http://pkk.tapinkab.go.id">http://pkk.tapinkab.go.id</a>	PHP	CodeIgniter		CentOS	Apache
3	TV	<a href="https://tv.tapinkab.go.id">https://tv.tapinkab.go.id</a>	PHP		WordPress		
4		<a href="https://siappbjp.tapinkab.go.id">https://siappbjp.tapinkab.go.id</a>	PHP				Apache
5	RSUD	<a href="https://rsud.tapinkab.go.id">https://rsud.tapinkab.go.id</a>	PHP				Apache
6	JDIH	<a href="http://jdih.tapinkab.go.id">http://jdih.tapinkab.go.id</a>	PHP			CentOS	Apache
7		<a href="https://simidibaper.dppkb.tapinkab.go.id">https://simidibaper.dppkb.tapinkab.go.id</a>	PHP				Apache
8		<a href="http://desasalba.tapinkab.go.id">http://desasalba.tapinkab.go.id</a>	PHP				
9	Perizinan	<a href="http://perijinan.tapinkab.go.id/home.php">http://perijinan.tapinkab.go.id/home.php</a>	PHP				Apache
10	KONI	<a href="http://koni.tapinkab.go.id">http://koni.tapinkab.go.id</a>	PHP		WordPress		Apache
11		<a href="http://dpmpstsp.tapinkab.go.id">http://dpmpstsp.tapinkab.go.id</a>	PHP		WordPress		Apache
12	Mail	<a href="https://webmail.tapinkab.go.id">https://webmail.tapinkab.go.id</a>					Apache
13		<a href="https://sinar-desa.tapinkab.go.id">https://sinar-desa.tapinkab.go.id</a>	PHP	CodeIgniter			Apache

14	Dukcapil	<a href="https://dukcapil.tapinkab.go.id">https://dukcapil.tapinkab.go.id</a>					Apache
15	Arsip	<a href="https://arsip.bpkad.tapinkab.go.id">https://arsip.bpkad.tapinkab.go.id</a>					Apache
16		<a href="https://sirintik.tapinkab.go.id">https://sirintik.tapinkab.go.id</a>					Apache
17		<a href="https://bappelitbang.tapinkab.go.id">https://bappelitbang.tapinkab.go.id</a>				CentOS	Apache
18		<a href="https://siemondiskominfo.tapinkab.go.id">https://siemondiskominfo.tapinkab.go.id</a>	PHP				Apache
19		<a href="https://e-starlitbang.tapinkab.go.id">https://e-starlitbang.tapinkab.go.id</a>	PHP	CodeIgniter			
20	DPRD	<a href="https://dprd.tapinkab.go.id">https://dprd.tapinkab.go.id</a>					Apache
21	Disbudpar	<a href="https://disbudpar.tapinkab.go.id">https://disbudpar.tapinkab.go.id</a>					Apache
22		<a href="https://habar.tapinkab.go.id">https://habar.tapinkab.go.id</a>	PHP		WordPress		Apache
23	Disnaker	<a href="https://disnaker.tapinkab.go.id">https://disnaker.tapinkab.go.id</a>	PHP	Laravel			Apache
24	E-SAKIP	<a href="http://esakip.tapinkab.go.id">http://esakip.tapinkab.go.id</a>	PHP	CodeIgniter		CentOS	Apache
25	BPKAD	<a href="https://bpkad.tapinkab.go.id">https://bpkad.tapinkab.go.id</a>	PHP		WordPress		Apache
26	SPEDE	<a href="https://sipede.tapinkab.go.id">https://sipede.tapinkab.go.id</a>	PHP		WordPress		Apache
27	DPRD	<a href="https://jdih.dprd.tapinkab.go.id">https://jdih.dprd.tapinkab.go.id</a>					Apache
28	SETDA	<a href="https://setda.tapinkab.go.id">https://setda.tapinkab.go.id</a>					Apache
29	LPSE	<a href="http://lpse.tapinkab.go.id/eproc4">http://lpse.tapinkab.go.id/eproc4</a>	PHP		WordPress	Debian	Apache
30	Inpektorat	<a href="https://inspektorat.tapinkab.go.id">https://inspektorat.tapinkab.go.id</a>					Apache

Berdasarkan tabel di atas dapat diperoleh informasi perihal teknologi dari aplikasi yang ada saat ini.

1. Bahasa pemrograman yang digunakan untuk pengembangan aplikasi menggunakan PHP.



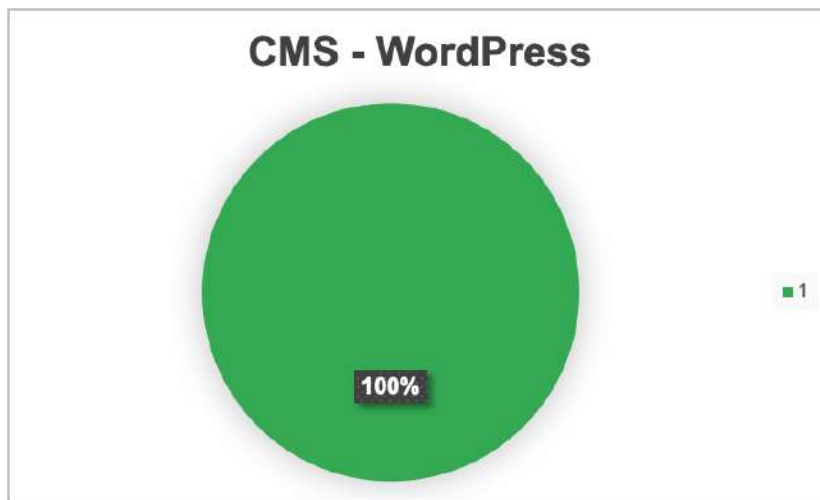
**Grafik 3.6.1.** Bahasa Pemrograman

2. Kerangka kerja (framework) pemrograman yang digunakan sebagian besar CodeIgniter (80%) disusul oleh Laravel (20%).



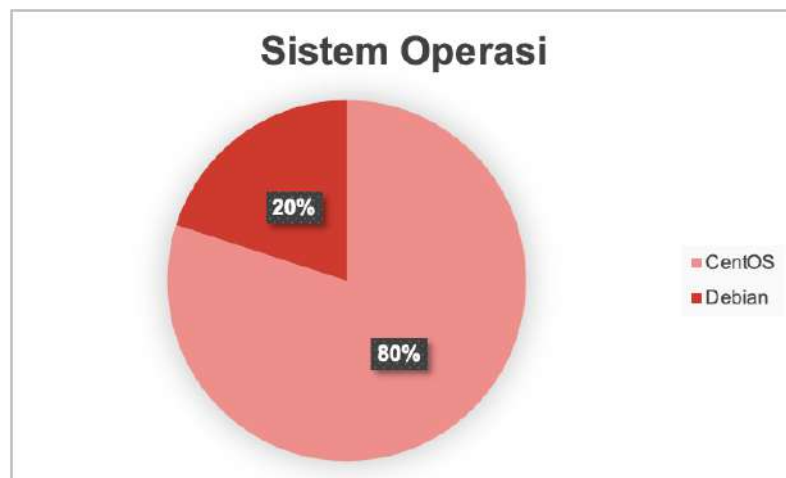
**Grafik 3.6.2..** Framework Bahasa Pemrograman

3. Content Management System (CMS) yang digunakan oleh beberapa aplikasi web yakni WordPress.



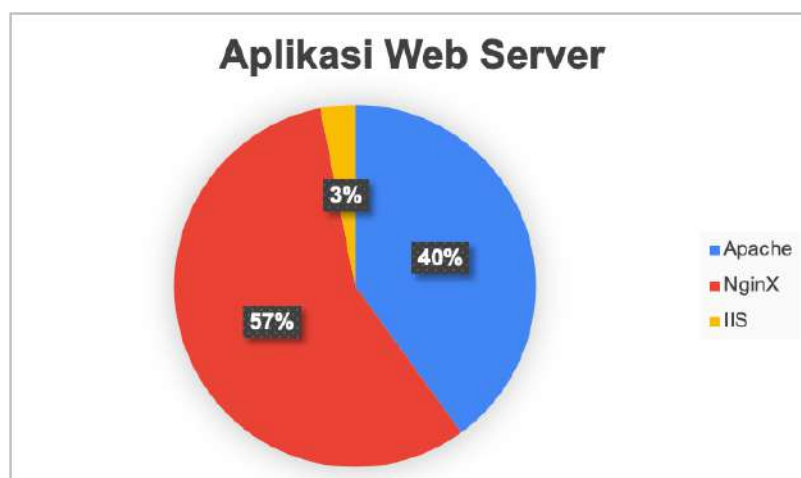
**Grafik 3.6.3.** Platform Content Management System (CMS)

4. Sistem Operasi Server yang digunakan oleh aplikasi web dari Distro Linux yakni CentOS (80%), dan Debian (20%).



**Grafik 3.6.4.** Sistem Operasi

5. Seluruh aplikasi Web Server yang digunakan adalah Apache (100%).



**Grafik 3.6.5** Aplikasi Web Server



## 2. Jaringan Intra Daerah

Jaringan intra pemerintah adalah jaringan data yang menghubungkan perangkat komputer, printer, server, dan lainnya antara Pusat Data dengan SKPD/UPT. Kondisi saat ini, Pemerintah Kabupaten Tapin belum memiliki jaringan intra pemerintah. Setiap SKPD/UPT menyelenggarakan jaringan data secara mandiri meliputi jaringan lokal (LAN), jaringan nir kabel (WiFi), dan jaringan internet.

### a. Jaringan Data Lokal (LAN) Diskominfo

Kondisi saat ini jaringan intra daerah masih dalam tahap pengembangan. Setiap SKPD/UPT memiliki dan mengelola jaringan datanya secara mandiri termasuk akses internet.

### b. Jaringan Internet

Kondisi saat ini setiap SKPD/UPT menyediakan akses internet secara mandiri dengan menggunakan provider seperti Telkom dengan produk Indihome.

### c. Jaringan Nirkabel (WiFi)

Kondisi saat ini setiap SKPD/UPT menyediakan akses jaringan nirkabel (WiFi) secara mandiri yang terhubung ke akses internet.

### d. Perangkat Jaringan

Kondisi saat ini setiap SKPD/UPT menyediakan perangkat jaringan secara mandiri yang meliputi switch akses, dan kabel jaringan.



**Gambar 3.6.1.** Perangkat Access Point Jaringan Nirkabel



**Gambar 3.6.2.** Rack Perangkat Jaringan

### **3. Sistem Penghubung Layanan Daerah**

Sistem penghubung layanan pemerintah adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin dan dengan pemerintah pusat. Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan integrasi antar Layanan SPBE. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah yang dikelola oleh Diskominfo Kabupaten Tapin menggunakan teknologi Application Programming Interface atau API yakni sebuah antarmuka yang digunakan untuk menghubungkan antara satu aplikasi dengan aplikasi yang lain, baik dari platform yang sama maupun lintas platform.

Kondisi saat ini, Diskominfo Kabupaten Tapin sedang dalam tahap pengembangan integrasi aplikasi dengan menggunakan teknologi API.

### **3.7. Arsitektur Keamanan**

Kondisi saat ini Pemerintah Kabupaten Tapin belum memiliki kebijakan, pedoman, standar teknis, dan prosedur keamanan SPBE.

# **Bab IV**

## **Analisa**

### **Kesenjangan SPBE**

## 4.1. Analisa Kesenjangan SPBE

Untuk mengetahui kebutuhan mendasar dari Pemerintah Kabupaten Tapin maka perlu dilakukan analisis kesenjangan agar pengembangan SPBE yang dilakukan berdasarkan kondisi eksisting dan dibandingkan dengan kondisi ideal. Berikut merupakan detail perbandingan kondisi eksisting dengan kondisi ideal yang seharusnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tapin.

**Tabel 4.1.1** Perbandingan Kondisi Eksisting dan Kondisi Ideal

#	Domain	Kondisi Eksisting	Kondisi Ideal
1	Kebijakan	Belum adanya kebijakan SPBE mengenai (arsitektur SPBE, manajemen data, layanan jaringan intra pemerintah, sistem penghubung layanan pemerintah, keamanan informasi, dan audit TIK).	Adanya kebijakan SPBE mengenai (arsitektur SPBE, manajemen data, layanan jaringan intra pemerintah, sistem penghubung layanan pemerintah, keamanan informasi, dan audit TIK).
2	Manajemen	Belum adanya penerapan manajemen SPBE mengenai (manajemen risiko, manajemen data, manajemen keamanan informasi, manajemen layanan, manajemen SDM, manajemen aset TIK, manajemen pengetahuan, manajemen perubahan).	Adanya penerapan manajemen SPBE mengenai (manajemen risiko, manajemen data, manajemen keamanan informasi, manajemen layanan, manajemen SDM, manajemen aset TIK, manajemen pengetahuan, manajemen perubahan).
3	Manajemen	Belum melakukan Audit TIK yang terdiri atas Audit Infrastruktur, Audit Aplikasi, Audit Keamanan Informasi.	Melakukan Audit TIK yang terdiri atas Audit Infrastruktur, Audit Aplikasi, Audit Keamanan Informasi.
4	Data	Belum ada awareness mengenai Forum Satu Data Indonesia.	Adanya awareness mengenai Forum Satu Data Indonesia.
5	Aplikasi	Beberapa aplikasi internal belum menyediakan web service agar terintegrasi dengan aplikasi lain.	Adanya Integrasi antar aplikasi internal pemerintah kabupaten Tapin
6	Aplikasi	Beberapa aplikasi dari pusat belum menyediakan web service agar terintegrasi dengan Aplikasi Tapin.	Adanya Integrasi antar aplikasi dari Pusat dengan daerah.
7	Proses Bisnis	Belum ada pemetaan proses bisnis dan beberapa proses bisnis Pemerintah Kabupaten Tapin belum terdigitalisasi dan terintegrasi.	Adanya peta proses bisnis dan layanan dan proses bisnis Pemerintah Kabupaten Tapin terdigitalisasi dan terintegrasi.
8	Aplikasi	Beberapa aplikasi tidak ada dokumentasi aplikasi dari pihak ketiga.	Kedepan dalam proses pengembangan aplikasi dengan pihak ketiga harus menyertakan dokumentasi aplikasi dari pihak ketiga.
9	Infrastruktur (Pusat Data)	Tidak ada ruang server atau Pusat Data	Tersedianya ruang server atau pusat data sebagai pusat lokasi server – server SKPD/UPT.  Tersedia ruang untuk penempatan server – server pengembangan ( <i>development</i> ), dan perangkat jaringan.

#	Domain	Kondisi Eksisting	Kondisi Ideal
10	Infrastruktur (Pusat Data)	Server aplikasi belum dilakukan backup maupun replikasi.	Perlunya dilakukan proses backup terhadap server aplikasi di lokasi yang berbeda dengan pusat data.
12	Infrastruktur (Jaringan Intra Pemerintah)	Belum tersedianya jaringan intra pemerintah daerah yang menghubungkan antara SKPD/UPT dengan Pusat Data/ Pusat Operasi Jaringan ( <i>Network Operation Center</i> ). Pengembangan jaringan dilakukan secara mandiri oleh SKPD/UPT.	<p>Pengadaan jaringan intra pemerintah daerah Kabupaten Tapin yang menghubungkan antara SKPD/UPT dengan NOC meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Jaringan LAN dan nir kabel SKPD/UPT.</li> <li>· Jaringan Internet untuk akses internet pengguna dan server.</li> <li>· Jaringan Kampus (<i>Campus Network</i>) yang menghubungkan jaringan SKPD/UPT di kompleks kantor pemerintah Kabupaten Tapin.</li> <li>· Jaringan <i>Metropolitan Area Network</i> (MAN) yang menghubungkan antara SKPD/UPT dengan NOC.</li> <li>· Jaringan <i>Wide Area Network</i> (WAN) yang menghubungkan antara NOC dengan Kementerian/Lembaga, dan DRC.</li> </ul> <p>Operasional jaringan intra pemerintah daerah dilakukan oleh Diskominfo.</p>
19	Infrastruktur (Sistem Penghubung Layanan Daerah)	Sistem Penghubung Layanan Daerah sedang dalam tahap pengembangan dengan menggunakan teknologi API ( <i>Application Programming Interface</i> ).	<p>Pengembangan server:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· API Gateway Internal untuk melayani integrasi antara aplikasi internal kabupaten Tapin melalui koneksi intranet.</li> <li>· API Gateway Eksternal untuk melayani integrasi antara aplikasi internal Kabupaten Tapin dengan Kementerian/Lembaga melalui koneksi internet.</li> </ul>
20	Keamanan (Arsitektur Keamanan SPBE)	Pemerintah Kabupaten Tapin belum memiliki Kebijakan atau Pedoman Keamanan Informasi.	Pemerintah Kabupaten Tapin perlu membuat kebijakan atau pedoman keamanan informasi yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Bupati.
21	Keamanan (Keamanan Data dan Informasi)	Pemerintah Kabupaten Tapin belum memiliki standar teknis dan prosedur keamanan data dan informasi.	Pemerintah Kabupaten Tapin perlu membuat standar teknis dan prosedur keamanan data dan informasi yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Bupati.

#	Domain	Kondisi Eksisting	Kondisi Ideal
22	Keamanan (Keamanan Aplikasi SPBE)	Pemerintah Kabupaten Tapin belum memiliki standar teknis dan prosedur keamanan aplikasi SPBE.	Pemerintah Kabupaten Tapin perlu membuat standar teknis dan prosedur keamanan aplikasi SPBE yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Bupati.
23	Keamanan (Keamanan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah)	Pemerintah Kabupaten Tapin belum memiliki standar teknis dan prosedur keamanan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah.	Pemerintah Kabupaten Tapin perlu membuat standar teknis dan prosedur keamanan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Bupati.
24	Keamanan (Keamanan Jaringan Intra Pemerintah)	Pemerintah Kabupaten Tapin belum memiliki standar teknis dan prosedur keamanan jaringan intra pemerintah.	Pemerintah Kabupaten Tapin perlu membuat standar teknis dan prosedur keamanan jaringan intra pemerintah yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Bupati.
25	Keamanan (Keamanan Pusat Data)	Pemerintah Kabupaten Tapin belum memiliki standar teknis dan prosedur keamanan Pusat Data	Pemerintah Kabupaten Tapin perlu membuat standar teknis dan prosedur keamanan Pusat Data yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Bupati.



Pemerintah Kabupaten Tapin  
2022